



DINAS KEBUDAYAAN (KUNDHA KABUDAYAN)
ꦢꦶꦤꦱ꧀ꦏꦼꦧꦸꦢꦪꦲꦤ꧀ꦏꦁꦧꦸꦢꦪꦲꦤ꧀
KABUPATEN BANTUL

PRA CIH NA

BULETIN
SEJARAH

EDISI 1/2024

193 TAHUN

NYAWIJI:

MEMBACA ULANG SINERGITAS
MASYARAKAT DENGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN
BANTUL

**PARIWISATA DI
PANTAI SELATAN
JAWA**

PADA MASA KOLONIAL

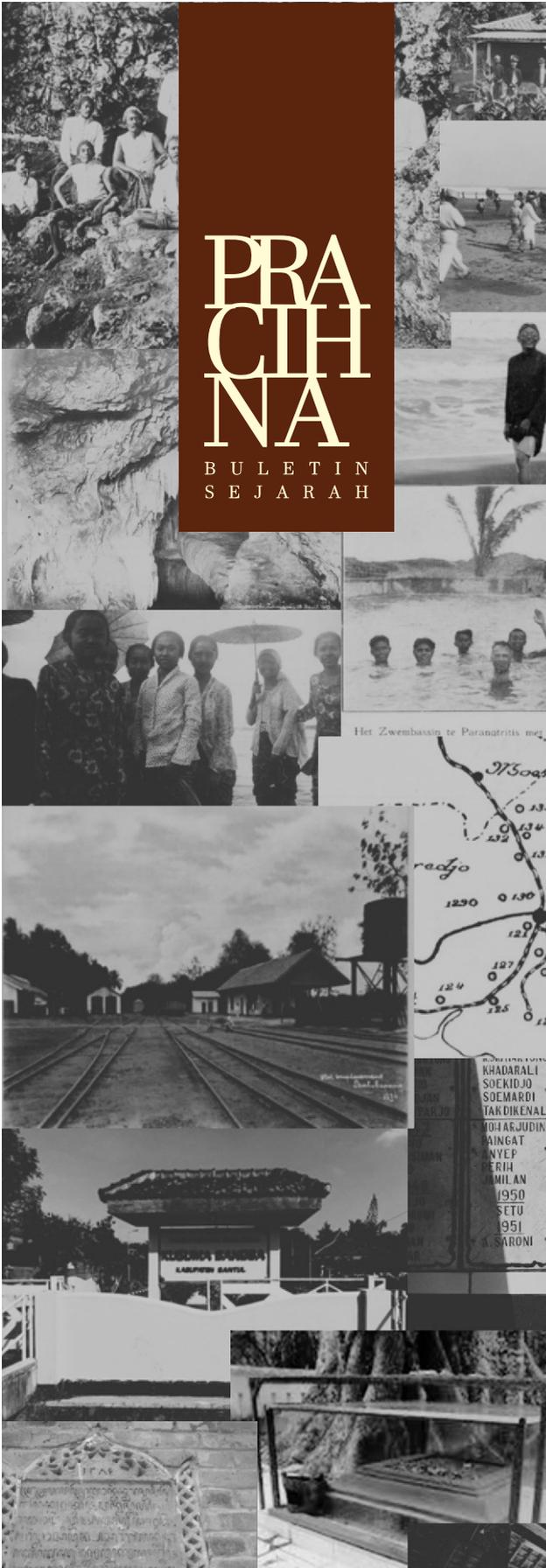
TIDAK DIPERJUALBELIKAN



**DANA
KEISTIMEWAAN**

PRA CIH NA

BULETIN
SEJARAH



Sampul Depan:
Foto Joglo Bantul Karang,
2024

Sumber:
Dokumentasi Tim Redaksi



Prosesi **Kirab Siwur**, salah satu tradisi budaya rutin tahunan di Bantul yang menjadi rangkaian awal pada acara **Nguras Enceh** di Makam Raja-Raja Imogiri, 11 Juli 2024.
(Foto oleh Tim Redaksi)

PRA CIH NA

B U L E T I N
S E J A R A H



PRACIHNA

SUSUNAN REDAKSI

Penasihat : Yanatun Yunadiana, S.Si., M.Si.
Penanggung Jawab : Purwanto, S.Pd., M.Si.
Pemimpin Umum : Devi Puspitasari, S.Ant., M.Sc.
Redaktur : Bayu Ananto Wibowo, M.Pd.
Penyunting/Editor : Albertus Sartono, S.S.
Sekretariat : Dhita Fitria Hernawati
Fanisa Fiandra Anindita, S.Hum.
Design Grafis : Arif Juliyanto
Fotografer : Risma Alifatun Nada
Uke Ardhian Listyo Saputro

Kontributor Artikel :

Dr. Ahmad Athoillah, M.Hum.
Dr. Sri Margana, M.Hum.
Dr. M. Iqbal Birsyada, M.Pd.
Goenawan A. Sambodo, S.S.
Aji Cahyo Baskoro, S.S., M.A.
Kuncoro Hadi, M.A.
Fahrudin, M.Pd.
Eri Sasongko Endratmo, S.Hum.
Arief Baskoro
Dwi Purnomo
Kuswandi
Supardal, M.Pd.
Angger Seta Adi, S.Pd.

RUBRIK

RANAH

| | |
|---|----|
| 193 Tahun <i>Nyawiji</i> : Membaca Ulang Sinergitas Masyarakat dengan Pemerintahan Kabupaten Bantul | 1 |
| Pariwisata di Pantai Selatan Jawa pada Masa Kolonial | 5 |
| Sejarah dan Pemaknaan Sumbu Filosofi pada Masa Kini | 21 |
| Tinggalan Tulis Sebagai Sumber Belajar Sejarah | 29 |

JELAJAH

| | |
|--|----|
| Peran Aparat Desa dalam Perekrutan <i>Rōmusha</i> : Kasus Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta | 37 |
| Industri Gula Kolonial dan Pemogokan Buruh di Bantul Awal Abad 20 | 43 |

KISAH

| | |
|---|----|
| Sejarah Taman Makam Pahlawan Nasional Kusuma Bangsa | 48 |
|---|----|

SINGGAH

| | |
|---|----|
| Sejarah Singkat dan Toponim Kalurahan Palbapang | 52 |
| Sejarah dan Toponim Kalurahan Ringinharjo | 56 |
| Sejarah & Toponim Kalurahan Trirenggo | 60 |
| Sejarah Asal-Usul Berdirinya Kalurahan Bantul | 62 |
| Sejarah Pendidikan di Kabupaten Bantul Sejak Masa Pergerakan Nasional | 65 |
| Sejarah Jamu dan Wedang Uwuh di Kabupaten Bantul | 69 |

SAMBUTAN

Assalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, buletin sejarah *Pracihna* dapat diterbitkan oleh Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul. Buletin sejarah ini pertama kali dibuat untuk menyajikan artikel tentang sejarah yang ada di Kabupaten Bantul. Berbagai peristiwa, tempat, tokoh yang terjadi di Kabupaten Bantul masih banyak yang belum didokumentasikan. Nilai-nilai kejuangan maupun kepahlawanan saat ini harus dikenalkan dan diterapkan oleh generasi muda, sehingga sejarah tetap lestari. Buletin sejarah ini juga menjadi media edukasi sejarah, yang diharapkan dapat menyajikan tulisan berdasarkan data.

Harapan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul, melalui buletin sejarah *Pracihna* agar generasi penerus dapat menerapkan nilai-nilai kepahlawanan, kejuangan, serta terus mencintai tanah air Indonesia. Bangga akan sejarah dan tidak melupakan sejarah, dapat menjadi pilar persatuan bangsa Indonesia. *Wassalaamu 'alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.*

Bantul, 10 Agustus 2024

Kepala Dinas Kebudayaan
(*Kundha Kabudayan*)
Kabupaten Bantul


* YANATUN YUNADIANA, S.Si, M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP.196903151999031008

PENGANTAR

Pracihna berasal dari kosakata dalam bahasa Jawa. *Pracihna* dapat dimaknai sebagai pertanda, perlambang, keterangan, Istilah *mracihnnani* dalam bahasa Jawa diartikan sebagai memberi tanda, memberi gambaran (KBJI, 2021, hlm. 613). Dalam konteks yang lain *Pracihna* juga dapat dimaknai sebagai menyatakan diri, menunjukkan diri, menghadirkan diri, mengada/menyatakan keberadaan diri, atau memberikan gambaran atau tanda akan sesuatu.

Nama tersebut dipilih untuk menamai buletin/terbitan bertema kesejarahan dari Seksi Sejarah dan Permuseuman Bidang Sejarah, Permuseuman, Bahasa dan Sastra, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul. Maksud pilihan nama tersebut agar historiografi di Kabupaten Bantul dapat semakin tergambarkan, ternyatakan, dan mengada ke hadapan khalayak, dan menjadi penanda tertentu, khususnya bagi masyarakat Kabupaten Bantul dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada umumnya.

Penerbitan *Pracihna* dipandang perlu mengingat edukasi kesejarahan untuk peserta didik maupun masyarakat umum relatif kurang. Pelajaran sejarah di dunia pendidikan umumnya mendapatkan porsi yang kecil, demikian juga kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengannya. Ada cukup banyak kegelisahan yang dirasakan masyarakat bersangkutan dengan latar belakang kesejarahan suatu peristiwa, lokasi/tempat-tempat tertentu, tokoh (saksi/pelaku), dusun/padukuhan, kota, kalurahan, kapanewon, kabupaten, dan provinsi tempat mereka tinggal dan hidup. Kegelisahan tersebut hampir sulit menemukan jawabannya. Hal yang muncul kemudian adalah cerita dari mulut ke mulut yang sarat dengan “katanya” yang dapat dipastikan akan penuh dengan pengurangan dan penambahan dari si penutur sesuai daya ingat dan bahkan kepentingannya.

Hadirnya *Pracihna* diharapkan menjadi sarana untuk memenuhi ruang-ruang kosong historiografi tersebut, khususnya di wilayah Kabupaten Bantul. Dengan demikian, historiografi di Kabupaten Bantul dapat terwujud, hadir, menyatakan diri, memberikan gambaran dan tanda bagi eksistensi kesejarahan Bantul secara lebih konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.

193 TAHUN NYAWIJI: MEMBACA ULANG SINERGITAS MASYARAKAT DENGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN BANTUL

Oleh:

Ahmad Athoillah

Staf Pengajar Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Email: ahmad.athoillah@ugm.ac.id

Berdasarkan *Human Development Index 2023*, Kabupaten Bantul berada dalam urutan ke empat dengan angka 81,74 sebagai wilayah administratif dengan SDM paling maju di Indonesia. Perlu diketahui bahwa hanya ada dua kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang terpilih dalam kriteria SDM maju, yaitu Sleman (peringkat I) dan Bantul (peringkat IV).

Pada bulan Mei 2024 Pemerintah Kabupaten Bantul menerima anugerah sertifikat Adipura Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Penerimaan anugerah tersebut tidak terlepas dari prestasi Pemerintah Bantul dalam mengelola sampah dan menciptakan ruang terbuka hijau. Prestasi yang penting pada saat pengelolaan sampah dan ruang hijau menjadi masalah pelik di beberapa wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekali lagi, Pemerintah Kabupaten Bantul yang usianya genap 193 tahun menjadi pelopor dalam berbagai hal, terutama dalam penyelesaian masalah sampah di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berbagai prestasi dan keberhasilan pemerintah Kabupaten Bantul tersebut di atas tentu tidak lepas dari dukungan segenap masyarakat Bantul. Berbagai keberhasilan pembangunan di Bantul dapat menjadi

sebuah indikasi tentang terjadinya sinergitas (*sawiji*) antara masyarakat dan Pemerintah Bantul dalam membangun wilayah di selatan Kota Yogyakarta ini. Sinergitas yang terjadi tersebut dipastikan karena banyak kebijakan Pemerintah Bantul yang berpihak kepada kesejahteraan Masyarakat Bantul. Salah satu keberpihakan kebijakan Pemerintah Bantul kepada masyarakat terlihat dalam usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan percepatan pembangunan. Usaha tersebut dijalankan untuk 10 proyek strategis Kabupaten Bantul yang dilakukan pada tahun 2024.

Kebijakan Pemerintah Bantul dengan 10 proyek strategisnya tertuang dalam Keputusan Bupati Bantul Nomor 90 Tahun 2024. Tujuan utama dari proyek strategis tersebut adalah program peningkatan kualitas SDM, usaha peningkatan infrastruktur kewilayahan dalam mendukung pemerataan, penguatan ekonomi inklusif, pertumbuhan iklim investasi, langkah untuk mengurangi pengangguran dan pengentasan kemiskinan, serta pengelolaan lingkungan hidup dan risiko bencana. Proyek strategis tersebut tentu dapat berlangsung progresnya asalkan selalu didukung oleh kekuatan kolektif masyarakat umum di Bantul. Program-program yang dianggap pro-rakyat di atas juga menjadi perhatian

penting pemerintah kabupaten dengan masyarakat Bantul.

Berbagai dukungan kuat masyarakat Bantul terhadap usaha, pembangunan, dan kekuatan politik pemerintahan bukan suatu hal yang baru dan muncul secara mendadak. Perlu juga diingat bahwa masyarakat Bantul mewarisi peradaban panjang sejarah terbentuknya kekuasaan politik di wilayah yang kemudian disebut sebagai Daerah Istimewa Yogyakarta. Karakter sosial masyarakat Bantul adalah pengawal dan penjaga keutuhan kepemimpinan raja-raja Jawa dari awal Dinasti Mataram sejak akhir abad ke-15. Dalam konteks pembentukan wilayah kekuasaan Mataram, dapat dipastikan bahwa masyarakat di sekitar pusat peradaban Mataram seperti di Kerto, Pleret, Lipuro, dan Imogiri adalah para pendukung setia Raja Mataram. Tentu hal ini tidak dimiliki oleh siapa pun di Yogyakarta, kecuali mereka yang tinggal di sekitaran Sungai Opak dan Sungai Progo -disebut sebagai *Nagara Gading* atau *Gading Mataram*. Para tokoh dan abdi Mataram yang ikut berjuang di sekitar pusat peradaban Mataram ikut serta dalam memperluas wilayah, membuat bendungan, membangun istana Kerto dan Pleret, membangun makam Imogiri. Mereka adalah para kelompok atau kalangan terdepan dan terkemuka yang terampil, kuat, dan setia (loyal).

Kekuatan leluhur masyarakat Bantul ditunjukkan ketika usahanya dalam mendukung politik Pangeran Mangkubumi dalam mendirikan Kasultanan Yogyakarta pasca-tahun 1755. Dapat diduga bahwa masyarakat sekitaran Sungai Opak-Progo adalah para pembangun keraton dan menjadi kekuatan militer awal dari Keraton

Kesultanan Yogyakarta. Jiwa tersebut oleh para masyarakat awal Bantul diteruskan dengan berjuang melawan kekuasaan kolonial Belanda melalui dukungan terhadap Pangeran Diponegoro. Perlu diketahui bahwa Perang Jawa adalah perang terbesar sampai abad ke-19 yang dihadapi oleh kolonial Belanda, namun awal gerakan gerilya selama lima tahun Pangeran Diponegoro bermula dari Selarong. Dukungan masyarakat Bantul Karang terlihat lagi ketika Sultan Hamengkubuwana V memerintah Nayaka Kasultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negara untuk menjadi Bupati Bantul pertama pada 20 Juli 1831 ketika seorang diperintah Sultan Hamengkubuwono V menjadi Bupati.

Tidak hanya sampai di situ, masyarakat Bantul menjelang abad ke-20 juga harus kuat dan tetap bertahan pada saat berbagai krisis ekonomi menghantam kehidupan sosial perekonomian. Dapat disebutkan bahwa perekonomian masyarakat Bantul terpuruk ketika terkena Krisis Malaise (*jaman meleset*) pada awal abad ke-20. Sekali lagi, masyarakat Bantul juga harus tegar ketika jiwa mereka terancam oleh militer Belanda pasca-kemerdekaan Republik Indonesia. Banyak dari masyarakat Bantul yang mendukung jajaran pemerintahan Republik yang baru di ibu kota Yogyakarta. Tidak hanya itu, masyarakat Bantul sebagian berperan sebagai pejuang kemerdekaan, melayani kebutuhan pejuang, dan lainnya. Bukti penting perjuangan rakyat Bantul adalah adanya markas pejuang di Bibis. Juga pertempuran antara pejuang dengan tentara Belanda di berbagai tempat di wilayah Bantul. Peristiwa terpenting adalah perang gerilya Jenderal Sudirman di penjuru wilayah Jawa yang ternyata dimulai dari sebuah rumah di Grogol

(Kretek). Sangat menarik ketika dua perang gerilya besar yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro dan masa setelahnya, yaitu Jenderal Sudirman semuanya dimulai dari wilayah Bantul.

Belum lagi tentang kekuatan sosial masyarakat Bantul yang sangat teruji ketika bencana gempa bumi mengambil berbagai aspek kehidupannya. Gempa itu terjadi ketika Sabtu 27 Mei 2006 pukul 05.53 WIB dengan magnitudo 5,9. Menurut data Kompas (2023) yang mengutip data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul disebutkan sejumlah 4.143 korban jiwa yang meninggal terkena runtuhnya bangunan. Kejadian tersebut membuat masyarakat Bantul menjadi kolektif yang kuat dan mengerti akan pentingnya sinergitas dengan pemerintahan. Bukti-bukti peran perjuangan rakyat Bantul dan kekuatan sosial dalam menghadapi situasi tidak menentu tersebut akhirnya menjadi energi kolektif pada sejarah pembangunan identitas masyarakat Bantul. Masyarakat Bantul dalam perjalanan sejarahnya disebut selalu setia mendukung (*nyawiji*) berbagai program keberlangsungan pembangunan pemerintahan Bantul.

Energi kolektif masyarakat Bantul itulah yang kemudian dapat mendukung pemerintah kabupaten dalam meningkatkan kualitas kehidupan masyarakatnya. Beberapa dukungan masyarakat Bantul juga terlihat pada program pemerintah kabupaten dalam usaha meningkatkan pengamalan Pancasila untuk tata kehidupan bermasyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan. Dukungan masyarakat Bantul juga menyumbangkan kekuatan sosialnya untuk usaha optimalisasi gerakan masyarakat peduli lingkungan

dan budaya tangguh bencana. Masyarakat Bantul juga mendukung program pemerintah dalam peningkatan peran serta masyarakat dalam layanan pendidikan dan kesehatan. Sinergitas masyarakat Bantul dengan komponen pemerintahan kabupaten juga dalam kegiatan mengoptimalkan daya saing produk unggulan daerah, seperti pengembangan sektor industri, pertanian, dan pariwisata. Partisipasi masyarakat juga dapat mewujudkan beberapa hal, antara lain: Bantul sebagai 'Kabupaten Layak Anak', menciptakan kondisi yang aman dan nyaman guna menyukseskan pemilihan umum serentak tahun 2024. *Nyawijinya* masyarakat dengan pemerintah Kabupaten Bantul juga mendukung pelestarian serta pengembangan budaya lokal untuk memperkuat Keistimewaan DIY. Semua program pembangunan pemerintah Bantul dapat tercapai dengan dukungan masyarakat Bantul, yang memiliki perjalanan sejarah istimewa tentang sinergitas dan dukungan kepada pemerintahan politik sejak abad ke-16.

Dengan itulah, maka momen Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Bantul ke-193 dapat digunakan untuk merenungkan kembali tentang kekuatan sinergitas rakyat dengan pemerintahan. Momen Hari Jadi Kabupaten Bantul dapat menjadi refleksi tentang pentingnya mengedepankan rakyat, menjaga kerukunan, mengutamakan kebersamaan, dan dapat selalu menjaga 'energi kolektif' sinergitas masyarakat dengan Pemerintah Bantul. Selain itu, ulang tahun pemerintahan Kabupaten Bantul ke-193 ini dapat digunakan untuk melihat ulang tentang peran masyarakat yang dominan kepada pemerintahannya, bukan selalu tentang peran pemerintahan kepada rakyatnya.

Hal tentang kebaikan pemerintah kepada masyarakatnya sudah sangat umum sekali disajikan oleh para pengamat atau politikus yang seolah-olah pemerintahlah selalu ada, dan masyarakatnya dimarginalkan. Mengingat kembali tentang kontribusi masyarakat Bantul

kepada pemerintahannya adalah energi dan tenaga penggerak bagi mesin-mesin pembangunan. Kepada segenap masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bantul diucapkan ***Dirgahayu Pemerintah Kabupaten Bantul ke 193.***

PROFIL PENULIS



Dr. Ahmad Athoillah, M.A.

Lahir di Sei Baru, Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, 16 Juni 1981.

Pendidikan:

- S-1 di Program Studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Yogyakarta (2000-2006).
- S-2 di Program Magister Jurusan Sejarah FIB UGM (2013-2015)
- S-3 di Studi Program Doktorat Ilmu-Ilmu Humaniora Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada (FIB UGM) (2021)

PARIWISATA DI PANTAI SELATAN JAWA PADA MASA KOLONIAL

Oleh:

Sri Margana

Staf Pengajar Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada

Email: s.margana@ugm.ac.id

Pendahuluan

Bantul adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta yang berbatasan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Bantul memiliki garis pantai yang cukup panjang (16, 85 km) yang membentang dari perbatasan di Kabupaten Kulon Progo di barat hingga Kabupaten Gunung Kidul di sebelah timur. Dengan garis pantai yang cukup panjang ini, Kabupaten Bantul juga dikenal dengan potensi maritimnya berupa perikanan. Menurut data statistik tahun 2023 nelayan di Kabupaten Bantul berjumlah 381. (*Radar Jogja* 14 Januari 2024). Akan tetapi tampaknya jumlah ini terus mengalami penurunan, karena potensi hasil perikanan tidak memberi harapan ekonomi yang cukup baik bagi para nelayan di wilayah ini sehingga banyak nelayan yang meninggalkan profesinya. Potensi maritim lain yang justru semakin meningkat adalah wisata pantai. Pemerintah Kabupaten Bantul sangat serius dalam upaya mengembangkan potensi wisata pantai di wilayah ini. Tempat-tempat penting yang menjadi tujuan wisata di wilayah ini adalah Pantai Parangtritis, Parangkusumo, Parangendog, Kuwaru, Samas, Pandansimo, dan Pantai Depok. Di sekitar wilayah ini mulai menjamur tempat-tempat penginapan, restoran, dan vila-vila yang memanjakan kaum wisatawan. Di sekitar pantai juga

ditemukan banyak atraksi budaya dan seni untuk meramaikannya. Di samping keindahan alamnya, pantai selatan Jawa juga mengundang minat dari para wisatawan khusus yang ingin menyaksikan ritual adat dan budaya yang secara reguler diadakan di tempat ini, seperti; upacara labuhan dari keraton, Peh Cun, Merti Bumi Pisungsung Jaladri, Labuhan Hondodento, dan lain-lain.

Fenomena semaraknya wisata alam, ritual, dan budaya di pantai selatan Jawa ini sebenarnya bukan hal baru, namun sudah terjadi sejak masa kolonial. Artikel singkat ini menguraikan tentang sejarah wisata di pantai selatan Jawa di masa kolonial, serta dinamika sosial-budaya yang melingkupinya. Tulisan ini terutama didasarkan pada sumber-sumber koran kolonial dan buku-buku petunjuk wisata di zamannya, serta catatan-catatan pribadi dari beberapa tokoh yang menceritakan pengalaman mereka melakukan kunjungan ke wilayah ini. Untuk melengkapi artikel ini disertakan juga foto-foto sezaman tentang aktivitas turisme di pantai selatan Jawa selama paruh pertama abad ke-20.

Wisata Kolonial di Yogyakarta

Pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Hindia Belanda telah menggalakkan pariwisata di Hindia-Belanda, khususnya bagi para wisatawan

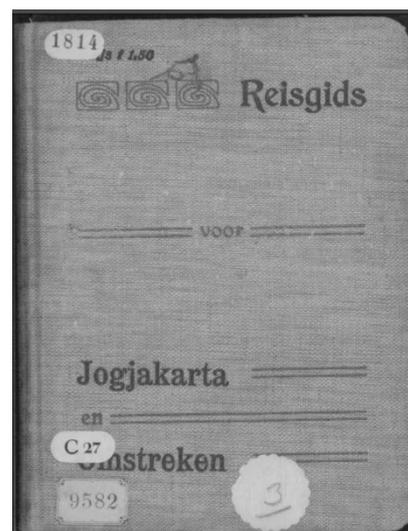
dari Eropa. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemasukan negara kolonial dari sektor wisata. Upaya mempromosikan wisata dari turis mancanegara ini dimungkinkan terutama setelah perkembangan teknologi kapal uap dan juga pembukaan Terusan Suez. Hal itu telah membuat jarak tempuh antara Eropa dengan Hindia Belanda semakin singkat. KPM (*Koninkelijk Paketvaart Maatschappij*) sejak awal abad ke-20 mulai menggencarkan promosi-promosi perjalanan yang menggiurkan ke Hindia Belanda. Tempat-tempat yang menjadi destinasi utama adalah Pulau Jawa, Bali, dan juga Maluku. Di antara tempat-tempat yang menjadi destinasi utama wisatawan adalah Yogyakarta dan sekitarnya. Di wilayah ini terdapat berbagai tempat wisata baik wisata sejarah, keindahan alam, maupun wisata seni-budaya. Di antaranya candi-candi seperti Borobudur, dan Prambanan, Kraton serta berbagai tradisi seni dan budayanya, juga tempat-tempat indah seperti pantai-pantai di pesisir selatan Yogyakarta.

Wisata Kolonial di Pantai Selatan Jawa

Ketenaran Pantai Selatan Jawa sebagai tempat yang legendaris bagi masyarakat Jawa sudah didengar oleh masyarakat Eropa bahkan jauh sebelum promosi wisata yang dibuat oleh pemerintah kolonial di awal abad XX. A.J. Spaan yang pernah menjabat sebagai Residen Surakarta telah menunjukkan minatnya untuk mengunjungi tempat ini ketika berkunjung ke Yogyakarta. Ia sangat ingin melihat tempat-tempat legendaris yang dianggap penting bagi kraton, seperti Parangkusumo, Parangtritis, Gembiraowati bahkan

mengunjungi sebuah makam suci di sekitar tempat ini.

Setidaknya sampai tahun 1909, wilayah pantai selatan Jawa telah masuk dalam *reisgids* (buku panduan wisata) yang dibuat oleh para pelaku wisata kolonial. Salah satunya adalah karya I. Groeneman, *Risgids Jogjakarta en Omstreken* (Buku Petunjuk Wisata untuk Yogyakarta dan Sekitarnya). Dalam buku ini Groneman menggambarkan untuk menuju pantai selatan Jawa dari Yogyakarta wisatawan dapat naik kereta uap ke selatan dalam waktu sekitar 2 jam untuk mencapai stasiun terminal di Srandakan di tepi timur sungai Prâgá yang dangkal namun lebar. Akan tetapi tampaknya naik kereta kuda ke Mancingan, di kaki bebatuan pegunungan bagian timur selatan, lebih disukai karena beberapa alasan. Di sana wisatawan akan menemukan pasanggrahan yang sudah mendapat izin dari pemerintah, dan bisa menginap dengan cukup nyaman, asalkan satu atau lebih dari 7 kamar yang ada masih tersisa.



Gambar 2.1 Buku Petunjuk Wisata untuk Yogyakarta dan Sekitarnya
Sumber: KITLV

Cara lain, wisatawan berkendara ke sana dalam waktu 3 jam sepanjang jalan yang mengarah ke selatan sepanjang sisi timur kraton dan lebih jauh lagi melewati bekas pos Gabusan dan Butuh ke Glondong, yang biasanya menuju ke sisi lain desa yang dilintasi Kali Opak, yaitu Desa Krètèg. Di sana orang berkendara, ditarik dan didorong oleh kuli bebas, melewati sungai yang terlalu lebar untuk jembatan biasa, sebelum sampai di pasanggrahan dan menetap di sana, meski hanya sehari. Gerobak pulang pergi, dengan perlengkapan yang diperlukan, biayanya mulai dari 12 gulden, tanpa tip lebih lanjut, tetapi ditambah 1 gulden untuk rumput, jika menginap. Biasanya pemilik gerobak Tionghoa menuntut lebih banyak dan tahu bagaimana menghubungkan pengawas hotel dengan kepentingannya. Kuli gratis dibayar 1 gulden setiap kali untuk bantuan perjalanan melalui sungai (Groeneman: 1909).

Halaman pasanggrahan terlindung dari angin muson timur yang deras oleh dinding batu tinggi di pegunungan terdekat dan oleh bukit pasir dari selatan dan barat. Juga dari galeri depan kedua wisma tersebut, terlihat laut di antara perbukitan dan mendengar suara gemuruh ombak. Beberapa ratus langkah membawa kita ke pantai sebenarnya dan ke pasir hitam yang lepas. Di belakang pasanggrahan terdapat bukit-bukit pasir yang ditumbuhi tanaman berduri, di bagian atas ditumbuhi semak berduri, pandan, dan kaktus. Di hadapan pasanggrahan Samudera Hindia, berwarna abu-abu tua atau biru bercahaya, dari jarak tak berujung ombaknya yang lebat dan tertutup busa bergulung masuk atau, halus dan ringan tanpa ada gerakan lain selain gelombang

besar, mendorong perairannya yang cerah berkilauan, ke mana pun, mengalir deras, melawan lereng pantai, membentuk gelombang ombak yang tinggi dan, pecah, tenggelam (Groeneman: 1909).

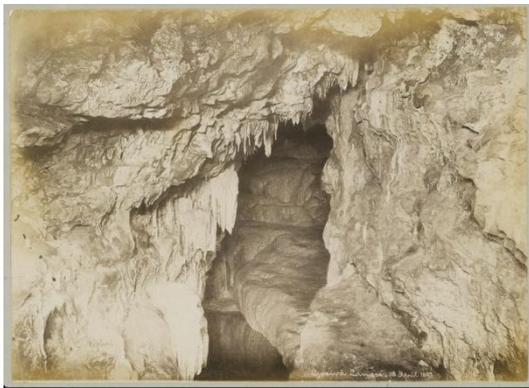


Gambar 2.2 Pasanggrahan di Parang Tritis
Sumber: KITLV.

Ke arah selatan, tidak ada daratan, tidak ada pulau yang muncul dari perairan tersebut sampai di sana. Di sebelah kanan, ke arah barat, dataran pantai tak berujung hingga pegunungan pesisir bekas kediaman Bagelèn dan di sebelah kiri adalah bebatuan yang sangat liar dan jarang tumbuh di pegunungan bagian timur, yang terbentang tak terputus di sepanjang pantai selatan Jawa hingga ke sudut timur. Jika wisatawan ingin mendaki pegunungan itu, bisa mendaki dua gunung yang disebut ditemukan kuburan suci, salah satu dari Sèh (syekh) Maulana, yang lain dari seorang Muslim yang mungkin tidak kalah salehnya, yang disebut Běla-Belu. Akan tetapi masyarakat Jawa mempunyai pemikiran yang berbeda mengenai kematian tersebut. Hal yang jauh lebih penting adalah perjalanan ke gua sarang burung di Rongkob, namun perjalanannya memakan waktu 2 hari lebih jauh ke timur (Groeneman: 1909).

Akan tetapi jika ingin melihat gua stalaktit yang sangat indah, dapat dicapai dari bawah saat air surut, menyusuri jalan setapak yang dihantam ombak saat banjir.

Dari atas wisatawan bisa sampai di sana dengan menggunakan tangga dan tangga batu. Orang Jawa menyebut gua ini "Guwa Langsé". Namun, di belakang pasanggrahan ada gua Parang Těritis lainnya, namun lebih kecil, hampir seluruhnya dipenuhi stalaktit. Air yang merembes ke dalamnya sangat sejuk dan segar, dan dari situ dialirkan melalui bambu menuju baskom batu bata di kamar mandi batu milik pasanggrahan (Groeneman: 1909).



Gambar 2.3 Goa Langse, 1897
Sumber: KITLV

Sedikit lebih jauh ke pedalaman, mata air mineral hangat muncul dari dalam tanah, Parang Wèdang. Di sekitarnya dibangun pemandian batu beberapa tahun yang lalu dengan 2 sayap dan 3 ruangan di setiap sayap, masing-masing dilengkapi dengan bak mandi batu yang dapat diisi langsung dari sumbernya melalui keran tembaga. Sumbernya dilindungi dari kontaminasi oleh dinding yang melingkupinya. Gelembung gas muncul dari tanah di lebih dari satu tempat.



Gambar 2.4 Para turis menikmati kolam renang di Pantai Parangtritis
Sumber: Groeneman, 1909

Wisatawan tidak boleh melewati pantai tanpa melihat bagaimana orang Jawa mengekstraksi garam seputih salju, yang jauh lebih murni dibandingkan garam coklat abu-abu, yang biasa dijual pemerintah di mana pun di Pulau Jawa sebagai komoditas monopoli. Tentu saja harganya juga jauh lebih murah sehingga menjadi komoditas yang diinginkan para penyelundup. Akan tetapi komoditas ini akan kehilangan nilainya jika pemerintah juga melarang dan mengkriminalisasi ekstraksi garam dan menyediakan garam Madura dalam kemasan kering baru dengan harga lebih murah di mana pun, termasuk di negara pangeran ini. Dengan demikian, akan berakhir pula riba yang dilakukan oleh para penjual resmi yang dibayar secara wajar, namun menghasilkan uang dengan mengorbankan penduduk asli (Groeneman: 1909).

Alat pengisap garam Jawa dimulai pada saat air surut dengan cara meratakan pasir kering dengan cangkul kayu (*soroq*) kemudian berulang kali menyemprotnya dengan air laut yang diuapkan di bawah sinar matahari hingga jenuh. Pasir tersebut kemudian dikerok dan dituangkan ke dalam saringan bambu (*irig*) dan direndam berulang kali dengan air laut. Air yang merembes melalui saringan

tersebut kemudian diupkan dengan cara direbus dan garam dibiarkan mengalami proses kristalisasi sederhana dalam periuk besar dari tanah (*kwali*). Masih ada alkali yang sangat kaya garam, yang dibiarkan menetes ke dahan bambu sepanjang lengan, yang kemudian ditutupi dengan lapisan kristal garam putih salju yang tebal, yang dianggap lebih halus dan jernih daripada yang lain (Groeneman: 1909).

Kesan dan Susana lain di lokasi wisata Pantai Selatan Jawa dikisahkan oleh A.H. Warnaar yang pengalamannya selama mengunjungi Pantai Selatan ia tuliskan dalam bagian dari buku baca untuk sekolah guru di Jawa. Dalam tulisannya itu Warnaar antara lain menulis:

“Pagi-pagi sekali, menjelang matahari terbit, kami meninggalkan Jogja dengan menggunakan kereta kuda. Meski hari masih gelap, kami sudah bertemu dengan beberapa penduduk asli, khususnya perempuan, yang dalam adat Jawa berjalan dengan posisi tertunduk sambil membawa beban berat di punggung, dalam perjalanan ke pasar atau berencana membeli sayur-sayuran dan buah-buahan bersama. Cangkangnya dijual di kota.

Duduk dengan nyaman di dalam gerbong, kami melanjutkan perjalanan di pagi yang sejuk. Itu mulai menjadi lebih terang dan lebih terang dan fajar di timur secara bertahap berubah menjadi warna merah yang aneh. Matahari, yang tadinya terbit begitu megah saat langit cerah, kini tetap tersembunyi di balik awan, yang

terus-menerus terdorong ke daratan oleh angin laut. Jalan kami melewati ladang subur pemekaran Mataram. Di sini terlihat sawah-sawah yang baru saja ditanami dan ada pula yang sudah ditumbuhi padi yang sudah matang, menunggu panen, ada ladang yang disebut tanaman kedua, yaitu buncis, singkong, ketela, dan lain-lain. Selanjutnya diikuti ladang luas dengan pertumbuhan tebu yang tinggi, di atasnya puncak-puncak putih menjulang lembut melambai. Ladang nila jarang ditemukan.

Budidaya tanaman ini tampaknya semakin menurun karena rendahnya permintaan nila dibandingkan masa lalu. Meskipun belum lama ini terdapat banyak pabrik kaya nila di Jawa, kini hanya ada sedikit, terutama di Vorstenlanden. Terlebih lagi, Perkebunan Pemerintah telah dihapuskan selama kurang lebih empat puluh tahun.

Melewati pos kedua jalan menjadi lebih teduh. Seseorang benar-benar dapat berbicara tentang sebuah jalan di sini. Pepohonan di kedua sisinya, Asem Blanda, cukup kecil, namun masih memberikan perlindungan yang cukup terhadap panas. Langit berangsur cerah dan sesekali sinar matahari menerobos tutupan awan yang semakin menipis. Kami semakin mendekati Pegunungan Selatan. Bebatuan yang cukup gundul berwarna putih kekuningan di beberapa tempat mulai terlihat. Di sana-sini sebatang pohon tumbuh, namun keseluruhannya tetap menyajikan pemandangan

yang berbeda. Beda jauh dengan gunung-gunung lain yang sering kali ditutupi hutan lebat hingga puncaknya, terkadang belum diinjak oleh siapa pun.

Akhirnya baru melewati pos ketiga, kita sampai di Sungai Opak. Di sana, di tempat aliran sungai ini bertemu dengan pegunungan dan terpaksa membelok ke barat, kami menyeberanginya. Meski dekat dengan mulut, sangat sedikit air yang mengalir melalui dasar yang cukup lebar. Kedalaman rata-rata tidak lebih dari beberapa kaki. Jadi tidak ada keberatan untuk berkendara langsung melewati sungai. Kuda-kuda besar itu berjalan menyusuri tepian sungai dengan langkah cepat, namun tak lama kemudian gerobak itu tersangkut di tanah berpasir, sehingga sejumlah orang harus datang membantu kami. Dengan bersatu padu, saling tarik menarik, akhirnya sampai di seberang dan berlanjut ke pasanggrahan Parang Tritis. Sementara kusir dan pelari pergi untuk merawat kuda-kuda, kami keluar dan berjalan menyusuri jalan setapak menuju pesisir selatan. Beberapa menit kemudian kami sudah sampai di hadapan kami terhampar lautan luas.

Sejauh mata memandang tak ada apa-apa selain air dan udara. Laut yang hijau jernih, ombak bersisir putih yang bergulung deras di atas dataran pantai dan di sebelah kiri kami deburan ombak di bebatuan Goenoeng Kidoel, semuanya

memberi kesan tersendiri. wajah cantik ke atas! Kami menghirup udara laut yang segar dan murni dengan penuh nafsu. Sungguh-sungguh! ini saja sepadan dengan perjalanan di sepanjang jalan berdebu.

Tujuan utama perjalanan kami adalah sebuah gua terkenal, tempat tinggal ratu roh Njai Lårå Kidoel. Banyak penduduk asli yang percaya bahwa orang yang beristirahat di sini dibantu oleh sang dewi dalam mimpi dengan keberuntungan. Bahkan para pangeran dan bangsawan Jawa dahulu pernah mengunjungi tempat ini ketika hendak mempersiapkan suatu urusan penting. Ini bukan rencana kami. Kami hanya ingin melihat gua, markas ratu. Namun kami segera menyadari bahwa air yang tinggi menghalangi jalan kami, sehingga kami terpaksa berbalik arah. Sekali lagi perjalanan dicoba melewati jalan batu sempit di sepanjang dinding gunung yang tegak lurus. Namun upaya itu juga gagal, jalannya terlalu berbahaya.

Ketika kami mengetahui bahwa gua tersebut tidak dapat dijangkau, kami memutuskan, karena hari masih pagi, untuk berjalan ke arah barat sepanjang pantai, jika memungkinkan ke muara Sungai Opak. Dalam perjalanan itu kami melihat beberapa penduduk asli menambang garam dengan jarak yang cukup jauh satu sama lain. Orang-orang melakukan hal ini dengan cara yang agak primitif, yang tentunya dapat diperbaiki.

Mereka menyemprot sebagian pantai dengan air laut, yang sebagian menguap dan sebagian lagi terserap oleh tanah. Lapisan pasir bagian atas kemudian mengandung larutan garam yang lebih kuat dibandingkan air laut. Pasir ini dikumpulkan dengan menggunakan semacam cangkul kayu. Pembuat garam berdiri di depan saringan bambu besar yang dipasang pada empat tiang. Pembantunya membawa pasir dan melemparkannya ke dalam saringan. Pembuat garam kemudian menyemprot isinya dengan air, yang perlahan-lahan menetes melalui lapisan pasir dan saringan ke dalam pot tanah yang diletakkan di bawahnya. Hal ini menghasilkan solusi yang sudah cukup kuat. Dengan menguapkan air di atas api, garam laut akhirnya tersisa. Ini tidak mungkin terlalu murni, karena air laut mengandung zat lain selain garam meja yang memberikan rasa pahit. Namun tampaknya garam ini memenuhi kebutuhan masyarakat awam.

Garam laut diekstraksi dengan cara serupa di Eropa. Namun persiapannya di sana lebih sempurna. Alih-alih menggunakan pasir, yang digunakan adalah perancah kayu bakar, yang melaluinya air laut dibiarkan meresap secara perlahan. Penyemprotan ini diulangi beberapa kali dengan air yang sama, sehingga akhirnya tersisa alkali yang kuat. Larutan selanjutnya diuapkan dalam panci

dangkal sampai garam mulai mengkristal.

Setelah berjalan lebih dari satu setengah jam, kami sampai di muara Kali Opak. Sungai di sini memiliki lebar yang sangat besar, yang tidak dapat diharapkan dari aliran sungai yang relatif kecil. Anehnya, lidah tanah yang panjang dan sempit menjulur di depan mulut, sehingga cekungan yang bentuknya seperti ini agak mengingatkan pada pelabuhan. Setelah memperhatikan hal ini, kami memulai perjalanan pulang, karena hari sudah hampir tengah hari dan kami masih harus berjalan cepat di depan. Kami tiba kembali di Parang Tritis sekitar jam setengah satu. Kuda-kuda sudah diikat, pelari membunyikan cambuknya dan kami kembali ke Jogja dengan kecepatan yang baik. Perjalanan yang melelahkan, namun kami tetap sangat puas dengan apa yang kami saksikan di pesisir Selatan Jawa.” (A.H. Warnaar: 1909).

Apa yang diceritakan oleh Warnaar tersebut tampak sejalan dengan gambaran yang diberikan oleh Groeneman dalam buku panduan wisata yang ia tulis di tahun yang sama. Sejak dipromosikannya wilayah pantai selatan sebagai destinasi wisata, memang mulai banyak warga Yogyakarta dan sekitarnya menyempatkan diri untuk berwisata ke tempat ini, meskipun akses menuju ke sana masih sulit, terutama karena belum adanya jembatan yang menghubungkan antara Parang Tritis dan Yogyakarta.

Banyak siswa-siswa sekolah juga turut dibawa berwisata ke Pantai Selatan oleh guru-guru mereka. Seperti yang

dilakukan oleh Nyonya J. Eggink guru dari Houdhuischool Yogyakarta yang membawa murid-muridnya ke Parangtritis pada tahun 1931.



Gambar 2.5 Para siswi sekolah Houdhuischooll Yogyakarta di Parngtritis 1931
Sumber: KITLV

Para bangsawan dan keluarganya pun tidak mau ketinggalan untuk menyempatkan berwisata di Parangtritis. Seperti yang dilakukan oleh keluarga Bendara R.A. Adipati Poerboadi Koesoemo pada tahun 1920. Demikian juga masyarakat umum dan kalangan menengah Jawa dan Eropa setiap akhir minggu mereka menyempatkan diri berwisata ke Parangtritis.



Gambar 2.6 Keluarga Bendara R.A. Adipati Poerboadi Koesoemo pada tahun 1920
Sumber: KITLV



Gambar 2.7 Masyarakat umum khususnya kelas menengah Jawa dan Eropa di Parangtritis 1920
Sumber: KITLV

Keindahan pantai selatan Jawa dan juga keberadaan tempat-tempat legendaris di wilayah ini tidak hanya mengundang masyarakat yang ingin berwisata ke wilayah ini, tetapi juga mengundang beberapa tokoh yang memiliki berbagai profesi, seperti jurnalis dan fotografer. Salah satu fotografer istana Yogyakarta, Kassian Chepas juga tertarik untuk mengabadikan keindahan panorama di Pantai Selatan Jawa. Hasil-hasil jepretan kameranya yang diambilnya pada tahun 1897 menjadi koleksi yang langka dan menjadi saksi penting dari ketenaran Parangtritis sebagai destinasi wisata dan budaya pada abad ke-19.

Berikut ini adalah beberapa hasil karya bidikan kamera dari Chepas yang diambil pada tahun 1897 ketika ia mengunjungi tempat ini dengan beberapa para asisten dan pembantunya.



Gambar 2.8 Kassian Chepas beserta rombongannya di depan Goa Langse 1897
Sumber: KITLV



Gambar 2.9 Kassian Chepas berpose di Pantai Parangtritis 1897
Sumber: KITLV

Wisatawan Minat Khusus di Pantai Selatan

Di samping wisatawan-wisatawan yang sekedar ingin menikmati keindahan dan kesegaran alam Pantai Selatan Jawa juga banyak wisatawan atau bisa dikatakan juga peziarah yang datang ke Pantai Selatan untuk melihat atraksi atau ritual budaya, seperti upacara labuhan, ritual penguburan kuku dan jenggot Sultan di Parangtritis, ziarah di makam suci, bertapa serta mencari inspirasi dan berkah di Gua Langse dan juga melihat pengambilan sarang burung walet di Rongkop dan Karang Bolong.

Salah satu ritual kraton yang menarik perhatian para wisatawan asing pada wisata peminat khusus ini adalah ritual penguburan jenggot dan kuku Sultan di Parangtritis. Kemungkinan ritual ini sudah tidak diadakan lagi. Upacara ini dilakukan berkaitan dengan legenda hubungan antara raja-raja Mataram dengan Ratu Kidul. Dari pagi para abdi dalem kraton telah menyiapkan acara ini dengan membawa berbagai perlengkapan yang dipikul bersama-sama oleh beberapa orang menuju Pantai Selatan. Perlengkapan itu diusung dengan dipayungi. Pada saat yang sama para

pengunjung sudah berbondong-bondong mendatangi tempat ritual. Acara ini banyak menarik wisatawan asing Eropa yang ingin menyaksikan secara langsung ritual ini. Sesampai di lokasi para abdi dalem menyiapkan lubang di pinggir pantai yang cukup dalam kemudian menguburkan potongan kuku dan jenggot Sultan ke dalamnya, diikuti dengan doa-doa bersama. Setelah penguburan selesai mereka berbondong-bondong menuju pantai memikul perlengkapan ritual lain kemudian dilabuh ke Laut Selatan diikuti beramai-ramai oleh para pengunjung. Seperti yang dilakukan pada tahun 1935 ini masyarakat baik pribumi maupun asing menyaksikan acara ritual ini.



Gambar 2.10 Ritual penguburan jenggot dan kuku Sultan di Parangkusumo 1935
Sumber: KITLV



Gambar 2.11 Ritual penguburan jenggot dan kuku Sultan di Parangkusumo 1935
Sumber: KITLV

W.H. Ridderhof seorang jurnalis dan pengamat budaya menuliskan artikel berseri di koran *Nieuwe Apeldoornsche Courant* tentang hal-hal yang menarik secara budaya dari wilayah Pantai Selatan Jawa. Dari mereka yang sekedar wisata hingga mereka yang melakukan ziarah-ziarah khusus di sekitar Pantai Selatan Jawa. Dalam artikelnya yang berjudul “Indische Schetsen”, yang dimuat dalam koran *Nieuwe Apeldoornsche Courant*, Selasa 5 April 1932. Ridderhof menyatakan bahwa beberapa upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kunjungan ke Pantai Selatan Jawa, antara lain dengan mendirikan pasanggrahan (hotel pemerintah untuk pejabat pemerintah) dan hotel yang cukup besar telah dibangun di sana. Akan tetapi antusiasmenya tidak pernah menjadi besar, karena pantai tidak sepenuhnya dapat diakses dengan mobil atau kendaraan dan seseorang harus menempuh jarak yang cukup jauh dari

jalan utama, melalui jalan yang tidak terlalu lurus sebelum tiba di hotel. Selain itu, pantai ini dikenal sangat berbahaya. Kondisinya sangat menipu. Sekilas seolah-olah seseorang dapat berjalan jauh ke laut menyusuri pantai yang landai tetapi dari jarak dekat sudah sangat dalam. Ombaknya yang kuat membuat mandi di sana sangat berbahaya. Banyak orang yang ceroboh menemukan kuburannya di sana.

Namun bahaya lain mengancam di sana! Tepat sepuluh tahun yang lalu (1922), lima orang pemuda asal Surabaya yang bekerja di bidang perdagangan di sana memutuskan untuk menghabiskan libur Paskah di Yogyakarta. Mereka adalah empat orang Inggris dan satu orang Belanda yang pergi ke tempat terakhir dengan mobil dan tiba di sebuah hotel setelah perjalanan beberapa jam. Bukan hanya iklim Yogyakarta yang lebih sejuk dibandingkan panas terik kota perdagangan terbesar di Jawa, namun masyarakat Jogja juga menikmati reputasi yang layak sebagai klub terbaik di Hindia-Belanda.

Mereka menikmati perjalanan yang menyenangkan. Sayangnya, kesenangan itu akan berakhir! Pagi-pagi sekali mereka berangkat dengan perasaan ceria dan setelah menempuh perjalanan mobil yang menyenangkan mereka sampai di rumah bupati, kemudian mereka melanjutkan dengan berjalan kaki menuju hotel pantai. Lalu mereka pergi ke pantai. Mereka telah berganti pakaian di hotel dan karena telah diperingatkan akan adanya ombak yang kuat, mereka tidak berani pergi jauh ke laut dan saling bergandengan tangan erat. Orang Belanda itu berjalan di tengah. Tiba-tiba terdengar jeritan yang menyayat hati dan air menjadi merah. Karena ketakutan, mereka

buru-buru mundur ke pantai yang aman, tetapi yang di tengah dari lima orang itu tidak lagi mempunyai kekuatan untuk berjalan. Apa yang sudah terjadi? Monster yang mengerikan, seekor hiu telah menggigit sebagian besar sisi tubuhnya. Seluruh perutnya telah terkoyak. Mereka membaringkannya di pantai dan salah satu dari mereka, ketakutan, bergegas ke hotel untuk mencari bantuan. Akan tetapi pertolongan tidak dapat lagi menolong korban, tak lama kemudian ia menghembuskan nafas terakhir. Dokter yang datang tak lama kemudian hanya bisa memastikan kematian akibat luka serius dan mengizinkan jenazah untuk diangkut.

Upaya segera dilakukan untuk menetralkan hewan tersebut. Seekor anjing mati diikat pada sebuah kait berat yang dihubungkan dengan tali yang kuat. Setelah beberapa jam mereka berhasil menangkap hiu besar. Hewan itu ditarik ke pantai dan dibunuh. Menurut masyarakat Jawa yang percaya takhayul, hiu hanyalah alat Nyai Loro Kidul yang mungkin marah kepada kelompok tersebut. (W. H. Ridderhof, "Indische Schetsen", *Nieuwe Apeldoornsche Courant*, Dinsdag, 5 April 1932, 29e Jaargang No. 10254.)

Dalam artikelnya yang lain Ridderhof menceritakan lebih lanjut tentang legenda Nyai Loro Kidul dan kepercayaan masyarakat yang begitu besar terhadap legenda itu. Menurut Ridderhoff kepercayaan terhadap Nyai Loro Kidul sudah lama ada pada masyarakat di Pantai Selatan Jawa. Mereka percaya Nyai Loro Kidul bertakhta di dasar laut yang memanjang di sepanjang selatan Pulau Jawa. Di sana dia tinggal di istana yang indah dan selalu

dikelilingi oleh banyak roh bawahan. Akan tetapi sesekali dia juga tinggal di daratan. Selama di daratan ia menghabiskan masa tinggalnya di Gua Langse yang luas, dekat Parang Tritis, terletak di pantai selatan, beberapa jam perjalanan dari kota Yogyakarta. Di sana dia melimpahkan bantuannya kepada orang-orang kepercayaannya, terutama para raja dan pangeran. Menurut legenda, salah satu pangeran Kerajaan Mataram mempunyai hubungan intim dengannya. Sejarah Jawa kaya akan contoh pangeran yang mengasingkan diri di tempat Parang Tritis, untuk menerima wahyu di gua terdekat.

Pemimpin besar, Diponegoro, yang mempersulit pemerintah kolonial selama sekitar lima tahun, juga pernah menghabiskan cukup banyak waktu di sana dan diyakini bahwa niat perlawanan dan pemberontakan didapatkan dari sana. Sultan Yogyakarta tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut. Sultan tidak diperkenankan meninggalkan keraton tanpa sepengetahuan Gubernur terlebih dahulu. Larangan ini bermula dari pertimbangan Pemerintah karena dikhawatirkan jika Sultan pergi ke Parang Tritis akan mendapatkan inspirasi dari dewi di sana, sehingga melakukan perlawanan terhadap Pemerintah Kolonial Belanda. Sebuah tindakan yang sepenuhnya masuk akal, mengingat pengalaman yang diperoleh di masa lalu. Pakubuwana VI raja Surakarta ditangkap di Parangtritis karena secara diam-diam hendak membantu Pangeran Diponegoro. Kemudian raja ini diasingkan ke Ambon dan meninggal di sana.

Gua ini dikunjungi oleh penduduk asli untuk memberikan kesaksian atas rasa terima kasih mereka atas manfaat yang telah mereka terima, yang diyakini telah diberikan oleh Dewi Laut Selatan itu

kepada mereka. Masyarakat menunjukkan rasa terima kasihnya dengan memberikan persembahan, sebagian besar berupa bunga dan makanan. Selain penghormatan umum, Nyai Loro Kidul juga mendapat penghormatan khusus, yaitu: dari pemetik sarang burung walet. Kenikmatan dari sarang burung ini diperoleh dengan risiko besar bagi kehidupan para pemetik asli yang sangat gesit dan pemberani di gua-gua di sepanjang Pantai Selatan Jawa. Namun sebelum turun ke dalam gua, di mana bahaya mengancam di mana-mana, pengorbanan besar dilakukan untuk menenangkan sang Dewi Laut Selatan dan untuk mendapatkan bantuan serta bantuannya.

Selama masa panen, yang berlangsung selama beberapa minggu, beberapa kali makan kurban dilakukan dan di gudang tempat sarang disimpan, sebuah kuil kecil telah didirikan dan lampu dinyalakan untuk menghormatinya setiap Kamis malam. Bahkan, di masing-masing tempat terjadinya pemetikan yakni di Rongkob dan di Karang-Bolong, sebuah rumah yang diperaboti khusus untuknya dan dilengkapi dengan pakaian dan perhiasan yang indah.

Akan tetapi, bukan hanya masyarakat pribumi yang percaya akan kekuatannya, banyak orang Tionghoa juga dengan rendah hati berpaling kepadanya dan memohon berkah dan kemakmuran dalam urusan komersial dan jika dia kemudian memberinya nikmat, dia akan pergi ke gua setiap tahun untuk bersaksi atas rasa terima kasihnya. Ridderhoff menceritakan bahwa seorang pedagang Tionghoa terkenal dari Semarang yang awalnya sangat miskin, kemudian berubah menjadi orang kaya dalam

beberapa tahun. Konon kekayaannya ia peroleh berkat bantuan Nyai Loro Kidul. Setiap tahun, pada bulan terkabulnya doa pertamanya, ia pergi sendiri atau ditemani oleh orang-orang yang disayanginya ke Parang Tritis, dari sana pada pagi hari Jumat menuju gua Loro Kidul dan melakukan kurban ke sana dia, yang sifat baiknya dia berhutang kekayaannya.

Perjalanannya menuju Gua Langse sangat berbahaya karena letaknya di tebing di atas laut yang ombaknya sangat besar. Jika salah langkah atau terpeleset di batu yang licin bisa mendatangkan kematian. Ketika air pasang menerjang, ombak yang berbusa dan menghempas dengan suara gemuruh ke batu keras seolah selalu mengintai mangsanya.

Sekitar lima tahun yang lalu, (1927) orang Tionghoa tersebut melihat pelariannya dari gua terputus oleh derasnya air dan untuk menyelamatkan nyawanya dia harus melakukan perjuangan yang sangat keras agar ombak tidak dapat menguasainya. Dia menyelamatkan nyawanya dan turun ke dasar ketika laut surut. Namun rasa takut telah membuatnya cemas untuk melakukan perjalanan selanjutnya, namun dia tidak berani melewatkannya; Dewi Laut Selatan yang perkasa akan menentangnya! Itulah sebabnya, sepanjang tahun, ia membangun sebuah tangga besi yang kuat di dekat gua Nyai Loro Kidul, sehingga ia dapat mendaki lebih tinggi tanpa mempertaruhkan nyawanya jika ombak menghentikan perjalanannya dan ketika dia melakukan perjalanan lagi pada tahun berikutnya, dia merasa aman. Dia tidak sendirian: istrinya dan beberapa pelayan menemaninya. Akan tetapi Nyai Loro Kidul tampak marah dengan pemasangan tangga itu, karena sebelum mereka sampai di gua yang aman,

mereka dikejutkan oleh air pasang yang naik dengan cepat. Deburan ombak yang menggelegar menghantam bebatuan dan posisi rombongan kecil itu pun menjadi kaku. (W.H. Ridderhof, "Dua Dewi Pantai Selatan", *Nieuwe Apelodoirnsche Courant, Zaterdag*, 26 Maart 1932, 29e Jaargang).

Jembatan Menuju Pantai Selatan

Tampak bahwa sejak didirikan pasanggrahan dan hotel dengan kolam renang di Parangtritis telah membuat wisatawan banyak berdatangan ke tempat ini, namun secara kuantitas belum seperti yang diharapkan. Dari berbagai artikel dan kesaksian yang diceritakan oleh para pengunjung dan peminat wisata di Pantai Selatan Jawa tampak bahwa transportasi menjadi masalah utama, khususnya belum adanya jembatan penghubung menuju Parangtritis yang terputus oleh aliran Sungai Opak di Desa Kretek. Oleh karena itu, penduduk setempat dan manajer hotel dan pasanggrahan di Parangtritis Tuan Kersch mengajukan permohonan kepada pemerintah Kesultanan. Akan tetapi, permohonan ini ditolak karena biaya pembangunan yang cukup mahal dan belum sebanding dengan kemanfaatan ekonomi yang didapatkan. Akhirnya Tuan Kersch yang menginginkan agar usaha hotelnya mendapat keuntungan yang besar dari kunjungan para wisatawan berinisiatif untuk membangun jembatan dengan menggunakan uang sendiri, namun ia meminta agar diberikan izin untuk memungut retribusi tol bagi para pelintas jalan itu sebagai kompensasi atas biaya yang ia keluarkan. Akan tetapi pungutan itu tidak berlaku bagi penduduk di sekitar jembatan, karena mereka akan dimintai

tenaganya untuk membangun jembatan itu.

Akhirnya izin itu diberikan oleh pemerintah Kesultanan. Pada bulan Juni 1926, jembatan yang dibangun oleh Tuan Kersch berhasil diselesaikan dan bisa digunakan. Untuk mengumumkan ke publik Tuan Kersch mengundang Jurnalis *De Locomotief* untuk melihat langsung jembatan itu. Jurnalis itu menilai bahwa seharusnya pemerintah Kesultanan memberi perhatian tentang kebutuhan jembatan itu. Jembatan yang telah dibuat oleh Tuan Kersch ini sebenarnya belum memenuhi standar yang baik untuk keselamatan. Ia menyarankan agar Kesultanan harus segera mengambil alih, meskipun secara fisik jembatan itu tidak memenuhi persyaratan yang dikenakan pemerintah kesultanan. namun rupanya masih bisa dioperasikan. Akan lebih baik jika jembatan yang saat itu terbentang sepanjang 52 meter dari tepi kiri (berongga) hingga dataran lumpur kering, diperluas hingga menutupi seluruh lebar sungai, yaitu 240 meter. Metode murahan ala Tuan Kersch itu konon menghabiskan 10 ribu gulden yang seharusnya 50 ribu gulden. Seharusnya jembatan itu harus dengan tiang pancang (diperkirakan sekitar satu ton). Jika semua ini terlalu mahal sebagai biaya sekaligus, layanan feri regional, yang dirancang dengan baik seperti feri Belanda yang masih ada, dapat memenuhi kebutuhan penghubung, namun gratis, baik bagi orang yang lewat dengan berjalan kaki atau dengan mobil dan untuk semua orang. pembayar pajak jalan lainnya (*De Lokomotief*, 22-06-1926, "Stichting van de tolbedrijf" (Yayasan Perusahaan Tol).

Sementara itu *Indische Courant* memberikan alasan pokok yang lebih detail mengapa hingga saat itu belum

dibangun jembatan penghubung ke Parangtritis. Memang sejauh itu Kali Opak yang lebarnya 240 meter di sini belum pernah ada jembatannya. Seorang individu mengoperasikan penyeberangan dan jembatan tambahan kecil di bagian timur sungai. Bahkan mobil pun bisa diangkut menyeberangi sungai menggunakan kapal feri beralas datar yang terbuat dari besi lembaran. Dalam kondisi tertentu, perseorangan telah diberikan izin untuk mengoperasikan jembatan penyeberangan dan jembatan bantu. Ia juga diperbolehkan mengenakan biaya untuk penggunaan kapal feri, sesuai tarif tetap. Agar dapat menilai apakah jembatan besi yang melintasi Kali Opak di Krètèk mempunyai alasan yang cukup untuk keberadaannya, penghitungan lalu lintas dilakukan di sana selama tiga kuartal pertama tahun 1927, yang menunjukkan bahwa rata-rata hanya terdapat 8 mobil per kendaraan per sehari, 30 kali bersepeda, dan 5 kali gerobak yang lewat. Dalam 9 bulan tersebut, yang diangkut melintasi sungai hanya 59 bus, 10 gerbong barang, 160 sepeda motor, dan 172 gerbong. Jadi belum rata-rata 1 per hari untuk setiap jenis alat transportasi yang terakhir. Dari lalu lintas Krètèk hingga Parangtritis tempat ini banyak dikunjungi wisatawan atau orang lain yang suka jalan-jalan ke pantai selatan sudah bisa, dengan demikian hal itu tidak signifikan.

Jembatan besi di atas Kali-Opak dekat Krètèk harus berupa jembatan tiang pancang dengan lebar minimal 4,50 meter antar pagar dan dengan kuk dengan jarak saling 10 meter; biaya pembangunan jembatan semacam itu diperkirakan sekitar seratus ribu gulden. Apakah pengeluaran yang besar ini akan sebanding dengan manfaat pekerjaan

tersebut di Krètèk dan Parangtritis, yang keduanya tidak memiliki daerah pedalaman yang makmur dan untuk saat ini juga tidak memiliki pembangunan penting di masa depan, akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh pemerintah daerah (*Indische Courant*, 17 Januari 1928, "Verbond naar het Zuiderstrand", *De Locomotief*, 17 Januari 1928).

Kritik yang diberikan oleh jurnalis *De Locomotief* bahwa jembatan itu belum memenuhi standar keamanan dan juga standar dari pemerintah kasultanan terbukti. Setelah sepuluh tahun beroperasi, jembatan itu hancur dan hanyut terbawa banjir besar yang terjadi pada akhir Desember 1936. Seperti diberitakan oleh *De Indische Courant* banjir besar telah melanda Yogyakarta dan banyak desa di sekitar aliran Sungai Opak dan Progo terisolir. Banjir itu juga telah memakan banyak korban manusia (*Indische Courant*, 31 Desember 1936).

Banjir yang menghanyutkan jembatan buatan tuan Kersch ini tampaknya memberi hikmah besar, karena masyarakat telah merasakan manfaat bagi jembatan itu. Sehingga dua bulan kemudian masyarakat setempat mengajukan petisi kepada pemerintah Kesultanan agar segera memperbaiki jembatan, jika tidak agar memberi subsidi kepada tuan Kersch untuk membangun kembali jembatan itu. Dalam petisinya yang dimuat pada berbagai media surat kabar itu disebutkan bahwa jembatan di Kretek, satu-satunya penghubung antara Parangtritis dan tepi barat Sungai Opak, hancur total pada bulan 31 Desember. Untuk sementara lalu lintas tetap terjaga dengan adanya perahu namun masih berbahaya, tidak hanya pada musim hujan, tetapi juga berarti menyebabkan kerugian

finansial bagi penduduk, karena para pekerja perahu tidak melakukan pekerjaannya untuk kesenangan semata. Tuan J. Kersch, operator resort tepi laut Parangtritis, yang membangun jembatan tersebut sepuluh tahun sebelumnya menetapkan tarif tol bagi penggunaannya, yaitu 2 sen untuk pejalan kaki. Sebagai kompensasi kepada penduduk, penduduk Parang Tritis dibebaskan dari biaya tol dan menurut perhitungan baru-baru ini, hal ini telah menghemat sejumlah 7.200 gulden, bagi penduduk dalam sepuluh tahun. Hal ini disebutkan dalam petisi kepada gubernur yang mendesak restorasi jembatan, sebagai bukti ketertarikan masyarakat terhadap hubungan permanen antara kedua bank Opak tersebut.

Petisi tersebut meminta pembangunan jembatan permanen atas biaya Pemerintah Kesultanan. Kemungkinannya kecil, karena jembatan tersebut akan menjadi karya seni yang sangat mahal karena panjangnya, yang biayanya tidak melebihi kepentingan regional. Tampaknya para pembuat petisi telah memperkirakan hal ini, karena jika Pemerintahan Kesultanan tidak melanjutkan pembangunan, mereka meminta agar subsidi diberikan kepada Tuan Kersch, yang kemudian akan memperbaiki sendiri jembatan tersebut sambil tetap mempertahankan biaya tol. Penduduk bersedia bekerja sama dan mengusulkan untuk menyediakan bahan dan tenaga kerja secara gratis (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 12 Februari 1937).

Namun petisi ini masih belum mendapat respons yang diharapkan. Pemerintah Kesultanan tidak akan memberikan subsidi ini karena kerusakan jembatan itu akibat kelalaian dari si

Pembangun jembatan itu yang tidak memenuhi standard pemerintah. Oleh karena itu Tuan Kersch sendiri harus bertanggung jawab terhadapnya. Pembangunan jembatan itu kembali juga belum dipertimbangkan mengingat pembangunannya memerlukan biaya yang besar, sedangkan kemanfaatan ekonominya sedikit. Oleh karena itu penduduk Parangtritis harus puas dengan menggunakan kano. (*“De Brug naar de Parangtritis” De Locomotief*, Selasa, 9 Maret 1937).

Masalah ini tidak berhenti di sini karena kemudian hal ini juga mengundang perhatian pemerintah kolonial Belanda sehingga pembicaraan-pembicaraan dengan pemerintah Kesultanan mulai dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Akhirnya kabar baik itu muncul pada bulan Juni 1939, *De Locomotief* memberitakan tentang rencana pemerintah Kesultanan membangun jembatan penghubung ke Pantai Selatan. *De Locomotief* memberitakan bahwa akan dibangun jembatan di atas Opak di Kretek yang menghubungkan Yogyakarta dan Parangtritis. Dalam anggaran Kesultanan, sejumlah 75.000 telah dialokasikan untuk jembatan ini, untuk anggarkan selama tiga tahun. Akan tetapi jumlah tersebut berdasarkan perkiraan dari konferensi administratif dan tidak memiliki dasar ahli. Pengeluaran sebenarnya menurut surat kabar ini tidak akan melebihi 40.000 gulden terutama jika merujuk pada jumlah yang menggunakan material jembatan tua di Prambanan dan jembatan di Gawoelan. Jumlah tersebut tentunya lebih sesuai dengan signifikansi ekonomi Parangtritis. Jembatan itu mungkin akan selesai akhir tahun 1939 (*De Lokomotief*, 01-06-1939, “De brug bij kretek”).

DAFTAR PUSTAKA

- De Locomotief*, 17 januari 1928
- De Locomotief*, Selasa, 9 Maret 1937, "De Brug naar de Parangtritis"
- De Lokomotief*, 01-06-1939, "De brug bij kretek".
- De Lokomotief*, 22-06-1926, "Stichting van de tolbedrijf"
- Groeneman, I, *Reisgids Jogjakarta en omstreken*, Semarang Drukkerij en Boekhandel, 1909, hlm. 125.
- Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indie*, 12 Februari 1937.
- Indische Courant*, 31 December 1926
- Indische Courant*, 17 Januari 1928, "Verbond naar het Zuiderstrand",
Jaarlijkse plechtigheid van het begraven van de baard en de nagels van de sultan en het offeren aan Kangdjeng Ratoe Kidoel bij Parangtritis ten zuiden van Bantoel, 1935. KITLV Leiden.
- Ridderhof, W. H., "Dua Dewi Pantai Selatan", *Nieuwe Apeldoornsche Courant*, Zaterdag, 26 Maart 1932, 29e Jaargang No. 10247
- Ridderhof, W. H., "Indische Schetsen", *Nieuwe Apeldoornsche Courant*, Dinsdag, 5 April 1932, 29e Jaargang No. 10254.
- Warnaar, A.H., "Naar de Zuiderstrand" (Ke Pantai Selatan) dalam *Nederlandsch Leesboek ten dienste van de 2de klasse der vakscholen van het inlandsche onderwijs*, (Batavia: Landsdrukkerij, 1909).

PROFIL PENULIS



Sri Margana, M.Hum., M.Phil., Ph.D

Lahir di Klaten, 15 Oktober 1969.

Pendidikan:

- S-1 di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra UGM tahun 1995
- S-2 di Program Pascasarjana UGM dan *Advanced Master* di Universiteit Leiden (2001-2002)
- S-3 di Program Ph.D *Institute for the History of European Expansion* (IGEER), Universiteit Leiden (2003)

SEJARAH DAN PEMAKNAAN SUMBU FILOSOFI PADA MASA KINI

Oleh:

Muhammad Iqbal Birsyada

Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas PGRI Yogyakarta

Email: iqbal@upy.ac.id

Dasar Filosofis dan Teoritis

Untuk memberikan pemaknaan terhadap Sumbu Filosofi dalam konteks kekinian sebetulnya membutuhkan data yang kaya dan mumpuni serta piranti filosofis dan teoritik yang kuat dari berbagai perspektif bidang ilmu yang tentunya diimbangi dengan perenungan yang mendalam. Selain perlu menarik nafas dalam-dalam sembari duduk *khusyuk* merenung dan berkontemplasi sejenak, kita harus mengosongkan dan membuang seluruh pikiran, pandangan, serta asumsi-asumsi dan kemudian kita masukkan apa yang dinamakan dengan keranjang *bricket*. Pemahaman seperti ini dibutuhkan agar kita dapat memandang objektif pada setiap objek yang sedang kita jajaki atau dalam. Sadar atau tidak, seseorang atau individu atau bahkan kita sendiri sering terjebak dalam pandangan pertama (*the first look*) dalam memahami atau menyimpulkan sebuah realitas sehingga kita terburu-buru berpendapat bahwa apa yang kita lihat itu sebagai sebuah realitas yang sejati atau sesungguhnya yang nyata. Padahal realitas sejati biasanya tersembunyi dan untuk membukanya harus didekati secara intensional melalui apa yang disebut dengan “pengamatan mendalam”. Dengan membuang jauh-jauh pikiran dan asumsi-asumsi, maka kita akan dapat mendekati dan menyentuh alam objektif masyarakat yang dalam hal ini kemudian

dinamakan dengan pandangan kedua (*the second look*). Dalam pandangan Fenomenologi Edmund Husserl suatu objek haruslah menampakkan dirinya sendiri tanpa intervensi apa pun dan siapa pun (Poedjawijatna, 1974). Oleh karena itu, jalan yang harus ditempuh untuk mendekati realitas yang sejati adalah dengan apa yang dinamakan Husserl dengan “Zuruck zu den sachen selbst” yakni kembali dengan benda-benda itu sendiri secara apa adanya.

Secara historis, wilayah Yogyakarta sebelum masa Kemerdekaan sebagai “Zelfbestuur landschappen” atau sebagai daerah Swapraja, Kasultanan Yogyakarta yang didirikan oleh Pangeran Mangkubumi setelah perjanjian Giyanti 13 Februari 1755. Pangeran Mangkubumi memiliki nama kecil Raden Mas Sujana lahir pada tanggal 5 Agustus 1717 dari ayah Amangkurat IV dan Ibu Mas Ayu Tejawati. Dengan naik takhtanya Pangeran Mangkubumi dan menjadi Sultan Hamengku Buwana I, maka ini menjadi titik balik awal lahirnya pemerintahan baru sebagai lanjutan atau penerus dari keberlangsungan dinasti Mataram. Selain itu, dengan telah berdirinya Kasultanan Yogyakarta yang membawa perangkat identitas budaya Jawa yang sampai sekarang mampu bertahan dan menjadi salah satu jantung dari kebudayaan Indonesia saat ini (Uddin & Nurhajarini, 2018). Padahal pada awal

abad ke-19 hingga 20 sistem sosial dan budaya penduduk Jawa pada waktu itu mengalami perubahan yang drastis dan signifikan akibat beberapa kebijakan pemerintah kolonial Belanda seperti Tanam Paksa dan Politik Etis. Oleh sebab itu, praktik akulturasi budaya Jawa dan Barat tidak terelakkan lagi. Praktik ini kemudian dinamai dengan modernisasi atau westernisasi (Wasino, 2014). Walaupun dalam praktiknya ada kelompok yang kompromi, ada yang menolak perubahan, dan ada pula yang mengambil jalan inovasi.

Berdirinya Kasultanan Yogyakarta sebagai penerus dinasti Mataram di kemudian hari membentuk sebuah konstruksi budaya Jawa Islam. Budaya Jawa dalam hal ini mengambil unsur dan nilai dari tradisi lama Jawa pra-Islam kemudian berakulturasi dengan nilai tradisi dan budaya Islam. Hal ini dapat dilihat dalam kesusastraan lama Jawa seperti *Serat*, *Suluk* dan *Babad* yang mencerminkan apa yang disebut “mixed culture” menggambarkan pola berpikir Jawa-Islam. Salah satu dari itu adalah karya sastra seperti *Babad Keraton* atau *Babad Tanah Jawi* yang ditulis pada abad ke-18 yang isinya lebih mencerminkan konstruksi berpikir Jawa-Islam dengan menggambarkan narasi kisah siklus kehidupan tokoh, raja, keluarga, dan kerabatnya dari tahapan siklus “Imanen esensial” atau mulai dari tahapan “iman” menuju “transenden esensial” yakni *Manunggaling Kawula Gusti* (Maharsi Resi, 2010). Sama halnya dengan karya sastra *Serat Wedhatama* karya KGPA. Mangkunegara IV isinya juga sangat kental mencerminkan cara berpikir Jawa-Islam *Manunggaling Kawula Gusti* yang dapat dilihat melalui ajaran “Catur Sembah” (M. I. Birsyada, 2020). Begitu juga dengan

Serat Wulang Reh karya Sunan Pakubuwana IV, *Serat Wirid Hidayat Jati* karya Ronggowarsito dan *Babad Jaka Tingkir* karya Pakubuwana VI yang mencerminkan dan menggambarkan hal yang sama. Pemikiran-pemikiran semacam ini apabila kita tarik ke belakang dalam kerangka berpikir tradisi esoterik Islam masuk dalam katagori kodifikasi corak berpikir sufisme Jawa-mistik (Simuh, 2016). Padahal pada fase awal perkembangan Islam di Jawa era Kerajaan Islam Demak terjadi perseteruan pemikiran yang amat mencolok antara pemahaman keagamaan yang dibawa oleh Walisongo dengan Syekh Siti Jenar yang konon membawa tradisi mistik-Islam *wihdatul wujud* atau dalam Jawa *Manunggaling Kawula Gusti* (Birsyada, 2016). Akan tetapi semenjak poros kekuasaan Kerajaan Islam bergeser ke selatan (pedalaman) di Pajang dan Mataram, justru nilai-nilai tradisi Islam-Jawa yang bersintesa dengan mistik menunjukkan kondisi semakin menguat.

Membaca Sumbu Filosofi Melalui Pandangan Kedua

Dalam perspektif fenomenologi, masyarakat adalah hasil konstruksi sosial. Tujuan utama fenomenologi sosial adalah untuk mengungkap interaksi di antara proses tindakan-tindakan manusia, struktur situasional, dan konstruksi sosial. Melalui pemahaman ini dapat disimpulkan bahwa realitas yang sejati berada di dalam diri manusia yaitu dunia subjektif manusia. Suatu konsep teori sudah harusnya tidak berbicara tentang apa yang berada di luar kesadaran manusia, tetapi tentang bagaimana dan dengan jalan apa dimensi subjektif aktor diciptakan, dipelihara, dan diubah (*pure consciousness*). Pemahaman ini kemudian

dimaknai sebagai pembacaan dengan pandangan ke dua (*the second look*) sehingga pengetahuan didapatkan melalui pengamatan dan pengalaman hingga ke akar-akarnya (Maliki, 2012). Singkatnya, dunia yang kita diami diciptakan oleh suatu kesadaran-kesadaran manusia serta dasar-dasarnya. Sedang kesadaran itu ada pada pikiran masing-masing. Dunia eksternal itu ada dan hanya dapat dimengerti melalui kesadaran kita tentang dunia itu (Ia Craib, 1992). Membaca dan mengamati melalui pandangan kedua tersebut tidaklah mudah apalagi objek yang diamati adalah sejarah dan konstruksi budaya masyarakat. Sejarah berkaitan dengan sumber-sumber literatur, arsip, dan artefak yang autentik sedangkan budaya berkaitan dengan hasil cipta dan karsa manusia yang terus berkembang dari masa lalu, kini, dan yang akan datang. Oleh karenanya dengan perspektif yang demikian kita akan terhindar dari pemahaman dan pembacaan yang “otak-atik gatuk”. Walaupun demikian tulisan dalam artikel ini dirasa masih jauh dari sempurna untuk mengulas Sumbu Filosofi melalui pandangan kedua secara tuntas karena keterbatasan ruang dan waktu.

Telah disampaikan di awal oleh penulis bahwa sejak pemerintahan Kerajaan Islam di Jawa bergeser ke wilayah selatan (Pajang dan Mataram) konsep berpikir hubungan antara raja dan rakyat yang mencerminkan hubungan *Kawula-Gusti* semakin menguat. Hubungan tersebut memiliki makna saling akrab, hormat, dan bertanggungjawab. Dalam mistik Jawa terdapat kata “Jumbuhing Kawula Gusti” yang bermakna bersatunya hamba dan tuannya dan juga melukiskan tujuan hidup tertinggi manusia Jawa yaitu tercapainya

“kesatuan” atau manunggal dengan Tuhan. Oleh karena itu dalam konsep hubungan *Kawula-Gusti* menjadi komunikasi sosial yang halus dan rumit karena harus benar-benar menjaga dirinya dan mampu menempatkan dirinya dengan orang lain dan lingkungannya. Pemahaman ini juga dapat dimaknai berkenaan dengan “nasib” seseorang itu telah ditakdirkan oleh Tuhan. Seseorang ditakdirkan menjadi wong cilik (orang biasa), penggede (penguasa), *kawula* (hamba), dan *bendara* (tuan) dalam hal ini hak dan kewajibannya telah ditakdirkan (Moertono, 2018).

Dalam pembacaan konsep orang Jawa, seorang raja atau ratu merupakan eksponen mikrokosmos pada suatu negara. Oleh karena itu, alam dalam konsep berpikir orang Jawa terdiri dari dua yakni alam dimensi manusia atau mikrokosmos dan alam supra manusia atau makrokosmos dan konstruksi berpikir ini telah lama diwariskan secara turun-menurun dalam pemikiran orang Jawa. Dengan konsep yang demikian, maka raja adalah sebagai pusat mikrokosmos sekaligus puncak dalam hierarki status dalam negara (Moertono, 2018). Pada konteks ini, kosmologi merupakan suatu pandangan, gagasan replika alam semesta seperti gunung dan laut, lingga dan yoni merupakan salah satu bagian dari kosmologi yang telah dimiliki orang Jawa. Dalam tradisi Hindu lama misalnya, kerajaan-kerajaan sering menghadap kepada gunung. Begitu juga dengan posisi kraton yang menghadap gunung Merapi. Tugu Pal (lingga), dan panggung krapyak (yoni). Dari Tugu Pal sampai Kraton dimaknai sebagai jalan kasampurnaan menuju pencipta (Gusti). Konsep “Sangkan Paraning Dumadi” juga telah termanifestasikan dalam arsitektur,

bangunan-bangunan kraton, dan sekitarnya beserta vegetasinya (Ajar Permono, 2021).



Gambar 3.1 Ilustrasi Sumbu Filosofi Yogyakarta
Sumber: Tim Redaksi

Konsep tatanan kraton beserta arsitekturnya yang demikian kompleks salah satunya karena keahlian Pangeran Mangkubumi sejak semasa mudanya memiliki kepiawaian dalam bidang arsitektur Jawa. Dr. F. Pigeud pernah menulis di majalah *Jawa* 1940 yang memberi julukan Pangeran Mangkubumi sebagai “de Bowmeesker van Zijn Broer Sunan PB II” yang maknanya adalah arsitek dari Sang Kakanda Sunan Pakubuwana II. Setelah satu bulan Perjanjian Giyanti bertepatan pada tanggal 13 Maret 1755 M, Sultan Hamengku Buwana I kemudian memproklamirkan berdirinya Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nama tersebut mirip dengan Ayodya (Ngayodya dalam Bahasa Jawa Baru) nama sebuah ibukota dalam cerita Ramayana. Sedangkan *karta* memiliki arti makmur; sedangkan *adi* berarti indah, *ning* berarti dari atau di dan *rat* bermakna dunia. Dengan demikian bermakna *Ayodya* yang makmur, keindahan dunia (M.C.Ricklefs, 2002).

Secara filosofis, posisi kraton sebagai pusat kekuasaan Jawa harus menunjukkan hubungan keseimbangan antara hamba-kawula, manusia dan Tuhan,

manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam sekitarnya. Dalam konteks tradisi Kasultanan Mataram, selain konsep *Manunggaling Kawula Gusti* keberadaan kraton Yogyakarta juga mencerminkan aspek berpikir Jawa yang kemudian dinamakan dengan filosofi “Sangkan Paraning Dumadi” yang bermakna asal muasal kehidupan manusia dari mana dan akan hendak ke mana. Sedangkan Tugu *Golong-Gilig* yang pada awalnya tingginya mencapai 25 meter memiliki makna filosofi persatuan antara rakyat dan rajanya. Begitu juga dengan *Panggung Krapyak*, *Laut Selatan* dan *Merapi* yang secara filosofi mencerminkan rangkaian dimensi perjalanan hidup manusia sekaligus menggambarkan konsep berpikir *Sangkan Paraning Dumadi* dan *Manunggaling Kawula Gusti* yang dapat dimaknai secara sosiologis. Pangeran Mangkubumi membangun tatanan kraton Yogyakarta berdasarkan berbagai pertimbangan seperti aspek geografis, sosial, budaya, politik, pertahanan, dan tentunya filosofis. Hal-hal yang telah tersebut di atas betul-betul menjadi bahan pertimbangan untuk mewadahi seluruh aktivitas masyarakat Mataram sebagai negara yang baru berdiri (Uddin & Nurhajarini, 2018).



Gambar 3.2 Panggung Krapyak
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Oleh karena itu, dalam konteks kekinian bangunan-bangunan yang berada di kawasan kraton dan terhubung dengan Sumbu Filosofi seyogyanya terus dikontrol dan diatur dalam suatu aturan pemerintah daerah yang ketat agar senantiasa bersinergi dengan konsep dan cita-cita budaya Yogyakarta (Cahyani et al., 2022). Dengan demikian, kawasan-kawasan yang dilalui oleh Sumbu Filosofi akan senantiasa memiliki karakter dan keunikan tersendiri yang mencerminkan budaya dan identitas kota. Upaya-upaya pelestarian dan kontrol perlu terus diperkuat terlebih setelah Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pendidikan, Ilmu dan Kebudayaan (UNESCO) telah menetapkan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai salah satu warisan dunia dari Indonesia pada Sidang ke-45 Komite Warisan Dunia atau World Heritage Committee (WHC) di Riyadh, Arab Saudi pada tanggal 18 September 2023. Amanah ini harus benar-benar dijaga dan dikembangkan tentunya dengan konsep "From Within" yaitu dari dalam yang diinginkan oleh warganya dan bukan berkembang "From Outside".

Memaknai Sumbu Filosofi pada Masa Kini

Penulis belum lama ini pernah satu meja dengan teman yang juga sebagai pembicara dalam rangkaian diskusi berkenaan dengan tema Sumbu Filosofi yang diselenggarakan oleh Balai Sumbu Filosofi. Ada hal yang cukup menggelitik yang ia sampaikan di awal pembicaraan. Ia mengatakan bahwa Indonesia saat ini bisa menjadi satu-satunya negara *Super Power* dalam hal kebudayaan di tingkat dunia. Hal ini karena posisi dan kondisi Indonesia secara kuantitas dianggap amat multikultural

baik dihitung dari jumlah suku, bahasa, pulau, agama, dan jumlah penduduknya, Indonesia bisa bertengger di nomor satu dunia. Kondisi tersebut jika tidak dirawat dan dijaga dengan baik akan rentan dengan berbagai konflik horizontal. Budaya menjadi salah satu benteng utama dalam membangun kerukunan, persatuan, dan kesatuan serta sebagai alat penyaring dari berbagai budaya asing yang masuk ke negeri ini. Sebagai kota yang memiliki Sumbu Filosofi tentunya harus lebih memiliki karakter nilai budaya yang "njawani" yang mencerminkan sebagai karakter Jawa Yogyakarta. Contoh karakter tersebut seperti memiliki gaya hidup yang asketik, laku prihatin, tirakat, hidup bersahaja "sak madyo", rajin beribadah, berpuasa, "mesu budi" serta sambil merenungkan hal-hal yang memiliki sifat rohaniah (Pudjo Suharso, 2020). Sikap lainnya yang bisa ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari seperti "oyo seneng pamer" (tidak suka menonjolkan hal yang berlebihan), "seneng tetulungan" (suka menolong), "noto roso" (toleran), "guyub" (rasa kebersamaan), "andhap asor" (sikap rendah hati), "legawa" (ikhlas), "wani ngalah" (berani mengalah), "oyo dume" (jangan sombong), serta laku prihatin.

Memaknai Sumbu Filosofi dapat dilakukan dalam dua cara, yakni secara fisik dan non-fisik. Akan tetapi kali ini akan penulis awali dengan yang non-fisik terlebih dahulu. Pertama, adalah pemaknaan dapat dilakukan melalui proses merekonstruksi budaya dalam konteks budaya Jawa-Yogyakarta. Caranya adalah dengan secara berkesinambungan melakukan dialog, diskusi akademik lintas disiplin ilmu untuk menggali kembali tata nilai budaya Jawa Yogyakarta sebagai "konstruksi" bersama untuk dipraktikkan

dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari sebagai warga Yogyakarta. Misalnya nilai-nilai filosofi yang terdapat dalam tata ruang dan Sumbu Filosofi perlu terus dikaji, diteliti, dan didiskusikan secara terus menerus dalam berbagai perspektif. Contohnya seperti nilai-nilai filosofi *Sangkan Paraning Dumadi, Manunggaling Kawula-Gusti, Memayu Hayuning Bawana* beserta nilai-nilai lainnya yang terdapat dalam budaya Jawa-Yogyakarta sampai menjadi keputusan dan kesepakatan bersama. Di Tingkat Perguruan Tinggi mulai ada program Pendidikan Khas Jogja namun implementasinya seperti apa serta kontrolnya seperti apa masih perlu terus dikaji dan dikembangkan. Persoalan ini menurut hemat penulis menjadi kebutuhan mendesak karena pada saat ini permasalahan sosial-budaya di Yogyakarta kian hari semakin kompleks. Benturan-benturan sosial-budaya yang ada jika tidak segera diberikan solusi yang pas, cepat, dan tepat akan menjadi bom waktu yang suatu saat bisa meledak sewaktu-waktu yang tentunya akan merugikan citra masyarakat Yogyakarta yang berhati santun damai.

Akhir-akhir ini berita di media massa berkenaan dengan konflik antar etnis di Yogyakarta cukup meningkat, yang salah satu faktor pemicunya adalah kesenjangan sosial, ekonomi, dan politik antara etnis pendatang dengan etnis pendatang lainnya. Melihat hal ini, penguatan tata nilai budaya Sumbu Filosofi sudah saatnya dapat menjadi pilar utama menjadi titik balik untuk ikut andil dalam pemecahan masalah sosial tersebut, tentunya dengan pendekatan kemanusiaan dan kemajemukan dalam kerangka Keistimewaan Yogyakarta. Pemerintah, masyarakat, dan perguruan tinggi harus “manunggal” bersatu padu

bekerja sama dalam memutus anggapan-anggapan stereotip terhadap perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dari berbagai daerah (Muhammad Rouf Mustofa & Rodiah, 2024). Belum lagi persoalan-persoalan perbedaan persepsi dalam hal praktik budaya dan keagamaan dalam lapisan bawah masyarakat sering menjadi konflik horizontal (Baihaqi & Birsyada, 2022).

Solusi yang kedua adalah melakukan apa yang dinamakan dengan Re-Intepretasi dan Re-Enkulturasasi Budaya Jawa-Yogyakarta dengan perkembangan zaman masa kini. Upaya mengemas tata nilai budaya Kejojgaan dan nilai-nilai dalam Sumbu Filosofis ke dalam konteks masa kini merupakan tantangan yang berat apalagi agar dapat sinergi dengan pemikiran dan pemahaman kondisi zaman sekarang di kalangan remaja usia sekolah. Dengan demikian, tata nilai budaya Jawa-Yogyakarta dan Sumbu Filosofi beserta simbol-simbol yang ada di dalamnya yang sudah diinventarisasi dan ditetapkan tadi tidak dikatakan “kuno” atau sudah “ketinggalan zaman” dan sebagainya. Sedangkan untuk proses internalisasi dan enkulturasasi dibutuhkan sinergisitas antara pemerintah dengan pihak sekolah untuk dapat memasukkan tata nilai tersebut ke dalam kurikulum atau muatan lokal sekolah atau dapat disisipkan ke dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah sehingga dapat dipraktikkan melalui pembiasaan. Sebab realitas sosial, budaya remaja usia sekolah di Yogyakarta pada saat ini juga sedang dalam kondisi darurat. Persoalan *klithih*, kekerasan jalanan, dan tawuran antar remaja sekolah sampai saat ini masih sering kita dengar dan tampaknya belum ada penanganan yang lebih komprehensif dari berbagai pihak (M. I. Birsyada et al., 2021).

Selanjutnya, dalam pemaknaan terhadap perspektif fisik, terdapat juga beberapa hal yang perlu diperhatikan. Kawasan Sumbu Filosofi perlu menjadi *landmark* Kota Yogyakarta (Sadana et al., 2024). Akan tetapi fakta di lapangan sepanjang jalur Panggung Krapyak sampai Alun-Alun Selatan mengalami penurunan identitas tata kota dan karakternya karena pembangunan yang kurang terkontrol sehingga mempengaruhi persepsi karakter dan identitas kota (Prasista Arsa Wisista, Hanif Budiman, 2023). Sebuah identitas kota telah terbentuk sejak lama melalui proses sejarah panjang yang kemudian menjadi persepsi dan pemahaman publik dalam memandang citra kota tersebut. Dengan cara penguatan identitas fisik dalam penataan ruang di Kawasan Sumbu Filosofi tersebut, maka dapat berpotensi menjadi salah satu solusi dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Pembangunan tata Kota

Yogyakarta yang sejak awal telah digagas oleh Sultan Hamengku Buwana I nyata-nyata banyak mengandung nilai filosofi yang tinggi adalah menjadi sebuah simbol keteraturan, kerukunan, harmonis hubungan sesama manusia, manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan alam. Singkatnya, pengelolaan Sumbu Kawasan Filosofi yang terkontrol dapat memperkuat citra Kota Yogyakarta yang memiliki nilai budaya yang tinggi. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk menampung berbagai aspirasi dari bawah khususnya dalam memperkuat Kawasan Sumbu Filosofi (Fadlilyah & Setiawan, 2023). Dengan cara demikian harapannya masyarakat dapat menerima dan ikut merasa memiliki Kawasan Sumbu Filosofi sehingga dapat aktif dan berpartisipasi dalam pelestarian dan pengembangan kota.

DAFTAR PUSTAKA

- Ajar Permono. (2021). Sumbu Filosofi Yogyakarta : Dalam. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 7(1), 163–208.
- Baihaqi, M. K., & Birsyada, M. I. (2022). Agama dan ritual: Dinamika konflik Dusun Mangir Lor Sendangsari Pajangan. *Satwika : Kajian Ilmu Budaya Dan Perubahan Sosial*, 6(2), 299–310. <https://doi.org/10.22219/satwika.v6i2.21657>
- Birsyada, M. I. (2020). Sufism Ethics in Javanese Aristocracy: A Historical Perspective. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 11(10).
- Birsyada, M. I., Kintoko, K., & Mehta, K. (2021). Motorbike gang network in Yogyakarta: Socio-cultural studies between the relation of moral and religion habituation of local teenagers. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 8(1), 34–44. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v8i1.39894>
- Birsyada, M., & Iqbal. (2016). *Islamsiasi Di Jawa Konflik Kekuasaan Di Demak*. Yogyakarta: Calpulis.
- Cahyani, S. D., Sukandar, P. A., Junianto, & Jati, R. M. B. (2022). Masa Depan Pada Pra-Perancangan Mozaik Jogja. *Jurnal Arsitektur*, 23(2), 111–119.
- Fadlilyah, L., & Setiawan, B. (2023). Partisipasi Masyarakat Sebagai Perangkat Historic Urban Landscape Dalam Pengelolaan Kawasan Sumbu Filosofi Di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan*, 03(03), 187–198.
- la Craib. (1992). *Teori-Teori Sosial Modern: dari Parsons sampai Habermas*. Rajawali.

- M.C.Ricklefs. (2002). *Yogyakarta Dibawah Sultan Mangkubumi 1749 -1792*. Mata Bangsa.
- Maharsi Resi. (2010). *Islam Melayu VS Jawa Islam*. Pustaka Pelajar.
- Maliki, Z. (2012). *Rekonstruksi Teori Sosial Modern*. Gadjah Mada University Press.
- Moertono, S. (2018). *Negara Dan kekuasaan Di Jawa Abad XVI-XIX*. Kepustakaan Populer Gramedia.
- Muhammad Rouf Mustofa, & Rodiah, I. (2024). Konflik Identitas dan Budaya Antar Suku di Yogyakarta, Heterogenisasi Vs Homogenisasi. *JURNAL SOSIAL Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 25(1), 19–24. <https://doi.org/10.33319/sos.v25i1.148>
- Poedjawijatna. (1974). *Pembimbing Ke Arah Alam Filsafat*. P.T Pembangunan.
- Prasista Arsa Wisista, Hanif Budiman, dan M. J. D. H. (2023). Elemen Path Pembentuk Citra Kota Pada Jalur Panggung. *Seminar Karya & Pameran Arsitektur Indonesia 2023 Place Making Untuk Mewujudkan Komunitas Yang Lebih Berdaya*, 6(1), 343–354.
- Pudjo Suharso. (2020). *PRIYAYI Meniti di Atas Buih Persimpangan Budaya*. LaksBang PRESSindo.
- Sadana, A. S., Prasetya, L. E., & Dharmaraty, A. P. (2024). Citra Visual Tugu Pal Putih Sebagai Landmark Kota Yogyakarta Visual Image of Tugu Pal Putih as a Landmark of Yogyakarta City. *LATAR, Jurnal Arsitektur Univesitas Nusa Nipa Indonesia*, 2(1), 63–71.
- Simuh. (2016). *Sufisme Jawa Transformasi Tasawuf Islam Ke Mistik Jawa*. Narasi.
- Uddin, B., & Nurhajarini, R. (2018). Mangkubumi Sang Arsitek Kota Yogyakarta. *Patrawidya*, 19(1), 75–92.
- Wasino, W. (2014). *Modernisasi di Jantung Budaya Jawa Mangkunegaran 1896-1944*. Kompas.

PROFIL PENULIS



Muhammad Iqbal Birsyada

Lahir di Batang, 10 Februari 1988.

Pendidikan:

- S-1 Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas Negeri Semarang, 2009.
- S-2 Program Studi Pendidikan IPS, Universitas Negeri Semarang (UNNES), 2012
- S-3 Program Studi Pendidikan IPS, UNNES (2018)

TINGGALAN TULIS SEBAGAI SUMBER BELAJAR SEJARAH

Oleh:

Goenawan A. Sambodo

Anggota Komunitas Kandang Kebo

Email: sekarpundak@yahoo.co.uk

Pendahuluan

Bantul mencatat bahwa banyak benda baik yang sudah ditetapkan sebagai Bangunan/Benda Cagar Budaya secara resmi maupun yang masih dalam status Objek Diduga Cagar Budaya. Benda/bangunan ini baik yang sudah tidak berada di tempat awal ditemukan (terutama benda) maupun bangunan, memberi banyak keterangan yang menjadi bukti perkembangan Bantul itu sendiri. Bangunan/benda cagar budaya bersejarah tersebut, sekarang merupakan bagian dari cagar budaya yang mencerminkan dinamika masyarakat Bantul.

Setiap episode sejarah memberikan dampaknya pada masyarakat, dan setiap peristiwa sejarah tidak hanya memberikan pengaruh, tetapi juga menyimpan nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk tindakan dan pola pikir masyarakat. Sejarah tidak hanya menciptakan perkembangan yang merambah aspek-aspek seperti pola pikir, kehidupan sosial, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan, tetapi juga dapat bermanifestasi dalam bentuk fisik seperti artefak dan struktur bangunan yang bertahan tanpa batas waktu. Peninggalan sejarah berupa cagar budaya bermanfaat sebagai pembangkit motivasi, kreativitas dan mengilhami generasi muda untuk memahami sejarah dan identitas suatu daerah. Peninggalan sejarah dan

benda cagar budaya ini menjadi bukti sejarah yang mewarnai wajah daerah ini. Benda cagar budaya yang lestari, secara ideal akan memberi peluang pemanfaatan peninggalan arkeologi, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitarnya tanpa menimbulkan dampak negatif. Dalam hal ini, kesejahteraan yang dimaksud adalah kesejahteraan lahir batin serta terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya, demikian juga lingkungan hidup masyarakat setempat. Pemanfaatannya juga dapat dijadikan objek pembelajaran para peserta didik untuk mengetahui peninggalan-peninggalan bersejarah pada masa lalu.

Pembelajaran sejarah di sekolah (terutama menengah pertama maupun atas) selain bertujuan untuk mengembangkan keilmuan, juga mempunyai fungsi didaktis. Artinya pengajaran sejarah adalah agar generasi muda berikutnya dapat mengambil hikmah dan pelajaran terhadap karya-karya dari nenek moyangnya sebagai suatu identitas suatu daerah. (Kartodirdjo, 1982)

Ketika manusia mengenal tulisan, pada dasarnya mereka sudah tumbuh kesadaran untuk menulis tentang jati dirinya sebagai manusia dalam keluarga dan hidup berbangsa bernegara. Fakta-fakta sejarah adalah bagaikan kepingan-kepingan suatu botol yang pecah. Pecahan-pecahan itu berserakan dimana-

mana. Oleh sejarawan kepingan-kepingan (fakta) itu dikumpulkan satu persatu kemudian disusun kembali menjadi bentuk aslinya. Sejarah bukanlah merupakan karya yang sudah dianggap selesai. Sejarah selalu berproses dalam kehidupan suatu masyarakat atau bangsa. Sejarah senantiasa ditulis oleh generasi ke generasi dalam bentuk yang berbeda (Kuntowijoyo, 1994).

Permasalahan yang muncul adalah bagaimana posisi prasasti sebagai data tulisan dapat menjadi sumber pembelajaran sejarah terutama oleh para generasi muda, dalam hal ini anak-anak usia sekolah menengah (pertama dan atas). Tulisan ini akan mencoba untuk menjawab permasalahan tersebut. Lebih jauh lagi tulisan ini juga akan melihat seberapa potensial penggunaan prasasti sebagai sumber sejarah.

Pembahasan

Salah satu bentuk kesadaran masyarakat terhadap masa lalunya adalah melakukan rekaman tertulis suatu hal yang dianggap sebagai peristiwa penting. Oleh karena itu, rekaman tulis tersebut dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam hal ini, Sejarah. Sejarah tidak hanya menghafal angka tahun, nama orang, dan peristiwa. Akan tetapi juga jauh lebih dalam mencoba mengerti apa yang pernah terjadi untuk dapat diambil manfaatnya di kehidupan masa sekarang. Rekaman tulis dapat berupa apa pun yang tertulis baik pada media apa pun sehingga rekaman tulis itu disebut sebagai sumber dokumenter. Contoh sumber dokumenter di antaranya surat kabar; surat-surat; arsip; laporan; catatan pribadi; notulen rapat; naskah; dan prasasti.

Secara lebih khusus tulisan ini hanya akan membahas tentang Prasasti.

Boechari (1977) mendefinisikan prasasti sebagai "sumber-sumber sejarah dari masa lampau yang tertulis di atas batu dan logam". Beberapa ahli lain menambahkannya 'tertulis di media keras' sehingga definisi prasasti menjadi lebih luas.

Prasasti adalah media untuk berkomunikasi, baik itu dari penguasa kepada masyarakat yang dipimpinnya, ataupun dari satu individu kepada individu lain secara lebih luas dan lebih dapat dipertanggungjawabkan isinya daripada sekadar berita lisan.

Dalam pembelajaran sejarah, istilah prasasti sering kali hanya terpaku pada benda-benda dari masa lalu, dalam hal ini masa klasik Indonesia (Hindu Buddha). Padahal banyak sekali tinggalan keterangan dari masa lalu yang digunakan sebagai media komunikasi yang tidak hanya berasal dari masa itu yang semuanya dapat digunakan sebagai sumber dalam belajar sejarah. Beberapa data berikut akan disampaikan sebagai contoh.

Prasasti Logam Tulang Er

Prasasti merupakan sumber sejarah tertulis yang banyak memberikan keterangan mengenai struktur birokrasi, perekonomian, keadaan topografi, pemukiman, dan juga mengenai masalah masyarakat Indonesia Kuno beserta aktivitasnya. Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, ratusan prasasti menggunakan tarikh Saka dan baru empat buah prasasti yang menggunakan tarikh Sanjaya. Keempat prasasti itu adalah Prasasti Taji Gunung, Prasasti Timbanan Wungkal, Prasasti Tihang, dan Prasasti Tulang Er. Prasasti Tulang Er 198 Sanjaya ditemukan di lembah Sungai Winongo Desa Sorok, Kabupaten Bantul,

DIY. Prasasti Tulang Er memuat keterangan tentang pemberian anugerah oleh Raja Daksa kepada para Rama yang mengurus kabikuan di Tulang Er. Alasan pemberiannya karena para Rama telah berjasa menyediakan air pemandian kepada Raja Daksa ketika ia singgah di tempat tersebut.

Prasasti ini dipahatkan pada dua buah lempengan tembaga, yang pada saat diketemukan dalam kondisi yang penuh karat. Lempengan I berukuran 39,3 x 20,5 cm dan ditulis pada kedua sisinya. Sisi depan terdiri dari 14 baris dan sisi belakang memuat 13 baris. Lempengan kedua berukuran 39,2 x 21 cm, dan ditulis pada satu sisi yang memuat 13 baris. Masing-masing lempengan tidak bernomor, tetapi bagian penutup terdapat pada lempeng kedua. Sehingga dapat diduga bahwa prasasti ini merupakan prasasti yang lengkap. Berdasarkan paleografisnya, menunjukkan bahwa bentuk tulisan yang digunakan sama dengan prasasti-prasasti yang berasal dari abad X. Prasasti Tulang Er 198 Sanjaya adalah prasasti keempat yang menggunakan tarikh Sanjaya.

Prasasti ini pada dasarnya tidak mengubah teori maupun rekonstruksi sejarah yang sudah ada. Akan tetapi keberadaan prasasti ini pada kenyataannya dapat melengkapi penulisan sejarah yang sudah ada. Tarikh Sanjaya, tidak lagi hanya sebagai pelengkap tarikh yang pernah digunakan di Indonesia, tetapi juga merupakan bukti bahwa pada masa pemerintahan Balitung-Daksa pernah terjadi konflik di kalangan istana dalam rangka memperebutkan takhta kerajaan.

Dengan kata lain, membicarakan prasasti bertarikh Sanjaya, tidak lagi hanya berkisar pada angka tahunnya saja,

tetapi banyak masalah yang dapat diungkap dari tarikh tersebut. Salah satu masalah yang dapat terungkap dari prasasti-prasasti itu antara lain kondisi dan situasi politik pada masa pemerintahan Balitung (Santosa, 1994).

Prasasti Rumwiga I

Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 merupakan salah satu dari tiga prasasti dengan penamaan Rumwiga yang ditemukan di Dusun Gedongan, Desa Srimulyo, Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul. Prasasti Rumwiga I Nomor Inventaris BG. 637 diterakan pada lempengan tembaga berbentuk segi empat berukuran 32,3 cm x 12,2 cm x 0,2 cm, ditulis dengan aksara dan bahasa Jawa Kuno di kedua sisinya. Sisi depan prasasti (*recto*) terdiri atas 11 baris dan sisi belakang prasasti (*verso*) terdiri dari 13 baris.

Prasasti Rumwiga I ini pernah dibaca oleh Machi Suhadi dalam "Prasasti Rumwiga" yang diterbitkan dalam Berkala Arkeologi 4(1): 37. Tahun 1983. Isi pokoknya adalah tentang adanya permohonan pengurangan pajak yang dimintakan masyarakat Desa Rumwiga kepada Raja Balitung. Berita bukti terkabulnya permohonan tersebut dituliskan dalam bentuk pahatan di atas logam yang akan berlaku hingga akhir zaman.

Prasasti di Masjid Kotagede

Kotagede merupakan bekas ibukota kerajaan Mataram Islam yang menurut *Babad Tanah Jawi* didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan di atas tanah Hutan Mentaok. Masjid Mataram Kotagede merupakan masjid kuno yang dibangun pada abad ke-16. Pembangunannya dimaksudkan sebagai salah satu sarana

pengembangan agama Islam. Keberadaan masjid kuno di tengah perkampungan ini tidak lepas dari keberadaan makam kuno Kotagede yang berada di sebelah barat masjid. Kompleks makam Kotagede merupakan kompleks makam raja-raja Mataram. Kompleks makam dikelilingi oleh beberapa dinding tembok bata berspesi dan memiliki beberapa gapura atau pintu. Pintu masuk ke makam melalui gapura atau pintu masuk yang berada di sebelah tenggara Masjid Makam Kotagede.



Gambar 4.1 SEQ Figure * ARABIC 1
Sumber: BPCB DIY, 2007

Masjid Gede Mataram Kotagede terletak di Dusun Sayangan, Desa Jagalan, Kecamatan Banguntapan, Kabupaten Bantul, Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Masjid ini berada di dekat kompleks makam pendiri Kerajaan Mataram Islam beserta keluarganya dan pemandian Sendang Seliran. Tahun pembangunan masjid ini belum diketahui secara pasti. Meskipun diyakini oleh banyak orang bangunan ini dibangun oleh Senopati, namun ada pula dugaan masjid ini dikembangkan pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613 - 1645 M). Masjid ini dibangun dengan gaya arsitektur tradisional Jawa. Bagian atap masjid memakai model tajug bersusun tiga pada ruang utama dan limasan pada serambi. Bagian kemuncak atap model

tajug dilengkapi mustoko yang terbuat dari tembaga. Beberapa komponen penyusun atap seperti usuk dan reng disusun ngruji payung dengan penutup atap berupa sirap. Dinding masjid terbuat dari susunan balok-balok batu putih tanpa spesi yang diplester (Adrisijanti-Romli, 2009).

Dalam perkembangannya, masjid ini telah mengalami penambahan bangunan beberapa kali. Penambahan pertama dilakukan oleh Keraton Surakarta pada tahun 1796 M. Bangunan yang ditambahkan adalah serambi depan, emperan serambi, pagar I, tempat wudhu pria maupun wanita. Pada tahun 1919 M masjid ini terbakar, kemudian selesai diperbaiki pada tahun 1926 M. (BPCB Yogyakarta, 2011).



Gambar 4.2 SEQ Figure * ARABIC 2. Prasasti berangka latin (A) dan prasasti beraksara Jawa baru (B)
Sumber: Yohanes

Dahulu Kotagede berada di bawah dua daerah pemerintahan yang masing-masing mempunyai administrasi pemerintahan sendiri yaitu Kotagede Yogyakarta dan Kotagede Surakarta. Oleh karena dimiliki oleh dua keraton tersebut, maka Kotagede dianggap sebagai tanah pusaka bagi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Yogyakarta.

Prasasti Nisan pada Nisan-nisan Tua

Simbolisasi dalam bentuk bangunan yang ada pada masyarakat Jawa bukan merupakan hal yang baru.

Candi, arca, dan lain-lain merupakan contohnya. Pada zamannya, bentuk-bentuk itu menjadi simbol legitimasi kekuasaan. Akan tetapi, di masa kini bentuk-bentuk itu menjadi pembeku ingatan yang memuat jiwa pemikiran manusia yang berkembang di masanya (<https://www.youtube.com/watch?v=0qbXQ7Tjizc>). Jejak islamisasi artefaktual yang banyak ditemukan di makam adalah nisan dan jirat. Pada umumnya jirat dan nisan makam diklasifikasikan sesuai dengan bentuk dan cirinya masing-masing yang khas seturut masanya. Kategori nisan dapat dibagi menjadi 1. Demak-Troloyo, 2. Bayat, 3. Hanyakrakusuman, 4. Pakubuwanan-Hamengkubuwanan.



Gambar 4.3 SEQ Figure * ARABIC 3. Nisan tua berlanggam Sultan Agung/Amangkurat Agung di makam salah satu desa di Kecamatan Kasihan (A), Kecamatan Banguntapan (B), dan sebuah desa di Kabupaten Klaten (C)

Sumber: Yohanes

Makam bukan hanya merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi yang dikuburkan, namun lebih jauh lagi merupakan salah satu bentuk totalitas dari religi manusia, sehingga kajian yang mendalam atas nisan akan dapat digunakan sebagai sumber sejarah yang valid.

Rekonstruksi sejarah adanya peradaban paling tidak, tidak lebih lama dibandingkan dengan model-model nisan yang ada. Kesadaran untuk merawat makam-makam tua di desa akan dapat

menjadi dasar untuk melihat sejarah lokal. Akan tetapi dalam beberapa kasus, istilah merawat ini menjadi disalahartikan dengan membuatnya lebih “baik” seturut pandangan orang pada masa kini. Banyak nisan-nisan lama (tua) yang diganti dengan nisan-nisan baru. Sama seperti bahasa nasional adalah kumpulan dari banyak bahasa daerah yang memperkayanya. Sejarah nasional adalah sejarah desa. Merawat dan menjaga makam-makam yang ada di desa kita adalah upaya mulia untuk menjaga sejarah nasional. Merawat makam tua adalah bentuk terima kasih atas upaya para leluhur yang dimakamkan di tempat itu atas upayanya membangun peradaban awal di desa. Sama halnya dengan merawat candi dan peninggalan arca yang ada di desa.

Prasasti pada Benda Tinggalan Kolonial

Cagak ANIEM Palbapang di Bantul merupakan salah satu cagak listrik yang dibuat pada zaman penjajahan Belanda yang masih tersisa di Kabupaten Bantul. Istilah cagak aniem menjadi populer di Jawa, khususnya pada akhir abad ke-19 karena cagak itu memang dibuat dan digunakan oleh ANIEM, yakni nama sebuah perusahaan listrik swasta Belanda. ANIEM sendiri merupakan singkatan dari *Algemeen Nederlands Indische Electriciteit Maatschappij* yang didirikan di Gambir, Jakarta, pada tahun 1897.

Cagak ANIEM ini memiliki keunikan karena ketuaan usianya dan juga karena gaya arsitekturalnya yang tidak dapat ditemukan pada cagak listrik lain. Bahan untuk mendirikan cagak listrik ini keseluruhannya terdiri dari plat baja. Bagian terbawah dari cagak listrik ini berbentuk persegi dan memiliki pintu plat baja. Bagian terbawah dari cagak listrik

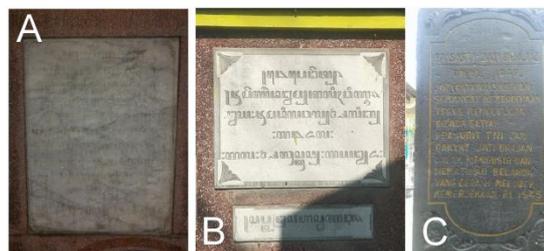
merupakan terminal atau titik pengendali operasional listrik dengan jangkauan persebaran titik pijar listrik tertentu.

Selain merupakan bukti dari bagian pembangunan prasarana pada jalur jalan raya di Bantul-Yogyakarta, struktur ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran masyarakat umum dan siswa tentang perkembangan kelistrikan di Indonesia serta perkembangan kelembagaan atau institusi kelistrikan dalam mengembangkan daya listrik di Indonesia. Meskipun pada saat ini Cagak ANIEM Palbapang telah mengalami kehilangan fungsi sebagai cagak penyangga-penyambung jaringan kabel/kawat listrik tetapi keberadaannya wajib dilestarikan karena menunjukkan bukti adanya modernisasi/industrialisasi masyarakat Bantul. Adanya prasasti atau tulisan yang ada di sana juga menjadi bahan ajar tentang perkembangan kemampuan baca tulis masyarakat pada masa itu. Tulisan yang tertulis dalam aksara Latin dan Jawa dengan bahasa Belanda, Melayu dan Jawa menjadi bukti bahwa kemampuan baca tulis masyarakat pada masa itu juga sudah cukup baik.



Gambar 4.4 SEQ Figure * ARABIC 4
Sumber: Naskah Rekomendasi Penetapan Cagak Aniem Palbapang Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, 2016

Prasasti Peringatan Kejadian



Gambar 4.5 SEQ Figure * ARABIC 5
Sumber: A. Foto Natsir Dabey; B. Foto facebook.com/sejarahjogja; dan C. Foto wonokromo.bantulkab.go.id/first/artikel/309-Prasasti-Jati---Brajan

Seperti telah disebutkan di atas, ketika manusia mengenal tulisan, pada dasarnya mereka sudah tumbuh kesadaran untuk menulis tentang jati dirinya sebagai manusia dalam keluarga dan hidup berbangsa bernegara. Di salah satu sudut Pasar Kotagede terdapat Monumen Ngejaman Pakubuwono X, yakni tugu yang dilengkapi jam penunjuk waktu. Tugu ini hampir tidak dirasakan kehadirannya karena posturnya yang tidak terlalu tinggi, dan saat ini menempel pada dinding rumah. Tugu ini dibangun pada 30 Oktober 1934, merupakan salah satu bukti bahwa wilayah Kotagede juga merupakan bagian dari wilayah *enclave* Kasunanan Surakarta, seperti yang dapat dibaca dari prasasti beraksara Jawa Baru yang ada di sana. Sayangnya bagian atas tugu berupa mahkota, hilang dicuri orang yang hingga saat ini belum dibuatkan replikanya kembali. (gambar 5.A)

Tidak begitu jauh dari pasar, di halaman Kantor Pegadaian Kotagede terdapat Pacak Suji atau Monumen Jumenengan Hamengku Buwono IX yang didirikan untuk mengenang dua windu (16 tahun) Sri Sultan HB IX naik takhta pada tahun 1940. (gambar 5.B)

Jati dan Brajan adalah nama-nama padukuhan yang berada di dalam

Kelurahan Wonokromo, Kecamatan Pleret (pada masa perang kemerdekaan II dinamakan Kapanewon Gondowulung), Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada masa perang kemerdekaan tempat tersebut menjadi medan pertempuran dan juga sekaligus tempat bertahannya *Sub-Wehrkreise* (SWK) 102 dengan komandan Batalyon I Mayor Sardjono. Daerah SWK 102 mempunyai wilayah dari Ambarukmo, Maguwo, Giwangan, Kotagede, Pleret, sampai sebelah selatan Karangsemut (Sanusi, 1983). Gambar 5.C menunjukkan monumen yang didirikan untuk mengingat perjuangan tersebut.

Kesimpulan

Belajar sejarah tidak hanya sekedar belajar untuk menghafal angka tahun dan nama-nama tokoh. Bantul mencatat bahwa banyak benda/bangunan cagar budaya yang mencerminkan dinamika masyarakat Bantul yang merupakan data sejarah. Setiap episode sejarah memberikan dampaknya pada masyarakat, dan setiap peristiwa sejarah tidak hanya memberikan pengaruh, tetapi

juga menyimpan nilai-nilai yang menjadi pedoman untuk tindakan dan pola pikir masyarakat.

Benda cagar budaya yang lestari, secara ideal akan memberi peluang pemanfaatan peninggalan arkeologi, memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitarnya tanpa menimbulkan dampak negatif. Salah satu bentuk kesadaran masyarakat terhadap masa lalunya adalah melakukan rekaman tertulis. Sejarah tidak hanya menghafal angka tahun, nama orang dan peristiwa, akan tetapi juga jauh lebih dalam mencoba mengerti apa yang pernah terjadi untuk dapat diambil manfaatnya di kehidupan masa sekarang. Dengan mempelajari masa lalu melalui data tertulis dalam hal ini prasasti dari segala masa, maka akan didapat nilai-nilai yang dapat kita pelajari dengan baik. Baik itu nilai negatif maupun positif untuk melangkah dengan lebih baik di masa yang akan datang. Sejarah menjadi guru atas perjalanan itu, seperti pernah di tulis Cicero "Historia est Magistra vitae, nuntia vetustatis. ~ studi tentang masa lalu adalah guru kehidupan yang harus menjadi pelajaran untuk masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrisijanti-Romli, dkk (ed). 2009. Mosaik Pusaka Budaya Yogyakarta. Yogyakarta: Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Yogyakarta.
- Ambary, H. M. {1991}. *Makam-Makam Kesultanan dan Parawali Penyebar Islam di Pulau Jawa*. Aspek-aspek Arkeologi Indonesia, no. 12. (Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional).
- Balai Pelestarian Cagar Budaya Yogyakarta, 2011. *Penghargaan Pelestari Cagar Budaya Tahun 2011*. Buletin Narasimha No. 04/IV/2011. BPCB DIY
- Berita Penelitian Arkeologi No 16., 1978, *Laporan Survei Kepurbakalaan Kerajaan Mataram Islam (Jawa Tengah)*, Proyek Penelitian Dan Penggalian Purbakala, Departemen P & K Jakarta.
- Boechari, *Epigrafi dan Sejarah Indonesia, Majalah Arkeologi, Th.I.,No. 2. 1977.*
- Kuntowijoyo. (1994). Metodologi Sejarah. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Kartodirdjo, S. (1982). *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.

- Suhadi, Machi. 1983. *Prasasti Rumwiga*, Berkala Arkeologi 4(1): 37. DOI: 10.30883/jba.v4i1.302
- Naskah Rekomendasi Penetapan Cagak Aniem Palbapang Sebagai Benda Cagar Budaya Peringkat Kabupaten, 2016, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Bantul
- Santosa, H. H. *Prasasti Tulang Er 198 Sanjaya*. Berkala Arkeologi, 1994, 14(2), 186–190. <https://doi.org/10.30883/jba.v14i2.720>
- Sanoesi, Oemar. Replika Sejarah Perjuangan Rakyat Yogyakarta Jilid 2. Yogyakarta: Proyek Pemeliharaan Tempat Bersejarah Perjuangan Bangsa di Daerah Yogyakarta, 1983, hlm. 254.

Sumber Online:

- <https://wonokromo.bantulkab.go.id/first/artikel/309-Prasasti-Jati---Brajan> diakses 21 Juni 2024 jam 12.45 WIB
- <https://www.youtube.com/watch?v=0qbXQ7Tjzc> Kusumalaya Triyagan diakses 24 Juni 2024 jam 11.20 WIB

PROFIL PENULIS**Goenawan Agoeng Sambodo**

Lahir di Temanggung, 4 Juni 1970.

Aktivitas:

- Arkeolog Perencana, Pengawas, dan Pelaksana dalam beberapa pekerjaan terkait rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya di Yogyakarta dan Gresik tahun 2020-2021
- Anggota Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Temanggung pada 2023

PERAN APARAT DESA DALAM PEREKRUTAN *RŌMUSHA*: KASUS KABUPATEN BANTUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Oleh:

Aji Cahyo Baskoro

Staf Pengajar Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma

Email: ajibaskoro@usd.ac.id

Dalam sejarah Indonesia, pendudukan Jepang dicatat sebagai zaman penuh kesengsaraan. Pasalnya, pada kurun tiga setengah tahun itu Jepang mengeksploitasi berbagai sumber daya yang dimiliki Indonesia. Salah satu yang paling kolosal adalah *rōmusha*. Secara harfiah, *rōmusha* merupakan terminologi biasa yang berarti buruh, pekerja kasar, atau kuli (Matsuura, 2005, 226). Akan tetapi dalam konteks pendudukan Jepang, istilah ini lekat dengan memori tentang kekejaman, karena merujuk pada mobilisasi orang-orang dari wilayah yang dikuasai Jepang baik secara sukarela maupun paksa untuk bekerja berat di pabrik atau proyek milik pemerintah militer dalam kondisi yang sangat menyedihkan. (Cribb & Kahin, 2012, 459).

Jepang gencar merekrut *rōmusha* terutama setelah negara itu menetapkan Asia Tenggara dan Pasifik sebagai *zettai kokubōken* atau wilayah yang wajib dipertahankan di tengah memburuknya situasi Perang Pasifik pada paruh kedua 1943 (Kurasawa, 1993, 124). Pada saat itu, Jepang membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar untuk menyokong pertahanan. Sebagaimana diatur dalam undang-undang pemerintah militer, tugas *rōmusha* meliputi seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan perang, mulai dari membangun infrastruktur militer, seperti lapangan terbang, benteng pantai, lubang

perlindungan, dan pabrik amunisi, hingga menggarap lahan untuk menambah pasokan pangan dan bahan-bahan penting untuk bala tentara *Dai Nippon* (Kurasawa, 1993, 125). Menjelang akhir perang, *rōmusha* juga banyak yang dipekerjakan bersama para tentara Pembela Tanah Air (PETA) untuk membangun kubu-kubu pertahanan (Notosusanto, 1979, 119).

Perekrutan *rōmusha* dipusatkan di Jawa, karena pulau ini memiliki populasi paling padat dibandingkan pulau-pulau lain di Indonesia. Kendati demikian, para *rōmusha* tidak hanya dipekerjakan di Jawa, tetapi juga di luar Jawa, bahkan di luar negeri (Poeponegoro & Notosusanto, 2008, 65). *Rōmusha* umumnya direkrut dari kalangan pemuda. Pada awalnya, banyak yang mengikuti *rōmusha* secara sukarela demi memperoleh pekerjaan. Akan tetapi seiring kebutuhan tenaga kerja yang meningkat, Jepang mewajibkan setiap keluarga menyerahkan satu orang untuk menjadi *rōmusha* (Suwarno, 1999, 12). Jepang bahkan menggelar razia dan menangkap siapa saja yang mereka anggap layak kerja untuk dijadikan *rōmusha* (Oktorino, 2016, 245).

Perekrutan *rōmusha* pada awalnya ditangani *Naimubu* atau Departemen Dalam Negeri. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, tugas itu dilimpahkan pada badan khusus bernama *Rōmukyoku*

atau Biro Tenaga Kerja yang bekerja sama dengan pemerintah daerah (Kurasawa, 2016, 137). Atas desakan tokoh-tokoh Indonesia, dibentuk pula Badan Pembantoe Pradjoerit Pekerdja atau BP3 yang mengusahakan kesejahteraan para *rōmusha*. (Kurasawa, 1993, 124).

Tidak ada catatan yang menyebut secara pasti jumlah *rōmusha* yang direkrut Jepang. Saat membicarakan pampasan perang dengan Jepang, pemerintah Indonesia menyebut ada sekitar 4 juta warganya yang menjadi *rōmusha* (Poeponegoro & Notosusanto, 2008, 166). Sementara itu, mantan penerjemah pemerintah pendudukan Jepang, Miyoshi Shunkichiro memperkirakan ada 5 hingga 8 juta orang Indonesia yang menjadi *rōmusha* hingga akhir perang (Miyoshi, 1966, 66). Jumlah ini tak jauh berbeda dengan perkiraan Library of Congress, Amerika Serikat, yaitu antara 4 hingga 10 juta orang (Library of Congress, 1992).

Meskipun bervariasi, angka di atas sama-sama menggambarkan bahwa perekrutan *rōmusha* di Indonesia berlangsung sangat masif, mengingat jumlah penduduk Indonesia yang hanya sekitar 68.5 juta pada 1945 (Bank Indonesia, 2014). Dengan kata lain, Jepang rata-rata mampu merekrut satu dari setiap sepuluh penduduk Indonesia sebagai *rōmusha*. Keberhasilan ini tampaknya tidak semata-mata karena gencarnya propaganda mengenai “prajurit ekonomi” atau “pahlawan pekerja” yang disuarakan Jepang, tetapi mencerminkan keberhasilan bala tentara *Dai Nippon* memanfaatkan pemerintah daerah untuk menjangkau warga hingga ke pelosok-pelosok desa. Model perekrutan *rōmusha* yang terakhir ini salah satunya terlihat di Bantul, Yogyakarta. Sebagaimana akan

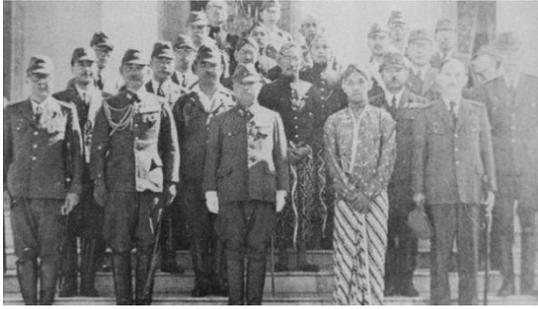
dibicarakan dalam tulisan ini, banyak *rōmusha* di wilayah tersebut direkrut langsung oleh aparat desa setempat.



Gambar 5.1 *Rōmusha* di Kalimantan
Sumber: Australia War Memorial

Rekrutmen *Rōmusha* di Yogyakarta

Setelah mengusir kekuasaan Belanda dari Indonesia, Jepang tidak lantas menghapus total struktur pemerintahan yang ada sebelumnya. Jepang justru memanfaatkannya untuk mendukung Perang Pasifik. Bagi Jepang, langkah ini lebih efisien ketimbang membentuk struktur pemerintahan yang sama sekali baru (Kahin, 2013, 145). Dalam kasus Yogyakarta, Jepang misalnya tetap mengakui kesultanan dengan menjadikan wilayah itu sebagai *kōchi* dengan batas wilayah yang sama seperti pada periode kolonial Belanda. Selain itu, Jepang juga mengukuhkan Sri Sultan Hamengku Buwono IX sebagai Yogyakarta-*kō* atau Raja Yogyakarta. Hanya saja, pemerintah Yogyakarta harus tunduk pada pemerintah militer di Jakarta dan mendukung usaha-usaha pemenangan perang, seperti pengerahan *rōmusha* (Suwarno, 1994, 119).



Gambar 5.2 Sultan HB IX dan Para Pemimpin Bala Tentara Jepang di Jakarta
Sumber: Tahta untuk Rakyat

Hingga akhir periode perang, setidaknya ada sekitar 15 ribu warga wilayah tersebut yang dikerahkan menjadi *rōmusha*. Rekrutmen *rōmusha* di Yogyakarta pada awalnya ditangani oleh biro yang mengurus berbagai keperluan sosial di lingkungan kesultanan. Namun, tugas tersebut kemudian diambil alih oleh Lembaga untuk Menolong Pengangguran dan Orang Sengsara yang berada di bawah *Sōmubu* atau Departemen Urusan Umum (Suwarno, 1999, 12).

Dalam praktiknya, rekrutmen *rōmusha* dibebankan pada *kenchō* [bupati], yang kemudian membebaskan secara berturut-turut pada *gunchō* [wedana], *sonchō* [camat], *kuchō* [lurah], sampai pada *gumichō* [ketua RT]. Setiap *kenchō* memerintahkan *sonchō* untuk mengorganisasi para *kuchō* agar mengerahkan warganya untuk menjadi *rōmusha*. Para *kuchō* yang mendapatkan perintah tadi kemudian menugaskan perangkat desa dan *kumichō* untuk mendatangi rumah-rumah warga dan meminta mereka menjadi *rōmusha*. Setiap keluarga diperintahkan menyerahkan satu pemuda untuk berangkat menjadi *rōmusha*. Para pemuda itu kemudian dikumpulkan ke kantor *kuchō*. Dari sana, mereka dibawa ke kantor *sonchō*, untuk kemudian

diberangkatkan ke tempat penampungan sementara di Gowongan (Suwarno, 1999, 14).

Rōmusha Yogyakarta dikerahkan untuk mengerjakan proyek-proyek baik yang ada di dalam maupun di luar wilayah tersebut. Di Yogyakarta, setidaknya terdapat empat proyek yang mempekerjakan *rōmusha*. Pertama, di Desa Wonocatur dekat Lapangan Terbang Maguwoharjo. Di sini, para *rōmusha* dipekerjakan untuk membuat gua persembunyian dan perlindungan pesawat terbang. Kedua, di Pundong, Bantul. Di tempat ini, para *rōmusha* juga dipekerjakan untuk membuat gua persembunyian yang menghadap ke Pantai Selatan. Ketiga, di Kaliurang di wilayah Sleman. Di sini, para *rōmusha* dipekerjakan untuk membuat gua persembunyian di lereng Merapi. Sisanya, para *rōmusha* dikerahkan untuk membuat saluran yang menghubungkan Sungai Progo di Kulon Progo dan Sungai Opak di Prambanan (Suwarno, 1999, 16). Selain itu, tercatat pula sejumlah *rōmusha* asal Yogyakarta yang dikirim ke Sumatra, Kalimantan, bahkan Malaya, Singapura dan Thailand untuk mengerjakan proyek pemerintah pendudukan di sana (Kurasawa, 2016, 138).

Peran Aparat Desa

Dalam transkrip wawancara *Pengalaman Romusha di Daerah Istimewa Yogyakarta* yang dihimpun P.J. Suwarno (1997) terekam peran aktif aparat desa dalam merekrut *rōmusha*. Dalam kasus di Bantul, aparat desa yang merekrut antara lain lurah, jogoboyo, kepala dukuh, ketua RT, dan lain-lain. Mereka menggunakan berbagai metode, mulai dari mengajak secara persuasif, memaksa, bahkan ada

yang menipu warganya supaya bersedia menjadi *rōmusha*.

Surat, warga Timbulharjo, Sewon, Bantul, misalnya menuturkan bahwa ia ikut *rōmusha* karena dipaksa oleh *jogoboyo*. Saat itu, ia tidak berani menolak. “Kalau tidak mau, nanti yang sengsara orang tua,” untkapnya (Suwarno, 1997, 1548). Kendati yang menyuruh *jogoboyo*, menurut Surat, teknis perekrutan *rōmusha* di tempat tinggalnya diurus oleh *gumichō*. Ia mengenangnya sebagai berikut:

Pokoknya, pencarian tenaga *rōmusha* itu dapat, tidak usah pakai test segala. Tetapi dari desa yang dipilih memang yang masih muda dan sehat ... yang memilih *gumichō* ... dari *gumichō* langsung diantar ke kapanewon (Suwarno, 1997, 1549).

Pengalaman hampir sama dituturkan oleh Buang yang tinggal di Jetis, Bantul. Ia mengaku, namanya tiba-tiba didaftarkan sebagai *rōmusha* oleh lurah dan kepala dukuh. Setelah itu, *jogoboyo* datang ke rumah dan mengajaknya berangkat ke penampungan *rōmusha* di Gowongan, dengan alasan keluarganya harus mengirimkan satu orang. Buang mengatakan:

Mula-mula kan Pak Jogoboyo datang ke rumah saya, terus mengatakan kepada orang tua, karena anakmu banyak ya saya minta satu si Buang Ngatijo itu untuk bekerja di *rōmusha*. Karena saudara saya enam, tiga perempuan tiga laki-laki. Kebetulan yang diminta saya. (Suwarno, 1997, 1517).

Sementara itu, Ngaliman yang tinggal di Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul

menuturkan bahwa yang menyuruhnya ikut *rōmusha* adalah *gumichō*. Hanya saja, Ngaliman mendaftarkan diri secara sukarela karena ingin mencari pekerjaan. “Yang ada dalam pikiran, ya hanya besuk kalau sudah selesai *rōmusha* kan bisa pulang lagi,” kenangnya. Ia melanjutkan sebagai berikut:

Disuruh masuk *rōmusha* itu pertama kali yang menyuruh *gumichō*. Jaman Jepang itu sebenarnya semua pemuda diharuskan ... Karena ada kesempatan mencari uang, terus mengurus persyaratan bersama-sama. Paginya ke kantor kelurahan mencari surat keterangan untuk mendaftar pertama kalinya (Suwarno, 1997, 1601).

Sama seperti pengalaman di atas, Sarjo Utomo yang tinggal di Kretek, Bantul juga ikut *rōmusha* dengan sukarela karena tergiur dengan upah yang dijanjikan. Ia menuturkan sebagai berikut.

Saya diajak, ‘Ayo bekerja’ upahnya setali tetapi dipotong satu sen untuk kepalanya, dulu Ancho, jadi tinggal 24 sen (Suwarno, 1997, 1595).

Aparat desa kadang juga membohongi warganya supaya ikut *rōmusha*. Arjo Pawiro yang tinggal di Banguntapan, Bantul misalnya, ikut *rōmusha* karena mengira hanya akan diajak mengambil kedelai di Gowongan. Ia menuturkan:

Dulu hanya diberi tahu begini, ayo ambil kedelai di Gowongan. Sesampai di sana terus tidak boleh pulang ... dari Gowongan diangkut ke Jakarta, dari Jakarta terus menebangi

hutan ... di Singapura (Suwarno, 1997, 1601).

Pengalaman ditipu oleh aparat desa juga dialami Tugiman yang tinggal di Sewon, Bantul. Ia mengaku, ikut *rōmusha* karena diajak oleh jogoboyo di desanya. Tugiman awalnya mengira, jogoboyo akan ikut bekerja juga karena mengenakan pakaian layaknya *rōmusha*. Namun, jogoboyo ternyata langsung pulang setelah mengantarkannya. Tugiman menuturkan kekecewaannya sebagai berikut:

Di sini, sewaktu pak Jogoboyo masih, saya diperintah ... pokoknya asal ketemu disuruh berangkat ... jaman dulu kan rakyat itu takut dengan perangkat desa. Jadi kalau disuruh apa-apa ya harus mau ... Ya menipu, dulu

jogoboyo diberi pakaian seperti saya tetapi hanya biar lancar. Nah bedanya kalau saya terus, dia pulang (Suwarno, 1997, 1539).

Kendati kecewa, para mantan *rōmusha* seperti Tugiman umumnya memahami bahwa aparat desa menyuruh mereka ikut *rōmusha* semata-mata karena menjalankan tugas dari Jepang. Para jogoboyo yang mendatangi rumah warga dan memaksa mereka menjadi *rōmusha* tidak mungkin tidak melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya oleh lurah. Sementara itu, para lurah hanya menjalankan tugas dari atasan mereka, yaitu camat, wedana, dan bupati, yang bermuara pada pemerintah bala tentara *Dai Nippon*. "Lurah itu hanya membawa orang-orang atas perintah Jepang," ujarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmakusumah (Ed.). (2011). *Takhta untuk rakyat: celah-celah kehidupan Sultan Hamengku Buwono IX*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bank Indonesia. (2014, Juni 30). *Penduduk Indonesia Tengah Tahun menurut Jenis Kelamin*. Bank Indonesia. Retrieved Juni 20, 2024, from http://www.bi.go.id/sdds/series/pop/index_pop.asp
- Cribb, R. B., & Kahin, A. (2012). *Kamus sejarah Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Kahin, G. M. (2013). *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia*. Komunitas Bambu.
- Kurasawa, A. (1993). *Mobilisasi dan kontrol: studi tentang perubahan sosial di pedesaan Jawa, 1942-1945*. Diterbitkan atas kerja sama Yayasan Karti Sarana dengan Penerbit PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kurasawa, A. (2016). *Masyarakat & perang Asia Timur Raya: sejarah dengan foto yang tak terceritakan* (A. Kurasawa, Trans.). Komunitas Bambu.
- Library of Congress. (1992). *Indonesia: World War II and the Struggle For Independence, 1942-50; The Japanese Occupation, 1942-45*. Library of Congress.
- Matsuura, K. (2005). *Kamus Jepang-Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.
- Miyoshi, S. (1966, November). Jawa Senryō Gunsei Kaiko-roku. *Kokusai Mondai*, 80, 66.
- Notosusanto, N. (1979). *Tentara PETA pada Jaman Pendudukan Jepang*. Gramedia.
- Oktorino, N. (2016). *Di bawah matahari terbit: sejarah pendudukan Jepang di Indonesia, 1941-45*. PT Elex Media Komputindo.
- Poeponegoro, M. D., & Notosusanto, N. (2008). *Sejarah Nasional Indonesia: Zaman Jepang dan Zaman Republik Indonesia, ±1942-1998*. Balai Pustaka.

- Suwarno, P. J. (1994). *Hamengku Buwono IX dan sistem birokrasi pemerintahan Yogyakarta, 1942-1974: sebuah tinjauan historis*. Penerbit Kanisius.
- _____. (1997). *Pengalaman Romusha di Daerah Istimewa Yogyakarta (Vol. III)*. Pusat Studi dan Dokumentasi Sejarah Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma.
- _____. (1999). *Romusa Daerah Istimewa Yogyakarta*. Penerbit Universitas Sanata Dharma.

PROFIL PENULIS



Aji Cahyo Baskoro, S.S., M.A.

Lahir di Pati, 10 April 1988.

Pendidikan dan Aktivitas:

- S-1 Sastra Jepang, Universitas Gadjah Mada
- S-2 Ilmu Sejarah, Universitas Gadjah Mada
- Dosen di Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma

INDUSTRI GULA KOLONIAL DAN PEMOGOKAN BURUH DI BANTUL AWAL ABAD 20

Oleh:

Kuncoro Hadi

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Sejarah, Universitas Negeri Yogyakarta

Email: hkuncoro@uny.ac.id

Memahami Perubahan

Perubahan-perubahan terjadi pasca Perang Jawa di wilayah Kasultanan Yogyakarta, terutama terkait dengan pembagian wilayah secara administratif dan tumbuhnya perkebunan. Keduanya tentu saja membawa dampak baru bagi masyarakat, tata pemerintahan, dan ekonomi. Ketika wilayah-wilayah di kasultanan Yogyakarta terbagi-bagi dalam beberapa kabupaten (*regentschap*), yang menjadi bagian dari proses pemekaran wilayah kecil, figur bupati (*regent*) menjadi penting sebagai representasi—langsung maupun tidak langsung—dua kuasa sekaligus: kasultanan dan kolonial.

Bupati diangkat dari para pegawai kasultanan, tetapi pada awal abad 20, bupati Bantul, KRT Dirdjokoesoemo, diangkat dari pegawai pemerintah kolonial. Dirdjokoesoemo sebelumnya seorang jaksa. Pada tahun 1930-an, dalam berita-berita kolonial, ia dianugerahi bintang *groote gouden ster* karena jasanya (Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2019, 8). Medali ini diberikan kepada priyayi yang berjasa dalam pengabdian jangka waktu yang lama dan, sesuai ketentuan, diberikan dengan upacara penganugerahan secara rahasia (Siska Nurazizah Lestari, Sumarno, Bayu Surindra, 2020, 169).

KRT. Dirdjokoesoemo yang memimpin kabupaten Bantul dalam rentang waktu lama (1918-1943)

menyaksikan bagaimana perkembangan wilayah Bantul dalam balutan ekonomi perkebunan dan melihat industri gula memberi perubahan-perubahan signifikan di pedesaan-pedesaan Bantul, termasuk bagaimana masyarakat menyikapi perubahan itu. Masyarakat secara umum di pedesaan, mengalami perubahan dari pengolah sawah (petani) menjadi buruh perkebunan (baik di sawah tebu maupun pabrik gula). Pengangkatan KRT. Dirdjokoesoemo kemungkinan dianggap tepat oleh kolonial karena di masa sebelum awal kepemimpinannya, pergolakan di tanah-tanah tebu dan gula terjadi di Bantul akibat hadirnya para “bakul” gula Eropa.

Bantul masa Kolonial: Tanah Tebu dan Bakul Gula Eropa

Wilayah Swapraja memang berbeda dalam pengelolaan perihal tanah. *Cultuurstelsel* tidak berlaku di Kasultanan Yogyakarta. Tetapi ekonomi perkebunan yang masif terjadi di wilayah ini. Pada tahun 1912, terdapat 8 perusahaan gula di Bantul, dalam perkembangannya pada peta kolonial 1925 yang menunjukkan data pabrik gula di Jawa Madura terdapat 7 pabrik gula di wilayah Bantul dari total 17 Pabrik di Yogyakarta. Setahun kemudian data berubah, terdapat 9 pabrik gula di Bantul dari 18 pabrik gula (Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul, 2019, 9). Data ini menunjukkan bahwa Kabupaten

Bantul menjadi pusat tebu (tanah perkebunan) dan gula (pabrik).

Tabel 6.1 Data pabrik gula di Bantul

| 1890 | 1912 | 1925 |
|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Bantoel (Djeboegan) | Bantoel (Djeboegan) | Bantoel (Djeboegan) |
| Padokan | Padokan | Padokan |
| Barongan | Barongan | Barongan |
| Gesiekan | Gesiekan | Gesiekan |
| Gondang Lipoero (Gandjoeran) | Gondang Lipoero (Gandjoeran) | Gondang Lipoero (Gandjoeran) |
| Kedaton Pleret | Kedaton Pleret | Kedaton Pleret |
| Poendoeng | Poendoeng | Poendoeng |
| | Siloek Lanteng | |

Pabrik-pabrik ini telah berdiri sejak paruh kedua abad 19. Sekalipun dalam perkembangannya, pabrik-pabrik gula Eropa itu berganti kepemilikan, dua nama keluarga ini terkenal sebagai pengusaha gula di wilayah Bantul: Wieseman dan Weijnschenk. Keduanya meninggalkan jejak sebagai pendiri pabrik gula Bantoel, Barongan, dan Padokan. Ketiga pabrik ini nantinya akan menjadi pusat-pusat perlawanan buruh tani melawan beban-beban yang ditimpakan kepada mereka pada awal abad 20. Bahkan pada pertengahan paruh kedua abad 19, G. Weijnschenk sudah berlaku sewenang-wenang kepada para petani yang menentang kerja rodi di tanah perkebunannya. Ia bahkan memiliki penjara pribadi untuk kaum bumiputra yang membangkang. Arogansi ini muncul karena sebelumnya, residen Yogyakarta menekan sultan untuk memberi keamanan kepada para penyewa pekebun Eropa ini dengan menetapkan kepala polisi di tanah perkebunan yang mereka

sewa (Ahmad Athoillah, Kuncoro Hadi, Bayu Ananto Wibowo, 2023, 71-74).



Gambar 6.1 Lokasi pabrik gula di Yogyakarta (angka 117-134) pada tahun 1925

Sumber: KITLV

Sarikat Islam, Buruh Gula, dan pemogokan-pemogokan di Bantul

Sarikat Islam (SI) pada 1917 dalam kongresnya di Batavia—yang kemudian memberi pengaruh dalam gerakan buruh—mencetuskan tentang hadirnya "kapitalisme yang berdosa" yang merujuk pada kapitalisme Barat pengisap harta kalangan kaum bumiputra. Bahkan propaganda-propaganda sebelum kongres SI sudah mengarah pada kritik yang keras. Koran-koran milik SI memuat artikel yang salah satunya berbunyi "...Pabrik-pabrik gula adalah racun bagi orang Jawa" yang menunjukkan betapa rendahnya hidup buruh bumiputra yang bekerja pada industri gula [Sindhunata, 2024, 187-188]. Dalam perkembangannya, pengaruh SI melalui figur Suryopranoto sangat kuat dalam gerakan buruh gula di Yogyakarta, termasuk melalui Adidarmo.

Protes-protes buruh menjadi hal yang lumrah terjadi karena perlakuan kurang adil, diperas tenaganya, atau harus bekerja dengan syarat-syarat yang terlalu buruk untuknya. Upah diberikan sebagai pengganti atas tenaga atau kerja yang telah dilakukan. Sistem baru inilah yang mengubah situasi masyarakat pedesaan

yang terimbas dengan hadirnya industri gula. Di wilayah Swapraja termasuk di *regentschap* Bantul sistem pengolahan tanah untuk perkebunan tebu dan pabrik gula dilakukan dengan mekanisme sewa tanah antara pengusaha swasta (Eropa) dengan pemilik lahan (tanah *lungguh/apanage*) atau para patuh. Para petani penggarap—mereka yang secara tradisional disebut *kuli kenceng*—mengalami perubahan situasi. Mereka tidak lagi menggarap tanah sawah dengan penyerahan hasil panen kepada pemilik (*patuh*), tetapi mengerahkan tenaga dengan imbalan upah kerja. Di samping mereka, dalam lapisan petani era perkebunan ini masih ada kalangan buruh penggarap (yang bekerja di perkebunan) serta buruh pabrik (yang bekerja di dalam pabrik). Suryopranoto kemudian mendorong para buruh pabrik menjadi anggota PFB (*Personeel Fabriek Bond*), buruh tani di perkebunan menjadi anggota Perserikatan Kaum Boeroeh Oemoem (PKBO) serta kuli kenceng perkebunan bergabung pada Sarekat Tani. Ketiga perkumpulan ini berada di bawah satu organisasi yang dinamakan tentara buruh Adidarmo (Bambang Sulisty, 1995, 72).

Pada 1918, satu kasus di Bantul hubungan patuh dengan para *kuli kenceng* terkait persoalan korupsi. Para patuh yang menjadi kepanjangan tangan kolonial dalam hal pengelolaan lahan perkebunan tebu di Bantul, tidak memberikan uang *kasepan* (uang ganti rugi) kepada para *kuli kenceng*. Kasus ini membuat Bupati Bantul KRT. Poerbadiningrat “cuti” selama 3 bulan dan kemudian digantikan oleh KRT. Dirdjokoesoemo. Bupati baru kemudian berupaya “menjanjikan pembangunan perekonomian rakyat...dan memulihkan kembali wilayahnya” (Bambang Sulisty,

1995, 74). Pemerintah kolonial kemudian berupaya menghapus sistem *lungguh* dan sistem sewa tanah. Sewa tidak lagi dengan para pemegang *lungguh* tetapi langsung kepada Kasultanan. Durasi sewa ini berlangsung hingga 50 tahun. Beberapa perusahaan gula seperti Padokan-Barongan, Bantoel, Gesiekan, Gondang Lipoero, serta Siloek Lanteng memperbarui kontrak sewa mereka antara tahun 1923 hingga 1924—dimana semestinya kontrak mereka berakhir pada 1973 hingga 1974 (Afrizal Rahman Dhani, 2020).

Sebagai gambaran situasi penderitaan pada 1918, seiring dengan munculnya berbagai *pageblug* (wabah penyakit), di Yogyakarta penduduk desa dari berbagai *regentschap*, termasuk dari Bantul, banyak yang menggelandang ke kota Yogyakarta. Halaman mesjid besar kasultanan dipenuhi orang menginap. Kantor Adidarmo penuh dengan orang-orang desa yang mengadakan berbagai persoalan. Di Bantul sendiri, ada kasus di mana di sebuah *onderdistrik* banyak atap rumah diturunkan karena takut dibakar penjahat dan di desa-desa lain, datang orang tidak dikenal meminjam uang atau barang dan jika tidak diberi, maka mereka mengancam akan membakar rumah penduduk. Sering kali, pembakaran-pembakaran rumah penduduk ini terjadi di wilayah perkebunan tebu. Pembakaran itu juga tidak bisa dipisahkan dari persoalan antara pabrik gula dengan buruh dan petani. Gambaran yang lain yang memperparah kondisi adalah soal upah buruh dan tani di perkebunan yang rendah seperti ini (Bambang Sulisty, 1995, 64-65):

1. Membuat lubang sehari sekitar 0,10 gulden

2. Tanam tebu sehari sekitar 0,25 gulden
3. Upah potong dan angkut tebu [hanya saat panen] sekitar 0,30 gulden

Upah ini sangat berat karena, sebagai perbandingan, biaya makan sehari untuk 1 orang sebanyak 0,10 gulden. Mereka bekerja dari jam 7 pagi hingga 5 sore dan tidak memiliki cukup waktu untuk aktivitas ekonomi lainnya. Beban upah rendah ini masih ditambah dengan pajak-pajak yang harus mereka tanggung, salah satunya pajak keselamatan sebesar 0,50 gulden setiap bulan.

Perlawanan-perlawanan akhirnya menyeruak. Para buruh melakukan pemogokan dan menuntut kenaikan upah serta memprotes kesewenang-wenangan pabrik. Di Bantul, sasaran utama adalah pabrik gula Padokan, lalu berlanjut ke Barongan, Ganjuran hingga Pundong. Pemogokan berlangsung singkat karena mereka tertekan dengan situasi kebutuhan mendapat uang untuk hidup dengan bekerja kembali. Situasi ini membuat pola gerakan berubah, mungkin juga karena keterdesakan, dengan tindakan-tindakan pencurian dan pembakaran-pembakaran tebu. Tahun 1918, terjadi 21 pembakaran tebu di pabrik gula Bantoel, 77 pembakaran tebu di pabrik gula Padokan, 10 pembakaran tebu di pabrik gula Pundong, dan 12 pembakaran tebu di pabrik gula Barongan

(Afrizal Rahman Dhani, 2020). Intensitas pembakaran di wilayah Bantul cukup banyak dibanding wilayah lain. Data ini menunjukkan bahwa pusat perlawanan atas kesewenang-wenangan industri gula ada di Bantul.

Penutup

Persoalan protes di pabrik gula wilayah Bantul—serta secara keseluruhan di Yogyakarta—sampai dibawa ke sidang *Volksraad* di Batavia. Suryopranoto juga datang menemui Gubernur Jenderal van Limburg Stirum untuk mengadukan kesewenang-wenangan para *bakul gulo* Eropa. Protes dan mogok masih terus terjadi di Bantul hingga tahun 1920 di pabrik gula Gesiekan, Gondang Lipoero dan Padokan. Tetapi setelahnya, pemogokan meredup seiring dengan perbaikan-perbaikan yang dilakukan oleh pemilik-pemilik pabrik gula. Tuntutan atas kenaikan upah dipenuhi oleh pabrik gula serta kesejahteraan tani perkebunan dan buruh pabrik mulai diperhatikan. Perserikatan dan organisasi untuk perlawanan tidak lagi sepenuhnya dibutuhkan. Ekonomi Perkebunan tebu dan para *bakul gulo* masih bisa berjalan dengan baik sebelum akhirnya, industri gula yang menjanjikan tenggelam—cepat atau lambat—karena hantaman krisis ekonomi setelahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal Rahman Dhani, "Swastanisasi Perkebunan Tebu Dan Industri Gula Di Kabupaten Bantul Tahun 1911 – 1918", *Avatara*, Volume 10, No. 1 Tahun 2020.
- Ahmad Athoillah, Kuncoro Hadi, Bayu Ananto Wibowo, *Gading Mataram. Sejarah Bantul 1678-1942*, Bantul: Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul, 2023.
- Algemeen Syndicaat van Suikerfabrieken in Nederlandsch-Indië, "Kaat der suikerfabrieken, spoor- en tramwegen van Java en Madoera (bijgewerkt tot 1 juni 1925)",

<https://digitalcollections.universiteitleiden.nl/view/item/2011835>, diakses pada 13 Juni 2024.

Anonim, *Upah dan pemogokan*, Jakarta: Badan Penerangan Katolik, tt.

Bambang Sulisty, *Pemogokan buruh sebuah kajian sejarah*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995

Han Revanda Putra, "Zaman Mogok di Yogyakarta, 1915–1921", <https://www.balairungpress.com/2022/12/25401/> diakses pada 12 Juni 2024.

Kabupaten Bantul Tahun 1911 – 1918 (Gerakan sosial petani perkebunan dan buruh pabrik gula Bantul)", *Avatara*, Volume 10, No. 1 Tahun 2020.

Lestari, Sumarno, Bayu Surindra, 2020, "Medali Belanda dan Pengaruhnya bagi Kehidupan Sosial elit Jawa, Abad XIX-XX: Studi Kasus Pemberian Medali kepada Pakubuwana X", *Patrawidya*, Vol. 21, No. 2 Agustus 2020.

Sindhunata, *Ratu Adil. Ramalan Jayabaya dan Sejarah Perlawanan Wong Cilik*, Jakarta: Kompas Gramedia, 2024.

Soedarisman Poerwokoesoemo, *Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1984.

PROFIL PENULIS



Kuncoro Hadi

Lahir di Klaten, 10 April 1984.

Pendidikan dan Aktivitas:

- S-1 Ilmu Sejarah di UNY (lulus 2009)
- S-2 Ilmu Sejarah di UGM (lulus 2017)
- Sejak 2019, menjadi staf pengajar di Prodi Ilmu Sejarah, FISHIPOL UNY

SEJARAH TAMAN MAKAM PAHLAWAN NASIONAL KUSUMA BANGSA

Oleh:

Fahrudin

Staf Pengajar Program Studi Pendidikan Sejarah, Universitas PGRI Yogyakarta

Email: fahrudin@upy.ac.id

Taman Makam Pahlawan Nasional (TMPN) Kusuma Bangsa di Bantul memiliki peran penting dalam menjaga ingatan kolektif bangsa Indonesia atas jasa-jasa para pahlawan yang telah berkorban demi kemerdekaan dan kedaulatan negara. TMPN Kusuma Bangsa terletak di Jalan Parangtritis, Desa Patalan, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul dengan area seluas 9.129 meter persegi dan dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Bantul.



Gambar 7.1 Halaman depan TMP Kusuma Bangsa
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

TMPN Kusuma Bangsa didirikan pada tahun 1982 dan diresmikan pada tanggal 7 Februari di tahun yang sama oleh Menteri Sosial Republik Indonesia, Sapardjo. Pendirian makam ini merupakan langkah konkret untuk memindahkan beberapa makam pahlawan dan pejuang dari makam umum

ke tempat yang lebih layak sebagai bentuk penghormatan negara.



Gambar 7.2 Jajaran nisan di TMP Kusuma Bangsa
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Tercatat dalam arsip pemakaman beberapa jenazah di makam umum sebelum dipindahkan ke TMPN Kusuma Bangsa:

1. Letda Sri Harjono dimakamkan di Sawahan, Sumber Agung, Jetis
2. Pei Khadar Ali dimakamkan di Ganjuran, Sumber Mulyo, Bambanglipuro
3. Wamil KKO Suhardi dimakamkan di Cangkring, Sumber Agung, Jetis
4. Pratu Amat Saroni dimakamkan di Gaduh, Patalan, Jetis
5. Kopral Dalmin dimakamkan di Gerselo, Patalan, Jetis
6. Serda Joyosubardi dimakamkan di Bayuran, Sawahan, Sumber Agung, Jetis



Gambar 7.3 Daftar jenazah di TMP Kusuma Bangsa
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Selain yang disebutkan, terdapat jenazah yang tidak tercatat identitasnya dan asal pemakamannya. Pemindahan jenazah dimulai tahun 1982 dan terus berlanjut pada waktu berikutnya. Seluruh jenazah yang dimakamkan berasal dari kesatuan Angkatan Darat, Angkatan Udara, Polisi, dan Pejuang dari kalangan sipil dari latar belakang pangkat dan agama yang berbeda. Riwayat perjuangan masing-masing jenazah bermacam-macam mulai dari pra kemerdekaan, melawan Jepang, Agresi Militer 1, Agresi Militer 2, dan lain-lain.

Penugasan para prajurit tidak hanya di Yogyakarta saja, seperti Kapten CKU Tjondropratomo kelahiran Sumberbatikan Tirirenggo 1929, berjuang sejak 7 Oktober 1945 merebut senjata Jepang bersama tentara pelajar semenjak sekolah SMP. Pada 19 Desember 1948 bergabung dengan Batalion I Brigade 10 di staf seksi IV yang bertugas menyuplai perbekalan, bahan makanan, peralatan perang (mesiu) dan membantu mencari informasi lawan. Kemudian pada tanggal 1 Oktober 1949 diangkat menjadi TNI dengan pangkat Prajurit Dua, anggota staf Kompi, Bn. Brigadir 10 dan pindah ke Corp Keuangan Angkatan Darat pada tahun 1958 hingga akhir dinas. Wilayah

penugasannya meliputi Bantul (SWK 102, WK III), Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Riau. Beliau wafat pada tanggal 22 Oktober.

Selain Kapten CKU Tjondropratomo terdapat prajurit asal Bantul namun berjuang di luar Bantul atau prajurit asal luar Bantul namun bergerilya di Bantul kemudian dimakamkan di TMPN Kusuma Bangsa, misalnya Peltu Soeharto yang berasal dari Purworejo yang gugur pada tanggal 4 Mei 1996. Seluruh jenazah yang dimakamkan telah memiliki bintang jasa dan gugur dalam bertugas kemudian telah diverifikasi dan direkomendasikan oleh Kodim Bantul atau Polres Bantul.



Gambar 7.4 Bagian dalam TMP Kusuma Bangsa
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Sejak terbitnya UU No 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, nama TMP Kusuma Bangsa diubah menjadi TMPN Kusuma Bangsa. Hingga 2024, tercatat ada 91 prajurit yang dimakamkan di TMPN Kusuma Bangsa, masing-masing membawa kisah heroik yang patut dikenang oleh setiap generasi. Berdasarkan PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota yang didasarkan pada UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dalam pembagian kewenangan urusan bidang sosial ditetapkan mengenai pembangunan, perbaikan dan pemeliharaan TMP yang berada di kabupaten/kota menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Hal tersebut diperkuat dengan terbitnya UU No 23 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pembagian Kewenangan Urusan Bidang Sosial dinyatakan bahwa pemeliharaan TMPN yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini menandai transisi pengelolaan dari Dinas Sosial DIY ke Dinas Sosial Kabupaten Bantul yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pemeliharaan TMPN Kusuma Bangsa.

Meskipun kewenangan pembinaan dan pemeliharaan berada pada Dinas Sosial Bantul, muncul kesulitan dalam menganggarkan dana karena status kepemilikan tanah TMPN Kusuma Bangsa tidak terdaftar sebagai aset Dinas Sosial Kabupaten Bantul. Pada tanggal 17 Februari 1973 Asisten 3/PERS KASDAM VII/Diponegoro bertindak atas nama Panglima Daerah Militer VII Diponegoro menyerahkan kewenangan pembinaan dan pemeliharaan Taman Makam Pahlawan di DIY kepada Kepala Dinas Sosial DIY. Penyerahan wewenang tersebut tidak disertai dengan penyerahan aset TMP sehingga sampai kewenangan pembinaan dan

pemeliharaan berpindah ke Dinas Sosial Kabupaten Bantul tidak dilakukan perpindahan aset TMPN Kusuma Bangsa.

Berdasarkan Surat Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Bantul No 1142/300.34-02/XI/2010 tanah tersebut tercatat sebagai tanah Kas Desa Patalan Persil 32 Klas IV. Meskipun demikian, demi kelancaran pembinaan dan pemeliharaan TMPN Kusuma Bangsa, Dinas Sosial Bantul melakukan kerjasama dengan Badan Keuangan dan Aset Daerah Bantul untuk memberikan kompensasi atas tanah TMPN Kusuma Bangsa kepada Desa Patalan.

Terlepas dari dilema status aset, TMPN Kusuma Bangsa menjadi saksi nyata kisah heroik para prajurit demi kemerdekaan negara Indonesia. Sebagaimana yang dinyatakan Bung Karno "Hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya yang dapat menjadi bangsa yang besar." Kalimat ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap jasa para pahlawan sebagai fondasi bagi kebesaran bangsa. Semangat kepahlawanan yang dahulu ditunjukkan melalui pengorbanan tenaga, harta, bahkan nyawa, kini dapat diwujudkan dengan menorehkan prestasi di berbagai bidang kehidupan. Menumbuhkan pahlawan masa kini adalah tanggung jawab setiap warga negara Indonesia, yang harus diwujudkan melalui aksi nyata untuk memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. Arsip:

- a. Buku Riwayat Pemakaman TMPN Kusuma Bangsa 1
- b. Buku Riwayat Pemakaman TMPN Kusuma Bangsa 1
- c. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 23 Tahun 2014
- d. Buku Tamu Keluarga Jenazah TMPN Kusuma Bangsa

- e. Buku Tamu Umum TMPN Kusuma Bangsa
- f. Surat Sekretaris Daerah atas nama Gubernur DIY Nomor 120/8769 tertanggal 31 Mei 2022 Tentang Penjelasan Terkait Aset TMPN Kusuma Bangsa
- g. Surat Sekretaris Daerah atas nama Bupati Bantul Nomor 028/01699/DINSOS tertanggal 19 April 2022 Tentang Permohonan Penjelasan/Penyerahan Aset TMP Kusuma Bangsa Bantul
- h. Notulen Rapat “Pembahasan Surat Bupati Bantul Nomor 028/01699/DINSOS Tanggal 19 April 2022 Perihal Penjelasan/ Penyerahan Aset TMP Kusuma Bangsa Bantul
- i. Leaflet TMPN Kusuma Bangsa-Bantul Yogyakarta-Dinas Sosial Provinsi DIY

2. Wawancara:

- a. Dedi Ahmad Jabir, A.Md., S.Ip., M.Pa (Kasi Kepahlawanan dan Restorasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Bantul)
- b. Bapak Kirman (Petugas pengelola TMPN Kusuma Bangsa 1982 – 2014)
- c. Bapak Giyanto (Petugas pengelola TMPN Kusuma Bangsa 2013 – sekarang)

PROFIL PENULIS



Fahrudin

Lahir di Tegal, 8 September 1993.

Pendidikan dan Aktivitas:

- S-1 Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta (Lulus 2016)
- S-2 Pendidikan Sejarah di Universitas Negeri Yogyakarta (Lulus 2018)
- Dosen Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta (2019-sekarang)

SEJARAH SINGKAT DAN TOPONIM KALURAHAN PALBAPANG

Oleh:

Eri Sasongko Endratmo

Kepala Urusan Tatalaksana Kalurahan Palbapang

Email: endratmo92@gmail.com

Peristiwa sejarah dapat diketahui atau direka ulang dengan adanya bukti peristiwa tersebut. Bukti sejarah itulah yang bisa menggambarkan bagaimana peristiwa itu terjadi. Untuk mengungkap kembali peristiwa masa lalu tentu diperlukan sumber-sumber sejarah yang mendukungnya. Sumber-sumber itu berasal dari jejak peninggalan masa lampau yang dapat memberi informasi tentang sebuah peristiwa. Berikut ini akan kita sampaikan sejarah singkat tentang Kalurahan Palbapang yang berada di Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul.

dengan bergelar Ki Ageng Mangir I (Alfian dkk, 1992). Ia merupakan cucu dari Prabu Brawijaya V. Wilayah Mangir yang didirikan oleh Ki Ageng Wanabaya diperkirakan berdiri tidak lama setelah Majapahit runtuh, sekitar masa kepemimpinan Sultan Trenggono di Demak (Riyadi, 1981). Ki Ageng Mangir I membuat desa di sana dan memulai kehidupan barunya. Kini Situs Ki Ageng Mangir Wonoboyo berada di Mangir Tengah, Sendangsari, Pajangan, Bantul.



Gambar 8.1 Kalurahan Palbapang
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Sebelum kita bahas tentang sejarah Kalurahan Palbapang, kita akan bahas secara singkat tentang berdirinya daerah Mangir. Sebagian wilayah Palbapang dulunya merupakan bagian dari wilayah Mangir. Pendiri pedesaan Mangir adalah Ki Ageng Wanabaya



Gambar 8.2 Situs Petilasan Ki Ageng Mangir
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Daerah Mangir merupakan sebuah daerah *perdikan*, daerah ini disebut perdikan karena tidak mau tunduk dalam kekuasaan kerajaan manapun yang sedang berkuasa saat itu (otonom). Daerah Mangir terletak di ujung sisi timur aliran Sungai Progo dan ujung Sungai Bedog (sudut tempuran sungai). Sungai Progo di wilayah itu dulunya juga menjadi tempat penyeberangan dari sisi barat maupun timur sungai.

Pada awal mula berdirinya daerah Mangir, orang-orang yang bertempat tinggal di sepanjang aliran Sungai Progo menaruh simpati kepada daerah tersebut sehingga mereka banyak yang tinggal di Mangir (Balai Penelitian Bahasa, 1890). Berdasarkan buku *Ki Ageng Mangir Cikal Bakal Desa Tertua di Bantul*, selama hampir satu setengah abad bumi Mangir hidup dalam ketenteraman, kemerdekaan, dan kemandirian di bawah kepemimpinan dinasti pemuka desa yang bergelar Ki Ageng Mangir I (1470-1601 M). Pengaruh Mangir bahkan pernah sampai ke wilayah Kedu, Bagelan, Pati, Jepara, Madiun, Kediri, Pajang, dan Semarang.

Seperti yang telah disampaikan di atas, keberadaan Palbapang tidak bisa dilepaskan dari Perdikan Mangir ini. Penamaan Palbapang berasal dari kata *pal* (batas, batok, tempat) dan *bapang* (dijaga, dibawa). Nama tersebut bermula dari kisah penguasa Mangir saat itu yaitu Bagus Wanabaya atau dikenal dengan Ki Ageng Mangir yang melakukan perjalanan ke arah timur menuju ke Kerajaan Mataram. Pada saat melakukan perjalanan, sesampainya di sebuah wilayah ia diserahkan kepada prajurit Mataram yang akan mengawalinya menuju Mataram. Wilayah tersebut lalu dinamai dengan Palbapang yang artinya tempat atau batas penjagaan.



Gambar 8.3 Perempatan Palbapang yang konon merupakan batas antara kerajaan Mangir dengan Kerajaan Mataram

Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Pada zaman kolonial Belanda, daerah Palbapang dimanfaatkan untuk sarana transportasi, terutama industri gula. Hal tersebut didukung dengan pendirian Stasiun Palbapang untuk mengangkut produksi gula yang berada di Gesikan. Stasiun tersebut juga difungsikan untuk trem sebagai sarana transportasi orang Eropa maupun Bumiputera pergi ke kota Yogyakarta pada masanya (*De Locomotief*, 17 Agustus 1910). Pada masa kini, stasiun lama Palbapang telah dialihfungsikan sebagai terminal. Salah satu bangunan tua yang tadinya merupakan bagian dari stasiun masih dipertahankan dan dipugar menjadi bagian dari terminal.



Gambar 8.4 Stasiun Lama Palbapang pada 1896 M

Sumber: KITLV



Gambar 8.5 Terminal Palbapang (Ex Stasiun Palbapang)

Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Selain itu, di daerah Palbapang juga didirikan Cagak ANIEM atau tiang listrik zaman Belanda. ANIEM merupakan akronim dari *Algemeene Nederlansch-Indie Electriciteit Maatschappij*. Perusahaan listrik yang beroperasi pada masa kolonial.



Gambar 8.6 Cagak ANIEM Palbapang (Tiang Listrik lama Zaman Belanda)

Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Tak dapat dipungkiri bahwa Palbapang merupakan salah satu kalurahan tertua di Bantul. Untuk itu, penentuan hari jadi kalurahan dilakukan melalui beberapa langkah, di antaranya dengan mencari informasi arsip tentang hari jadi desa di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bantul kemudian ke

Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah DIY. Dari kegiatan tersebut, berhasil didapatkan *soft copy* Maklumat Nomor 5 tentang penggabungan desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1948 yang memuat penggabungan Desa Palbapang yaitu dari Kalurahan Tajeman, Gandon, dan Taruban.

Arsip yang ada di Puro Pakualaman memuat tentang penggabungan desa se-Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 1948 beserta informasi arsip maklumat No 7, 14, 15, 16 dan 17 tentang tata pemerintahan di tingkat kalurahan-kalurahan. Selain itu, informasi sejarah desa didapatkan dengan wawancara para sesepuh yang masih hidup antara lain seperti Suparno warga Karasan dan Siswo Atmojo warga Taskombang yang mana didapatkan hasil bahwa hari jadi Desa Palbapang adalah tahun 1946. Berdasarkan data informasi tersebut bahwa hari jadi Kalurahan Palbapang berdiri secara legal tahun 1946, Hal itu diperkuat dengan Buku Kas Keuangan tanggal 31 Desember 1946, buku kas keuangan tahun 1947 yang sudah menggunakan nama Palbapang, rekapan daftar susunan pamong kalurahan yang memuat tahun pengangkatan, antara lain lurah pertama Sastro Sudarmo, Buku Putusan Dewan Kalurahan Palbapang No 1 tahun 1947 tertanggal 15 Februari 1947 yang di dalamnya sudah menyebutkan Kalurahan Palbapang, Hasil putusan desa Kalurahan Tajeman tahun 1946 tertanggal 8 Oktober 1946. Putusan tersebut memuat persiapan pemindahan dari Kalurahan Tajeman menjadi Kalurahan Palbapang. Hal itulah yang menjadi dasar resmi sebagai Hari Jadi Kalurahan Palbapang, bertepatan dengan Hari Selasa Pon tanggal 8 Oktober 1946.

DAFTAR PUSTAKA

- Balai Penelitian Bahasa, *Babad Mangir*, Jilid I (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1980), hlm. 100.
- Djoko Suryo, "Kisah Senapati-Ki Ageng Mangir dalam Historiografi Babad", dalam *Babad dan Hikayat sampai Sejarah Kritis*, ed.T, Ibrahim Alfian, dkk., (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992), hlm. 107.
- Slamet Riyadi, *Babad Demak*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1981), hlm. 90.
- Team Projotamansari, *Ki Ageng Mangir Cikal Bakal Desa Tertua di Bantul*, (Yogyakarta: Yayasan Projotamansari Bantul), hlm. 5-6.

PROFIL PENULIS



Eri Sasongko Endratmo, S.Hum

Lahir di Bantul, 16 September 1992.

Pendidikan dan Aktivitas:

- S-1 di Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam
- Kepala Urusan Tatalaksana Kalurahan Palbapang

SEJARAH DAN TOPINIM KALURAHAN RINGINHARJO

Oleh:

Arief Baskoro

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: desa.ringinharjo@bantulkab.go.id

Pendahuluan

Setiap sesuatu yang berada saat ini mempunyai cerita atau asal-usul di masa lampau. Desa sebagai kesatuan teritorial dan administratif yang terkecil di Indonesia, memiliki karakter tersendiri disebabkan masing-masing desa atau daerah terbentuk melalui proses sejarah yang panjang dan berbeda-beda. Sejarah juga wajib diketahui oleh masyarakatnya sendiri agar ketika orang asing yang bertanya tentang sejarah desa dapat dijelaskan dengan baik tentang bagaimana sejarah terbentuknya desa yang ditempatinya saat ini.

Sejarah

Kalurahan adalah sebutan desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah kapanewon.

Nama Ringinharjo berasal dari dua kata dasar: *ringin* berarti sebuah pohon beringin, dan *harjo* berarti sejahtera; murah sandang dan pangan. Oleh karena itu, nama Ringinharjo bermakna atau merujuk pengertiannya pada keberadaan pohon beringin besar yang meneduhkan, yang akan menjadikan sebuah desa menjadi

sejahtera dan murah dalam sandang maupun pangan.

Adanya pohon beringin di Kalurahan Ringinharjo berawal dari sebuah pohon yang menjulang tinggi dan besar berada yang di Padukuhan Deresan, berlokasi tidak jauh dari Kantor Kalurahan Ringinharjo saat ini. Konon Sunan Geseng lah yang menanam di tempat tersebut. Hal itu terjadi karena peristiwa syiar agama Islam oleh Sunan Kalijaga dan Sunan Geseng di tempat tersebut. Oleh karena itu pula pohon beringin dan lokasi yang dimaksud menjadi sebuah petilasan penting dari kedua tokoh yang dimaksud.



Gambar 9.1 Balai Kalurahan Ringinharjo
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Berdirinya Kalurahan Ringinharjo juga ditandai dengan perpindahan atau juga penggabungan dari Desa Bantulkarang (*Cikal bakal berdirinya Kabupaten Bantul*) yang pemerintahannya terletak di Dusun Bantulkarang kemudian berpindah ke

Jetak dan selanjutnya berpindah ke Soropaten (*Kantor Kalurahan sekarang*). Perpindahan kantor kalurahan dari Jetak ke Soropaten terjadi pada tahun 1970.

Perpindahan tersebut ditandai dengan adanya sebuah perayaan arak-arakan yang sangat besar dari masyarakat, dimana sebuah pohon beringin dibawa beramai-ramai menuju ke Dusun Deresan dan ditanam di sebidang tanah Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat yang pada saat ini terletak di utara masjid Deresan. Arak-arakan dalam rangka penanaman pohon beringin yang dimaksud terjadi pada tanggal 23 Juni 1923.

Pada pertengahan tahun 2005 pohon beringin sisi utara yang menjadi petilasan dari Sunan Kalijaga roboh dimakan usia, lalu penanaman pohon beringin baru dilakukan pada hari Jum'at tanggal 10 bulan September tahun 2010. Pohon beringin baru tersebut berasal dari Kraton Yogyakarta sebagai *tetenger* dari kraton dan kemudian pada tahun 2011 diberi nama *Kyai Daruno Mulyo*. Penamaan pohon beringin tersebut dilakukan bersamaan dengan diadakannya Gerebeg Ketupat.



Gambar 9.2 Pohon beringin di lokasi pelaksanaan Grebeg Kupat Ringinharjo
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Kesenian dan Kebudayaan

Ada berbagai macam kesenian di wilayah Kalurahan Ringinharjo, misalnya reog, karawitan, wayang, angklung, dan juga kethoprak. Kelompok-kelompok kesenian ini tersebar di dusun-dusun yang ada di wilayah Kalurahan Ringinharjo. Kesenian ini juga masih aktif dari dahulu hingga sekarang. Kalurahan Ringinharjo yang saat ini telah menjadi Desa Rintisan Budaya juga kaya akan kebudayaan, tradisi dan kesenian. Salah satu tradisi yang terkenal dan masih melekat hingga saat ini adalah tradisi Grebeg Kupat yang dilaksanakan setiap tahun pada bulan Syawal. Tradisi tersebut melibatkan seluruh warga desa. Salah satu rangkaian acara Grebeg Kupat adalah mengarak berbagai peninggalan leluhur seperti pusaka, topeng, dan keris.

Selain Grebeg Kupat juga ada Perayaan Panen Raya yang ditandai dengan upacara Wiwitan. Wiwitan merupakan ungkapan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa bahwasanya telah memberikan anugerah alam yang subur. Dalam upacara Wiwitan masyarakat mengenakan busana adat Jawa kemudian bersama-sama membawa aneka sesaji menuju area persawahan. Sampai di persawahan kemudian doa dipanjatkan dan dilanjutkan dengan pemotongan batang padi sebagai simbol sudah memasuki masa panen.

Pemerintahan

Dengan ditandainya arak-arakan dari kantor pemerintahan lama Bantulkarang yang berkantor di Jetak menuju ke Kantor Pemerintahan yang baru di Soropaten (*Kantor Kalurahan sekarang*), maka peristiwa itu menjadi tanda awal terbentuknya pemerintahan

yang baru yang kemudian dinamakan Pemerintahan Desa Ringinharjo.

Ada pun daftar nama-nama lurah berkait dengan terbentuknya Kalurahan Ringinharjo adalah sebagai berikut :

1. Ronorejo (sebelum Pemerintahan Desa Ringinharjo terbentuk)
2. So ikromo (sebelum Pemerintahan Desa Ringinharjo terbentuk)
3. Panggih Suwitarjo (Peralihan dari Jetak ke Soropaten)
4. Djoemeri Dirjo Suwito (1970 – 1992)
5. H Jakfar (1992 – 1998)
6. H Wirandoko (2002 – 2010)
7. Tavip Suprayogi (2012 – 2018)
8. Sulistya Admaji (2018 – Sekarang)

Bentang Alam

Sungai Bedog di sebelah barat berbatasan langsung dengan Kalurahan Guwosari. Sungai tersebut mempunyai hulu di Taman Nasional Gunung Merapi dan bermuara di Sungai Progo yang menjadikannya sebagai irigasi bagi persawahan yang ada di wilayah Kalurahan Ringinharjo.

Keanekaragaman flora dan fauna seperti pohon gayam yang masih banyak ditemui dan juga bambu yang menjaga kualitas air menjadi bagus. Fauna seperti

burung pipit masih banyak ditemukan. Selain itu, ikan sepat maupun bethik juga masih dapat ditemukan di sepanjang aliran Sungai Bedog.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai sejarah Kalurahan Ringinharjo. Kalurahan Ringinharjo merupakan suatu desa yang terbentuk dari perjalanan yang panjang dari masa sebelum kemerdekaan hingga masa pasca kemerdekaan. Dengan ditandainya arak-arakan dari Jetak menuju Soropaten dan juga dengan membawa pohon ringan yang ditanam di tanah kagungan dalem menjadi titik awal berdirinya sebuah desa yang bernama Ringinharjo.

Kesenian dan juga kebudayaan yang mengakar dan masih secara masif dilakukan sampai hari ini adalah pertanda bahwasannya sebagai generasi hari ini kita tidak mau kehilangan asal-usul warisan leluhur. Selain itu, bentang alam yang masih dijaga hingga saat ini juga bertujuan agar kelak anak cucu kita masih dapat menikmati udara yang sejuk, persawahan yang luas, dan air yang bersih.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2019

Wawancara Bapak H Jakfar Khamdi (*Mantan Lurah Desa Ringinharjo 1992-1998*), Sabtu 8 Juni 2024 Pukul 18. 30 WIB.

Wawancara Mas Bekel Atmo Yasinto (*Yasin*), Jum'at ,7 Juni 2024 Pukul 10.55 WIB.

PROFIL PENULIS



Arief Baskoro

Lahir di Bantul, 12 September 1994.

Pendidikan:

- S-1 di UIN Sunan Kalijaga – Sejarah dan Kebudayaan Islam
- AKNSBY – Kriya Kulit

SEJARAH & TOPONIM KALURAHAN TIRENGGO

Oleh:

Dwi Purnomo

Carik di Kalurahan Tpirenggo

Email: omahgrafis@gmail.com

Kalurahan Tpirenggo adalah salah satu dari lima kalurahan yang berada di Kapanewon Bantul dan mempunyai luas wilayah 6.100 Ha serta berada di wilayah pusat ibukota Kabupaten Bantul. Secara geografis Kalurahan Tpirenggo berbatasan dengan Kalurahan Pendowoharjo di sebelah utara, Kalurahan Sabdodadi di sebelah timur, Kalurahan Sumbermulyo di sebelah selatan, dan Kalurahan Bantul di sebelah barat.



Gambar 10.1 Gapura Depan Kalurahan Tpirenggo
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Berdasarkan Maklumat Penggabungan Daerah-daerah Kalurahan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono IX pada tahun 1946, dapat diketahui bahwa Kalurahan Tpirenggo berdiri pada hari Sabtu Wage, tanggal 23 November 1946 atau tanggal 28 Besar 1877 Jimawal, Windu Kunthara, Wuku Dhukut atau tanggal 28 Dzulhijjah 1365 H. Kata *tri* dalam bahasa Jawa berarti tiga, dan kata *renggo* berarti pemimpin. Kalurahan

Tpirenggo pada awal berdirinya merupakan gabungan dari tiga kalurahan lama, yaitu Niten di sebelah utara, Nogosari di tengah, dan Batikan di sebelah selatan.

Secara administratif, Kalurahan Tpirenggo terbagi menjadi 109 RT dan 17 Padukuhan, yaitu:

- | | |
|---------------------|----------------|
| - Gempolan | - Gandekan |
| - Sragan | - Manding |
| - Klembon | - Kweden |
| - Priyan | - Bakulan |
| - Pasutan | - Cepoko |
| - Bogoran | - Karang Mojo |
| - Pepe | - Bantul Timur |
| - Nogosari | - Gedongan |
| - Sumber Batikan | |

Penamaan padukuhan ataupun dusun di Tpirenggo seringkali berasal atau berdasarkan nama tokoh, flora, atau ciri khas dari wilayah tersebut. Salah satu contohnya adalah Padukuhan Pasutan. Nama padukuhan ini diambil dari nama leluhur atau cikal bakal yang bernama Dipasuta. Kemudian contoh lain adalah Padukuhan Pepe yang namanya diambil dari tokoh Kyai Pepe. Padukuhan Cepoko diambil dari nama bunga cempaka yang banyak tumbuh di sana. Padukuhan Batikan diambil dari cerita zaman dahulu bahwa di tempat tersebut banyak penduduk yang berprofesi sebagai pembatik.

Saat ini Kalurahan Trirenggo dipimpin oleh Lurah Ernawati Kusumaningsih, M.Or. sebagai lurah kelima. Adapun semenjak berdirinya Kalurahan Trirenggo telah dipimpin oleh empat lurah sebelumnya. Nama-nama lurah terdahulu yaitu R. Sukarjan, Kasimin S. Hadi Purwanto, Nur Handoko, dan Munawar.

Menurut data monografi Kalurahan Trirenggo berpenduduk 19.129 jiwa dan terdiri dari 6.790 kepala keluarga. Kategori penduduk terbanyak menurut usia adalah 15 – 65 tahun yaitu sebanyak 12.941 jiwa. Sebagian besar penduduknya berprofesi sebagai tukang, swasta, dan wiraswasta/pedagang.

PROFIL PENULIS



Dwi Purnomo

Lahir di Bantul, 14 Januari 1982.

Pendidikan dan Aktivitas:

- Alumni ASRD 'AKSERI" Yogyakarta
- Bekerja sebagai Carik di Kalurahan Trirenggo

SEJARAH ASAL-USUL BERDIRINYA KALURAHAN BANTUL

Oleh:

Mas Bekel Sepuh Joyo Rekso Tirtowiguno

Ulu-Ulu Kalurahan Bantul

Email: kuswandimakmu1981@gmail.com

Kalurahan Bantul, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul merupakan sebuah kalurahan yang berada di pusat Pemerintahan Kabupaten Bantul. Kalurahan Bantul dulunya merupakan penggabungan dari tiga (3) kalurahan, yaitu Kalurahan Gandekan, Kalurahan Teruman, dan Kalurahan Bejen. Hal tersebut tertuang dalam Maklumat Nomor 05 Tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 22 April 1948.



Gambar 11.1 Pendopo Kalurahan Bantul
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Menurut narasumber Mas Bekel Sepuh Joyo Mulyadi yang merupakan mantan Pamong Kalurahan Bantul yang menjabat sebagai Jogoboyo (Kasi Pemerintahan), Kalurahan Bejen berkantor di kediaman Almarhum Bapak HM. Bilal, sedangkan Kalurahan Teruman berkantor di Geblag yang merupakan kediaman orang tua dari Mas Bekel Sepuh Joyo Mulyadi, sedangkan Kalurahan

Gandekan dulunya berkantor di Kantor Kalurahan Bantul saat ini yaitu Jl. Nyi Ageng Serang No. 15-17 Depok, Gandekan, Bantul.

Setelah terjadinya penggabungan tiga kalurahan sesuai Maklumat Nomor 05 Tahun 1948 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, yang ditunjuk pertama kali sebagai Lurah adalah HM. Goemoen yang memerintah dari tahun 1948-1990. Sepeninggal HM. Goemoen Pemerintah Kalurahan Bantul dipimpin oleh Almarhum Bapak Tutung Tubagus Suwagiyo SH dari tahun 1990 sampai tahun 1998, dan dilanjutkan oleh Almarhum Bapak Sudiman (PJ) yang merupakan ASN dari Kecamatan Bantul dari tahun 1998-1999. Selanjutnya dilakukan pemilihan langsung dan terpilihlah Almarhum Bapak Sudiyanto dari Tahun 1999-2009. Selanjutnya lurah desa dijabat oleh lurah desa terpilih Bapak HM. Zubaidi, sejak tahun 2009 – 2018. Setelah masa jabatan Lurah Bapak HM. Zubaidi, sebelum terpilih lurah definitif Pemerintah Kalurahan Bantul di-PJ oleh Sekretaris Kecamatan Bantul. yaitu Almarhum Bapak Rumanta Paskah Martana, S.Sos. MM. selama 7 Bulan kemudian diadakan pemilihan lurah dan terpilihlah Bapak Supriyadi yang menjabat dari tahun 2019 sampai sekarang. Lurah Bantul Bapak Supriyadi sebelum menjabat sebagai lurah merupakan Dukuh Geblag, Kalurahan Bantul.



Gambar 11.2 Kegiatan Rutin Apel Senin Pagi
Pamong Kalurahan Bantul
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Kalurahan Bantul yang memiliki luas wilayah 524 Ha dan jumlah penduduk 16.800 jiwa terbagi dalam 12 Padukuhan dan 93 RT ini masyarakatnya memiliki berbagai macam mata pencaharian seperti petani, buruh, pegawai, dan yang lainnya. Adapun di wilayah Kalurahan Bantul, memiliki keanekaragaman warisan kebudayaan di antaranya merti dusun yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh masyarakat Padukuhan Karanggayam, Babadan, Geblag, Grujugan, dan Gandekan. Selain itu, juga ada tradisi wiwitan yang rutin dilaksanakan hampir 70% masyarakat tani di Kalurahan Bantul menjelang masa panen padi.

Kalurahan Bantul juga memiliki berbagai macam kesenian tradisional seperti seni Jathilan Puspo Rinonce Tegaldowo Padukuhan Grujugan, seni Jathilan Satria Kuda Sembada Grujugan, Jathilan Klasik Grujugan Lor, Jathilan Klasik Kaligawe Dk. Geblag serta Jathilan Tri Manunggal Dono Sworo KMJ Padukuhan Babadan. Selain itu, masih ada kesenian Gejog Lesung yang berada di Padukuhan Geblag yakni Gejog Lesung Maharani dan KMJ Padukuhan Babadan, Gejog Lesung Sekar Rara Jonggrang. Sedangkan grup karawitan ada di sanggar seni Wulan Tumanggal Melikan Lor Dk. Gandekan, karawitan Padukuhan Geblag, karawitan Sekar Rara Jonggrang Padukuhan Babadan,

dan sanggar seni Padmasana Nyangkringan.



Gambar 11.3 Pentas kelompok jathilan "Satrio
Kudho Senbodo"

Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Selain kesenian, Kalurahan Bantul juga memiliki banyak benda sejarah seperti Mushaf Al Quran tulisan tangan di Bejen, bangunan arsitektur tradisional joglo di Serayu (Almarhum Bapak H. Rohadi, BA), Rumah Joglo kediaman Almarhum HM. Bilal di Bejen, Rumah Joglo di Karanggayam, Rumah Joglo di Padukuhan Nyangkringan, Rumah Joglo di Padukuhan Bantul Warung, Rumah Joglo di Melikan Lor, Rumah Joglo di Padukuhan Geblag kediaman Mas Bekel Sepuh Joyo Mulyadi dan Rumah Joglo Bapak Sriyanto, Rumah Joglo Almarhum Bapak HM. Abdulbari di Teruman, Rumah Joglo Bimo Santoso di Tegaldowo, Rumah Joglo Bapak Siti Tegaldowo, Rumah Joglo kediaman Almarhum Bapak Suprpto (Bupati Karanganyar) di Menden Dk. Babadan, Rumah Joglo Darmo Suwito (Kediaman mantan Jaksa Agung RI Sukarton Marmosujono) di Kuwiran Padukuhan Babadan, dan Rumah Joglo Pendhapa Ndalem Mardutaman Jonggrangan (Kediaman Mas Bekel Sepuh Joyo Rekso Tirtowiguno). Selain itu, masih ada peninggalan sejarah mata air Ngebak di Padukuhan Geblag, Sumur Belanda di Jonggrangan serta Watu Kenteng di

Kuwiran Padukuhan Babadan. Terdapat juga wisata religi Makam Ki Surawaseso yang terletak di atas Bukit Kaligawe yang

merupakan makam salah satu pengikut Pangeran Diponegoro.

PROFIL PENULIS



Mas Bekel Sepuh Joyo Rekso Tirtowiguno (Kuswandi)

Lahir di Bantul, 5 Mei 1981.

Pendidikan dan Aktivitas:

- Alumni SMSR N Yogyakarta Angkatan 1999 jurusan Seni Murni
- Kepala Seksi Ulu-Ulu di Pemerintah Kalurahan Bantul

SEJARAH PENDIDIKAN DI KABUPATEN BANTUL SEJAK MASA PERGERAKAN NASIONAL

Oleh:

Supardal

Ketua MSI Komisariat Kabupaten Bantul

Email: damarjatisupardal71@gmail.com

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah. Kabupaten Bantul, yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki sejarah pendidikan yang kaya dan telah mengakar sejak masa pergerakan nasional Indonesia. Dalam artikel ini, akan dijelajahi evolusi pendidikan di Kabupaten Bantul sejak masa pergerakan nasional hingga saat ini.

Awal Mula Pendidikan di Kabupaten Bantul

Sejarah pendidikan di Kabupaten Bantul dapat ditelusuri kembali ke periode awal abad ke-20, ketika gerakan nasionalis Indonesia mulai meningkat. Seperti diketahui, pendidikan di Indonesia telah ada sejak tahun 1901, yaitu pada masa pendudukan Belanda, bahkan sejak abad ke-17, pemerintah kolonial Belanda sudah menetapkan undang-undang pendidikan. Akan tetapi, hanya sebagian kecil orang-orang di kalangan bumiputra yang dapat mengenyam pendidikan tersebut. Baru pada awal abad ke-20 pendidikan mulai digaungkan dan berkembang di kalangan bumiputra. Hal ini tidak lepas dari adanya Politik Etis (*Etische Politiek*) atau politik balas budi yang dicetuskan oleh van Deventer yang berisi tiga program yang dikenal dengan istilah Trias van Deventer yang terdiri dari edukasi, irigasi, dan transmigrasi.

Pada masa kolonial Belanda, pendidikan masih didominasi oleh lembaga-lembaga pendidikan tradisional seperti pesantren dan sekolah rakyat. Di Bantul, terdapat pesantren-pesantren yang telah eksis pada waktu itu, seperti Pondok Pesantren Al Munawwir yang berada di Dusun Krapyak, Panggungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta yang merupakan pondok pesantren tertua di Yogyakarta. Pondok pesantren yang dikenal dengan nama Pondok Pesantren Krapyak, didirikan oleh K.H. Muhammad Munawwir pada 15 November 1911. Seperti kebanyakan pondok pesantren tradisional lainnya, kurikulum utama yang diajarkan adalah keseimbangan antara pembelajaran Al-Qur'an dan kitab-kitab kuning. Sistem pembelajaran yang dikembangkan yaitu *sorogan*, santri membaca kitab yang dikaji dan *bandongan* yaitu pembelajaran dalam bentuk kelas pada sekolah agama.

Sekolah yang pertama kali didirikan di Bantul yaitu pada 1889 - 1893, merupakan sekolah swasta untuk kaum bumiputra yang berdiri di daerah Imogiri, Jejeran, Kretek, Bantul, dan Godean (Sleman). Pada tahun tersebut keadaan sekolah masih sangat sederhana. Biaya pendirian sekolah ini berasal dari bantuan Kasultanan Yogyakarta yang dipergunakan baik untuk pengadaan alat pengajaran maupun gaji untuk guru. Pada pertengahan 1906, diputuskan untuk

memperluas penyelenggaraan pendidikan swasta bagi kaum bumiputra. Perluasan pendidikan tersebut mendapatkan pendanaan dari pemerintah kolonial dan Kasultanan Yogyakarta. Dalam penyelenggaraannya, banyak di antara bangunan sekolah yang digunakan belum merupakan bangunan milik sendiri melainkan sewa.

Pada masa pergerakan nasional, pendidikan di Bantul menjadi semakin dipahami sebagai alat untuk memperkuat identitas nasional dan memerangi penjajahan. Tokoh-tokoh nasionalis seperti Ki Hajar Dewantara dan para pemimpin lokal di Bantul memainkan peran penting dalam menggalang semangat pendidikan di kalangan masyarakat. Januari 1908 didirikan *De Tweede Inlandsche-School* berdasar Surat Keputusan Direktorat Pendidikan, Pengabdian, dan Perindustrian Nomor 529 tertanggal 14 Januari 1908. *De Tweede Inlandsche-School* mendapatkan anggaran dana pendidikan sebesar f20 setiap bulannya. Pada tahun 1922, Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa, sebuah gerakan pendidikan yang memperjuangkan pendidikan nasional yang merdeka dan berdasarkan kebudayaan lokal. Meskipun tidak berdomisili di Bantul, tetapi sebagian masyarakat Bantul juga merasakan keberadaan lembaga pendidikan tersebut.

Tercatat beberapa sekolah di Bantul yang telah berdiri sejak masa kolonial Belanda yaitu SD Negeri Jarakan dan SD Negeri Bakulan. SD Negeri Jarakan beralamat di Jalan Bantul Km. 5, Panggungharjo, Sewon, Kabupaten Bantul. Sekolah ini didirikan pada 5 Januari 1928, dan sudah memiliki SK Operasional tertanggal 1 Januari 1910. Sedangkan SD Negeri Bakulan yang beralamat di Bakulan,

Patalan, Jetis, Bantul telah memiliki SK Operasional tertanggal 1 Januari 1924. Kedua sekolah tersebut merupakan Sekolah Rakyat (SR) yang masih bertahan dan semakin berkembang hingga saat ini.



Gambar 12.1 Sekolah Bakulan
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Dalam perkembangannya, di Bantul kemudian banyak berdiri sekolah di berbagai daerah seperti Srandakan dan Sedayu. Jumlah murid yang terdaftar juga semakin banyak. Didirikan juga sekolah khusus guru dengan masa pendidikan setidaknya dua tahun, bahkan didirikan juga sebuah perkumpulan pendukung pendidikan untuk kalangan bumiputra yang diberi nama "Tjandra Armara".



Gambar 12.2 Sekolah Jarakan
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Perkembangan Pendidikan Modern di Era Pasca Kemerdekaan

Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, Kabupaten Bantul mengalami perkembangan yang signifikan dalam sektor pendidikan. Pemerintah daerah bersama masyarakat dan tokoh-tokoh pendidikan aktif membangun infrastruktur pendidikan yang lebih modern, seperti sekolah-sekolah negeri dan swasta. Sekolah-sekolah dasar, menengah, dan kejuruan dibangun untuk memenuhi kebutuhan pendidikan yang semakin meningkat di masyarakat.

Pada dekade 1960-an, pemerintah mulai menggalakkan program wajib belajar, yang diimplementasikan dengan pembangunan lebih banyak sekolah dasar di berbagai desa di Kabupaten Bantul. Hal ini membuka akses pendidikan yang lebih luas bagi anak-anak di pedesaan untuk mendapatkan pendidikan formal yang memadai.

Era Modern dan Tantangan Pendidikan Saat Ini

Memasuki abad ke-21, pendidikan di Kabupaten Bantul terus mengalami transformasi yang signifikan seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan sosial ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah bersama-sama dengan berbagai pihak terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan melalui program-program pengembangan guru,

perluasan jaringan sekolah, serta pemanfaatan dan integrasi teknologi dalam pembelajaran.

Akan tetapi, tantangan tidak dapat dihindari. Masih terdapat kesenjangan akses pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan, serta perluasan pendidikan inklusif bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Selain itu, pendidikan karakter dan nilai-nilai budaya lokal juga menjadi fokus untuk memperkuat identitas dan moralitas generasi muda Bantul di tengah arus globalisasi yang semakin kompleks.

Kesimpulan

Sejarah pendidikan di Kabupaten Bantul sejak masa pergerakan nasional hingga saat ini menunjukkan evolusi yang signifikan. Dari awal yang didominasi oleh pendidikan tradisional, hingga transformasi menjadi sistem pendidikan modern yang berfokus pada pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas. Semangat perjuangan tokoh-tokoh pendidikan dan masyarakat Bantul dalam membangun pendidikan telah mengantarkan daerah ini ke arah kemajuan yang lebih baik. Dengan terus memperkuat infrastruktur pendidikan, meningkatkan kualitas guru, dan mengintegrasikan nilai-nilai lokal dalam kurikulum, Kabupaten Bantul dapat terus bergerak maju sebagai salah satu pusat pendidikan terkemuka di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Athoilah, Ahmad, dkk. Gading Mataram, Sejarah Bantul 1678-1942, Yogyakarta: Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul, 2023.
- Data Pokok Pendidikan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, <https://dapo.kemdikbud.go.id/sekolah/284FBCCB1EFE50B9184E> diakses pada 1 Juli 2024.

Supardan, Dadan, "Menyingkap Perkembangan Pendidikan Sejak Masa Kolonial Hingga Sekarang: Perspektif Pendidikan Kritis", Generasi Kampus, Vol.1, 2008.

Sumber Internet:

<https://www.liputan6.com/regional/read/4578544/mengenal-pondok-pesantren-tertua-di-yogyakarta?page=2> diakses pada 27 Juni 2024.

<https://sekolahloka.com/data/sd-negeri-jarakan/> diakses pada 1 Juli 2024.

<https://sekolahloka.com/data/sd-negeri-bakulan-2/> diakses pada 1 Juli 2024.

<https://www.kompas.com/stori/read/2021/08/17/100000979/perkembangan-sejarah-pendidikan-di-indonesia?page=all> diakses pada 27 Juni 2024.

PROFIL PENULIS



Supardal

Lahir di Bantul, 19 April 1971.

Pendidikan dan Aktivitas:

- S-1 Pendidikan Sejarah di FKIP IKIP Yogyakarta (1997)
- S-2 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas PGRI Yogyakarta (2018)
- Guru di SMP Negeri 3 Bantul

SEJARAH JAMU DAN WEDANG UWUH DI KABUPATEN BANTUL

Oleh:

Angger Seta Adi

Museum Laboratorium Sejarah, Universitas PGRI Yogyakarta

Email: anggeradi98@gmail.com

Jamu Tradisional Khas Bantul

Sejarah Jamu di Bantul

Bantul merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki beragam warisan budaya dari masa lalu yang sampai saat ini masih bertahan dan terus berkembang, salah satunya adalah jamu. Secara historis, jamu sudah ada jauh sebelum Kerajaan Mataram Islam berdiri, yakni ketika masa Kerajaan Mataram Kuno. Pada masa itu jamu sudah biasa dijadikan minuman tradisional oleh masyarakat. Hal ini juga diketahui melalui bukti relief *Karmawibangga* di Candi Borobudur yang menggambarkan aktivitas pembuatan jamu untuk menyembuhkan orang yang sakit. Selain itu, pada naskah lama seperti *Serat Centhini* juga sudah ada resep ramuan untuk membuat jamu. Begitu pun pada masa Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Demak juga menjadikan jamu sebagai minuman tradisional. Pada tahun 1900 mulai berkembang industri-industri jamu rumah tangga (Pitaloka & Prasetyo, 2022).

Bantul yang dulunya merupakan bagian dari tempat berdiri dan berkembangnya Kerajaan Mataram Islam turut mempopulerkan jamu sebagai minuman tradisional. Hal itu bisa kita lihat juga sampai saat ini bahwa di berbagai tempat di Kabupaten Bantul masih banyak minuman tradisional seperti jamu,

wedang uwuh, dan aneka minuman tradisional lainnya. Bantul juga menjadi kabupaten terbanyak kedua di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai kabupaten yang memanfaatkan rempah sebagai peracik ramuan jamu tradisional yakni dengan persentase sebesar 48,72% (Bantul, n.d.).



Gambar 13.1 Dusun Kiringan
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi



Gambar 13.2 Patung Jamu di Kiringan
Sumber: Dokumentasi Tim Redaksi

Salah satu dusun di wilayah Kabupaten Bantul yang menjadi sentra atau pusat dari jamu tradisional adalah Dusun Kiringan. Dusun ini terletak di Kalurahan Canden, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul. Secara historis, jamu di Dusun Kiringan sudah ada sejak tahun 1950-an. Sebelum tahun itu, tepatnya ketika Belanda akan angkat kaki dari Nusantara, ada seorang ibu bernama Ibu Joparto yang kala itu menjadi warga di Dusun Kiringan dan bekerja sebagai tukang membatik di Kota Yogyakarta. Suatu hari Ibu Joparto bertemu dengan abdi dalem Kraton Yogyakarta dan kemudian meminta abdi dalem tersebut untuk mengajarkan bagaimana prosedur atau cara membuat ramuan jamu. Setelah belajar membuat jamu dari abdi dalem tersebut, kemudian Ibu Joparto beralih pekerjaan dengan berjualan jamu. Ternyata aktivitas kerja Ibu Joparto tersebut kemudian mendorong dua orang tetangganya untuk ikut berjualan jamu. Hal tersebut berkembang sehingga pada tahun 2021 ada sejumlah 116 orang penjual jamu di Dusun Kiringan (Anggraeni, 2021). Bahkan data terbaru dari Khafid, (2024) saat ini peracik dan penjual jamu di Dusun Kiringan sudah sebanyak 132 orang.



Gambar 13.3 Aktivitas Penjual Jamu di Dusun Kiringan

Sumber: Yuwono & Widyanti, 2022

Salah satu peracik dan penjual jamu di Dusun Kiringan adalah Ibu Murjiyati. Beliau merupakan generasi ketiga yang saat ini aktif sebagai peracik dan penjual jamu. Dulunya ia belajar langsung dari ibu dan neneknya untuk meracik jamu. Hingga setelahnya terus berkembang dan anaknya kini menjadi generasi keempat yang melestarikan tradisi meracik dan menjual jamu. Olahan minuman jamu tradisional yang dijual di antaranya adalah kunir asem, beras kencur, secang, jahe merah, temulawak, dan lain sebagainya (Duhri, 2023).



Gambar 13.4 Ibu Murjiyati (generasi ketiga) penjual jamu atau cucu Ibu Joparto (pelopor jamu di Dusun Kiringan)

Sumber: Khafid, 2024

Mayoritas yang menjadi pembuat dan penjual jamu di Dusun Kiringan adalah kaum perempuan yang menjual jamunya dengan cara digendong, maka dari itu kemudian muncul istilah jamu gendong. Oleh karena memiliki ciri khas dan mayoritas warganya berprofesi sebagai pembuat dan penjual jamu, maka Dusun Kiringan ini pada tahun 2016 lalu diresmikan oleh Pemerintah Bantul menjadi Desa Wisata Jamu Gendong. Sejak ditetapkannya Dusun Kiringan sebagai desa wisata menjadikan dusun ini lebih banyak dikenal oleh masyarakat luar. Di desa wisata ini pengunjung diberikan kesempatan untuk memiliki pengalaman

melihat secara langsung proses pembuatan jamu secara tradisional serta bisa mencoba untuk mencicipi kesegaran jamu di sana.



Gambar 13.5 Aktivitas Meracik Jamu di Dusun Kiringan
Sumber: Yuwono & Widyanti, 2022

Kemerenikan lain dari desa wisata ini adalah konsep wisata yang dimilikinya, yakni sebagai tempat untuk edukasi pendidikan dan kesehatan. Para pengunjung dapat belajar praktik secara langsung untuk meracik jamu tradisional, serta belajar ke kebun yang banyak ditanami tanaman-tanaman untuk meracik jamu, sehingga para pengunjung mendapat pengetahuan tentang jenis-jenis dan manfaat dari berbagai tanaman yang digunakan untuk meracik/bahan jamu.

Desa Wisata Jamu Gendong Kiringan ini memiliki beberapa keunikan di antaranya penyajian jamu dengan bathok kelapa yang dipercaya mengandung khasiat untuk kesehatan fisik, resep atau ramuan kesehatan yang sudah turun-temurun dari masyarakat desa, bahan *empon-empon* atau rempah alami tanpa pengawet, dan jamu yang segar karena diracik secara langsung di hadapan pembeli atau pengunjung (Hadi, 2022).

Wedang Uwuh sebagai Minuman Herbal Khas Bantul

Seputar Informasi Mengenai Wedang Uwuh

Salah satu jenis minuman tradisional yang memanfaatkan rempah-rempah adalah wedang uwuh. Dalam khasanah bahasa Jawa istilah *wedang* berarti minuman dan *uwuh* berarti sampah. Bila diartikan, *wedang uwuh* berarti minuman sampah, namun itu hanyalah sebuah istilah saja (Suryaningsum & Siti Hartati, 2018). Minuman tersebut merupakan minuman khas dari Imogiri, Bantul. Pada tahun 2017, wedang uwuh secara resmi terdaftar sebagai warisan budaya tak benda. Hal tersebut juga dilatarbelakangi oleh khasiat atau manfaat yang dikandungnya, serta sejarah masa lalu yang dimilikinya.



Gambar 13.6 Wedang Uwuh Khas Imogiri, Bantul
Sumber: Larasati, 2020

Wedang uwuh memiliki banyak khasiat bagi kesehatan tubuh, di antaranya dapat meredakan batuk dan sakit tenggorokan, menjaga kesehatan jantung, sebagai anti alergi, sebagai antimikroba, dan lain sebagainya (Marliah, 2023). Khasiat tersebut diperoleh karena wedang uwuh terbuat dari bahan-bahan rempah yang biasa digunakan sebagai bahan dasar bagi pembuatan jamu dan obat herbal. Beberapa bahan yang

digunakan dalam pembuatan wedang uwuh di antaranya kayu secang, jahe, cengkeh, kayu manis, akar dan daun sereh, biji dan daun pala, gula batu, dan kapulaga (Suryaningsum & Siti Hartati, 2018).

Sejarah Wedang Uwuh

Secara historis, wedang uwuh memiliki berbagai macam versi. Namun dari berbagai versi tersebut terdapat 3 versi yang banyak dikenal oleh masyarakat, yakni: pertama, wedang uwuh telah ada sejak zaman Kerajaan Mataram Islam diperintah oleh Sultan Agung. Versi ini menyebutkan bahwa pada suatu ketika Sultan Agung bersemedi di Bukit Merak dengan udara yang dingin. Kemudian beliau meminta kepada pengawalnya untuk membuatkan sebuah minuman hangat. Oleh karena gelapnya malam, akhirnya wadah minum tersebut bercampur dengan daun dan ranting pohon yang berjatuhan. Sang raja meminum minuman tersebut dan ternyata malah menyukainya dan kemudian meminta pengawalnya untuk membuatkan minuman yang sama persis. Sejak saat itu wedang uwuh menjadi minuman kesukaan raja dan mulai merambah ke masyarakat Yogyakarta.

Versi kedua menyatakan bahwa wedang uwuh konon dibuat pertama kali

oleh para prajurit Kerajaan Mataram Islam. Oleh karena tugas yang diemban begitu berat dengan perang dan keluar-masuk hutan yang dingin, kemudian para prajurit mencari ramuan dari bahan-bahan sekitar untuk menghangatkan badan. Ramuan tersebut yang kelak dikenal dengan sebutan wedang uwuh.

Versi ketiga menyatakan bahwa wedang uwuh dikenal dari kisah hidup Ny. Wajirah yang sejak kecil membantu bibinya berjualan wedang jahe dan wedang cengkeh dengan gula batu di kompleks Makam Raja-Raja Imogiri, Bantul. Seiring berjalannya waktu, terjadi gempa bumi di Jogja pada tanggal 27 Mei 2006 dan berdampak pada rumah sekaligus tempat berjualan Ny. Wajirah. Dengan kondisi rumah yang belum selesai perbaikan, ia tetap melanjutkan jualannya dan kemudian menambah beberapa bahan rempah ke dalam racikan minumannya. Justru minumannya tersebut kemudian membuat orang lain ketagihan. Termasuk para wartawan yang sedang meliput berita pasca peristiwa gempa bumi. Para wartawan lantas menyebut minuman tersebut sebagai minuman sampah karena rempah racikan Ny. Wajirah mengapung di gelas. Dari situlah kemudian dalam bahasa Jawa dikenal dengan nama wedang uwuh (Astuti & Nur, 2017).

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraeni, N. G. F. (2021). *Perancangan Visual Branding Dusun Kiringan sebagai Desa Wisata Jamu Gendong Kiringan*. Skripsi, Institut Seni Indonesia Yogyakarta.
- Astuti, & Nur, I. (2017). *Komposisi dan Sejarah Wedang Uwuh*. Imasnurastuti27. Blogspot.
- Bantul, A. D. K. (n.d.). *Bantul Seroja*. Dinkes.Bantulkab. Retrieved July 13, 2024, from <https://dinkes.bantulkab.go.id/hal/lain-lain-bantul-seroja>
- Duhri, M. K. (2023). *Menilik Sentra Jamu Kiringan Bantul yang Bertahan Hingga Empat Generasi*. Solo Pos Bisnis. <https://bisnis.solopos.com/menilik-sentra-jamu-kiringan-bantul-yang-bertahan-hingga-lintas-generasi-1663528>

- Hadi, W. (2022). Studi Eksploratif Tentang Sentra Jamu Tradisional di Daerah Istimewa Yogyakarta Sebagai Daya Tarik Wisata Kesehatan. *Khasanah Ilmu: Jurnal Pariwisata Dan Budaya*, 13(1), 55–62. <https://doi.org/10.31294/khi.v13i1.12372>
- Khafid, S. (2024). *Sentra Jamu Kiringan Bantul, Merawat Tradisi dengan Inovasi dan Teknologi*. Harian Jogja. <https://ekbis.harianjogja.com/read/2024/03/21/502/1168735/sentra-jamu-kiringan-bantul-merawat-tradisi-dengan-inovasi-dan-teknologi>
- Larasati, R. D. (2020). *5 Manfaat Wedang Uwuh Khas Yogyakarta dan Cara Membuatnya*. Buka Review. <https://review.bukalapak.com/>
- Marliah, S. (2023). *Manfaat Wedang Uwuh Hingga Asal Usulnya*. Gramedia Blog. https://www.gramedia.com/best-seller/manfaat-wedang-uwuh/#google_vignette
- Pitaloka, D. D. A., & Prasetyo, D. A. B. (2022). Eksplorasi Etnomatematika Aspek Measuring dan Counting Pada Aktivitas Pembuatan Jamu di Desa Wisata Jamu Gendong Kiringan, Bantul, Yogyakarta. *Prosiding Sendika*, 8(2), 234–241.
- Suryaningsum, S., & Siti Hartati, A. (2018). Peningkatan Kualitas Produksi Usaha Wedang Uwuh Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dusun Kerten Imogiri Bantul. *Jurnal Manajemen Daya Saing*, 20(2), 63–69. <https://doi.org/https://doi.org/10.2917/dayasaing.v20i2.6433>
- Yuwono, M., & Widyanti, N. N. W. (2022). *Belajar Bikin Jamu, Ide Wisata Anti-Mainstream di Bantul Yogyakarta*. KOMPAS.Com. <https://travel.kompas.com/read/2022/10/12/195154127/belajar-bikin-jamu-ide-wisata-anti-mainstream-di-bantul-yogyakarta?page=all>

PROFIL PENULIS

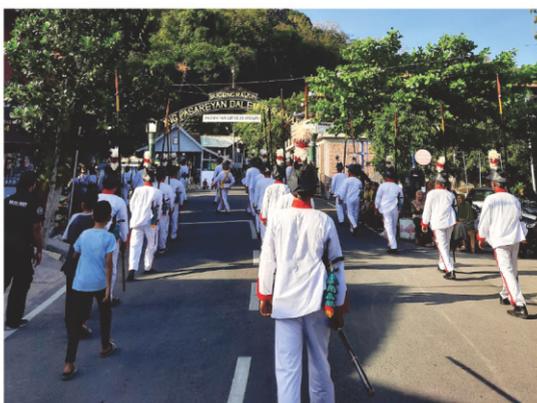


Angger Seta Adi, S.Pd.

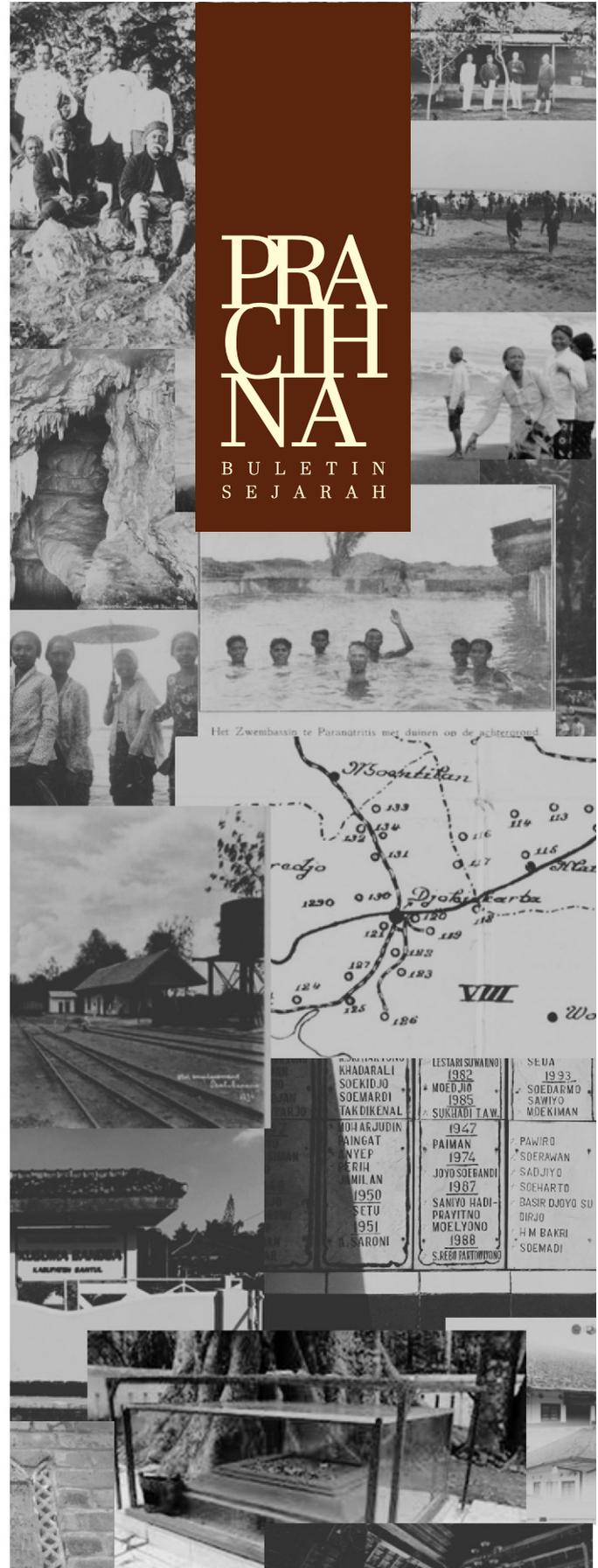
Lahir di Bantul, 19 Juli 1999.

Pendidikan dan Aktivitas:

- S-1 Pendidikan Sejarah Universitas PGRI Yogyakarta (2017–2022)
- Sekretaris Kalurahan Mandiri Budaya Sabdodadi
- Sekretaris Badan Usaha Milik Kalurahan



Prosesi **Kirab Siwur**, salah satu tradisi budaya rutin tahunan di Bantul yang menjadi rangkaian awal pada acara **Nguras Enceh** di Makam Raja-Raja Imogiri, 11 Juli 2024.
(Foto oleh Tim Redaksi)



Sampul Belakang:
Kolase Foto-foto Bantul
dari Masa ke Masa

Sumber:
Dokumentasi Tim Redaksi

